



KEBIJAKAN DAN POLITIK HUKUM NASIONAL TENTANG AIR SUSU IBU DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr.) dalam Ilmu Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

MUKLISIN

NIM. 31890515499

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442/2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Muklisin
Nomor Induk Mahasiswa : 31890515499
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Kebijakan dan Politik Hukum Nasional tentang Air
Susu Ibu di Indonesia perspektif Hukum Islam

Tim Penguji

Prof. Dr. Afrizal M, MA.
Penguji I/Ketua

Dr. Tuti Andriani, S.Ag, M. Pd
Penguji II/Sekretaris

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
Penguji III

Prof. Dr. Yaswirman, MA.
Penguji IV

Prof. Dr. H. Sudirman. M. MA
Penguji V

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
Penguji VI/Promotor

Dr. Silfia Hanani, M.Si
Penguji VII/Co- Promotor

Tanggal Ujian/Pengesahan : 22 Desember 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau



PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi berjudul "**Kebijakan dan Politik Hukum Nasional Tentang Air Susu Ibu di Indonesia Perspektif Hukum Islam**" yang ditulis oleh:

Nama : **Muklisin**
NIM : 31890515499
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, Desember 2020
Promotor,

Prof. Dr. H. Aliddin Koto, MA
NIP. 195402121981031007

Tanggal, Desember 2020
Co. Promotor,

Dr. Silfia Hanani, M.Si
NIP. 197004021999032006

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dr. Jumni Nelli, M. Ag
NIP. 197206282005012004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang berjudul **"Kebijakan dan Politik Hukum Nasional Tentang Air Susu Ibu di Indonesia Perspektif Hukum Islam"** yang ditulis oleh Sdr. **Muklisin**, NIM 31890515499, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Disertasi Ujian Tertutup pada tanggal 26 Oktober 2020 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Afrizal M, MA

Tanggal:

Sekretaris

Dr. Tuti Andriani. S.Ag., M.Pd

Tanggal:

Penguji Utama

Prof. Dr. Sudirman M. Johan, MA

Tanggal:

Penguji I

Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Tanggal:

Penguji II/Promotor

Prof. Dr. H. Aliddin Koto, MA

Tanggal:

Penguji III/ Co. Promotor

Dr. Silfia Hanani, M.Si

Tanggal:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Disertasi yang berjudul **“AIR SUSU IBU DAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA (Studi tentang dampaknya pada kehidupan keluarga)”** yang ditulis oleh Sdr. Muklisin, NIM 31890515499, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Seminar Hasil Disertasi pada tanggal 24 September 2020 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tertutup pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Ketua

Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D

Tanggal:

Sekretaris

Dr. Hj. Andi Murniati, M. Pd

Tanggal:

Penguji (Penguji Utama)

Dr. Jumni Nelli, M. Ag

Tanggal:

Penguji I (Promotor)

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA

Tanggal:

Penguji II (Co. Promotor)

Dr. Silfia Hanani, M. Si

Tanggal:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Disertasi Saudara
Muklisin

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi
Disertasi saudara:

Nama	: Muklisin
NIM	: 31890515499
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Judul	: Kebijakan dan Politik Hukum Nasional Tentang Air Susu Ibu di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Sidang
Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Desember 2020
Promotor,

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
NIP. 195402121981031007

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau



Dr. Silfia Hanani, M. Si

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BUKITINGGI

NOTA DINAS

Prihal Disertasi Saudara
Muklisin

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi
Disertasi saudara:

Nama : **Muklisin**
NIM : **31890515499**
Program Studi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**
Judul : **Kebijakan dan Politik Hukum Nasional Tentang Air
Susu Ibu di Indonesia Perspektif Hukum Islam**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Sidang
Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Desember 2020
Co. Promotor,

Dr. Silfia Hanani, M. Si
NIP. 197004021999032006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muklisin**
 NIM : 31890515499
 Tempat Tanggal Lahir : Sarko, 24 April 1983
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **"Kebijakan dan Politik Hukum Nasional Tentang Air Susu Ibu di Indonesia Perspektif Hukum Islam"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat pada Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Desember 2020
 Yang menyatakan,



Muklisin
 NIM. 31890515499

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini guna memenuhi persyaratan menyelesaikan

Program Beasiswa Mora Scholarship 5000 Doktor dari Kemenag RI pada Program Studi Hukum Keluarga dengan konsentrasi Hukum Keluarga di Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian Disertasi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada :

1. Kepada orangtua saya Bapak H. Mukidi, S.Pd.I dan Ibu Hj. Sulimah yang senantiasa mempersembahkan doa-doa terbaiknya dan segala pengorbanan serta kesabarannya telah mengantarkan penulis sampai ke jenjang pendidikan tertinggi.
2. Bapak Kementerian Agama Republik Indonesia selaku penyelenggara Beasiswa 5000 Doktor Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Ketua Yayasan Nurul Islam (Yasni) dan Rektor IAI Yasni Bungo, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan studi dengan mengikuti Program 5000 Doktor Kementerian Agama RI tahun 2018.
4. Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M. Ag, Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Prof. Dr. Afrizal M, MA, Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Jumni Nelly, M. Ag, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA dan Dr. Silfia Hanani. M.Si. Selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan secara intensif dengan penuh kesabaran serta tidak bosan-bosannya memberikan dorongan dan motivasi agar penulis cepat menyelesaikan Disertasi ini dalam waktu yang tidak lama.

Segenap Guru Besar dan Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, informasi, pemikiran dan wawasan, baik selama mengikuti perkuliahan maupun selama penulisan disertasi ini.

9. Seluruh Dosen Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendidik, membimbing dan mengajarkan ilmu mereka kepada penulis, semoga hal tersebut menjadi amal ibadah dan ilmu yang bermanfaat.

10. Bapak dan Ibu segenap Pegawai administrasi, Akademik, dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan dalam penulisan disertasi ini.

11. Segenap keluarga saya, khususnya istriku Iffah Pohan. M.Psi, atas kesabaran dan motivasinya buat penulis sehingga Disertasi ini dapat terselesaikannya. Buat kedua anakku Muhammad Ghafarul Affan dan Muhammad Imam Asy-Syahid semoga menjadi anak yang sholeh, berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

12. Keluarga besar Yayasan Anak Kita Bungo, penasehat Yayasan Bapak H. Safrudin Dwi Apriyanto, S.Pd (sekaligus Wakil Bupati Bungo), pembina Yayasan Bapak H. Mukidi, Spdi, Pengawas yayasan Bapak Ngumardi, S.Ag, ketua Yayasan, Sekretaris dan Bendahara Yayasan yang memotivasi dan memberikan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi S3 di Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

13. Rekan-rekan sekelas di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2018 Program 5000 Doktor Kementerian Agama Republik Indonesia yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu kompak, dan saling memotivasi serta senantiasa berbagi pengalaman dengan penulis baik dalam suka maupun duka.

Semoga bantuan semua pihak dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiinnnn...

Akhirnya penulis berharap semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta Civitas Akademika Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau khususnya dan pembaca pada umumnya.

Pekan Baru, Desember 2020
Penulis

Muklisin
NIM. 31890515499

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS PROMOTOR	
NOTA DINAS CO. PROMOTOR	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
PERSETUJUAN UJIAN SEMINAR HASIL	
HALAMAN PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
PENDAHULUAN	
ABSTRAK	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	9
C. Definisi Istilah	9
D. Fokus Penelitian	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Sekilas Tentang Air Susu Ibu (ASI)	
1. Definisi Air Susu Ibu (ASI)	17
2. Pentingnya Air Susu Ibu (ASI)	19
3. Manfaat ASI dan manfaat menyusui bagi ibu	25
4. Masalah-Masalah Ketika Menyusui	33
5. Sekilas tentang Air Susu Ibu (ASI)	44
6. Bank ASI	52
7. Pendapat ulama tentang Bank ASI	58
8. Nawazil Bank ASI	63
a. Konsekuensi hukum	63
b. Terma Kedaruratan	70
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang ASI	80
B. Kebijakan Publik	
1. Definisi Kebijakan Publik	85
2. Teori-teori Kebijakan Publik	87
3. Politik dan Kebijakan Publik	100
C. Politik Hukum di Indonesia	
1. Definisi Politik Hukum	102
2. Kedudukan Politik Hukum	104
3. Hukum sebagai alat	114
4. Makna dan ruang lingkup politik hukum	116

BAB III

BAB IV

- | | |
|---|-----|
| 5. Politik Hukum di Indonesia | 126 |
| 6. Sistem Hukum Nasional | 129 |
| D. Tinjauan Penelitian yang Relevan | 134 |

A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan	145
B.	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	146
C.	Pengolahan Data	149
D.	Teknik Analisa Data	150

A.	Kebijakan Pemerintah Terkait Pemberian Air Susu Ibu (ASI)	
1.	Kebijakan Pemberian ASI Eksklusif Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	153
a.	Dasar Hukum	154
b.	Asas hukum dalam UU No. 36 tahun 2009 yang terkait dengan kebijakan program ASI eksklusif	158
c.	Tujuan pengaturan pemberian ASI eksklusif	162
d.	Ruang lingkup pengaturan program ASI eksklusif Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009	164
e.	Bentuk pengaturan pemberian ASI eksklusif Sebagai atribusi UU No. 36 tahun 2009	172
2.	Sosialisasi pemberian Air Susu Ibu eksklusif oleh Pemerintah	176
3.	Kebijakan Pemerintah Daerah dan DPRD terkait ASI ..	186
4.	Kebijakan Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia	216
a.	Kebijakan ASI di Indonesia	223
b.	Terobosan Peneliti Terkait Kebijakan Air Susu Ibu (ASI) kepada Pemerintah	229
5.	Kesejahteraan Anak menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	231
a.	Dasar hukum	231
b.	Asas hukum dalam UU No 4 tahun 1979	233
c.	Ruang lingkup pengaturan kesejahteraan anak	235
d.	Bentuk Pengaturan Perlindungan anak	235
e.	Unsur kebijakan program ASI eksklusif	236
f.	Unsur kebijakan kesejahteraan anak	238
B.	Dampak Air Susu Ibu (ASI) Pada Kehidupan Keluarga	
a.	Air Susu Ibu (ASI) menurunkan angka kematian bayi	239
b.	ASI eksklusif mewujudkan kesejahteraan anak	255
c.	Meningkatkan Status Kesehatan Ibu dan Bayi	256
d.	Menghemat Pengeluaran Rumah Tangga	272
e.	Menumbuhkan Teladan Cinta kasih dan	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Kemanusiaan	280
C. Kajian Hukum Keluarga Islam terkait pemberian ASI	
a. Hak anak kecil dalam masalah <i>radha'</i>	290
1. Seorang ibu wajib menyusui anaknya	291
2. Hukum menyewa wanita untuk menyusui	297
3. Keadaan yang membuat seorang istri berhak Mendapatkan upah menyusui, permulaan dan lamanya hak tersebut	298
4. Pengutamaan antara ibu kandung dan wanita lain dalam menyusui bayi	303
5. Orang yang berkewajiban membayar upah menyusui dan banyaknya upah yang dibayarkan ..	306
b. Syarat <i>radha'</i> (menyusui) yang menyebabkan haramnya nikah menurut para ulama	309
c. Sesuatu yang menetapkan hukum <i>radha'</i> (menyusui).....	323
1. Pengakuan	323
2. Pembuktian	329

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	331
B. Rekomendasi	335
C. Saran-saran	336

UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 44.bU/1987.

Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	a	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
آ	a		Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	al		Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sa	s	Es
ش	Sya	sy	Es dan Ye
ص	a		ES (dengan titik dibawah)
ض	at		De (dengan titik dibawah)
ظ	a		Te (dengan titik dibawah)



ا			Zet (dengan titik dibawah)
‘Ain	‘		Apostrof Terbalik
Ga	g		Ge
Fa	f		Ef
Qa	q		Qi
Ka	k		Ka
La	l		El
Ma	m		Em
Na	n		En
Wa	w		We
Ha	h		Ha
Hamzah			Apostrof
Ya	y		Ye

Hamzah () yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah () terletak ditengah kalimat atau di akhir, maka di tulis dengan ().

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
	Fat ah	A	a
	Kasrah	I	i
	amah	U	u



Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
أَي	Fat ah dan ya	اِي	A dan I
أَوْ	Fat ah dan wau	أُو	A dan U

كَيْفَا
هَوْلَا

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	Fat ah dan alif atau ya		a dan garis diatas
اِ	Kasrah dan ya		i dan garis diatas
اُ	ammah dan wau		u dan garis diatas

Contoh

مَاتَ m ta

رَمَى ram

قِيلَ q la

يَمُوتُ yam tu

Ta Marb ah

Transliterasi untuk ta Marb ah ada dua, yaitu : ta Marb ah yang hidup atau mendapat harkat Fat ah, kasrah, dan ammah, transliterasinya adalah [t].



Sedangkan *ta Marb ah* yang mati atau yang dapat harkat sukun, transliterasinya adalah

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta Marb ah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang Al- serta bacaan kedua itu terpisah maka *ta Marb ah* itu di transliterasikan dengan ha (). contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauda al-atf l*
 الْمَدِينَةُ الْقَضِيَّةُ : *al-mad na al fad la*
 الْحِكْمَةُ : *al hikma*

Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ('), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *rabban*
 نَجِّنَا : *najjain*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نُعَمِّدُ : *nu'ima*
 عُدُّوْا : *'aduwwa*

Jika huruf () bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (), maka ia ditanslierasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh :

عَلِيٌّ : *'al* (bukan *'aliyyu* atau *'aly*)
 عَرَبِيٌّ : *'Arab* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)



6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam na'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzala* (bukan *az-zalzala*)

الفلسفة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi afostrot (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya :

تَأْمُرُونَ : *ta'mur na*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indoensia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur' n), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila



kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

F zil l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

Al-'ib r t f 'um m al lafz l bi khus s al-sabab

10. Lafz Al-Jal lah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mud filaih* (Frasa Normal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *d null h*

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum f ra matill h*

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada akhir kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), keterangan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :



Wa m muhamma un ill ras l

Inna awwala baitin wudi'allin si lallaz bi bakkata mub rakan

Syahru Ram ana al la unzila fh al-Qur' n

Na r al-D n – s

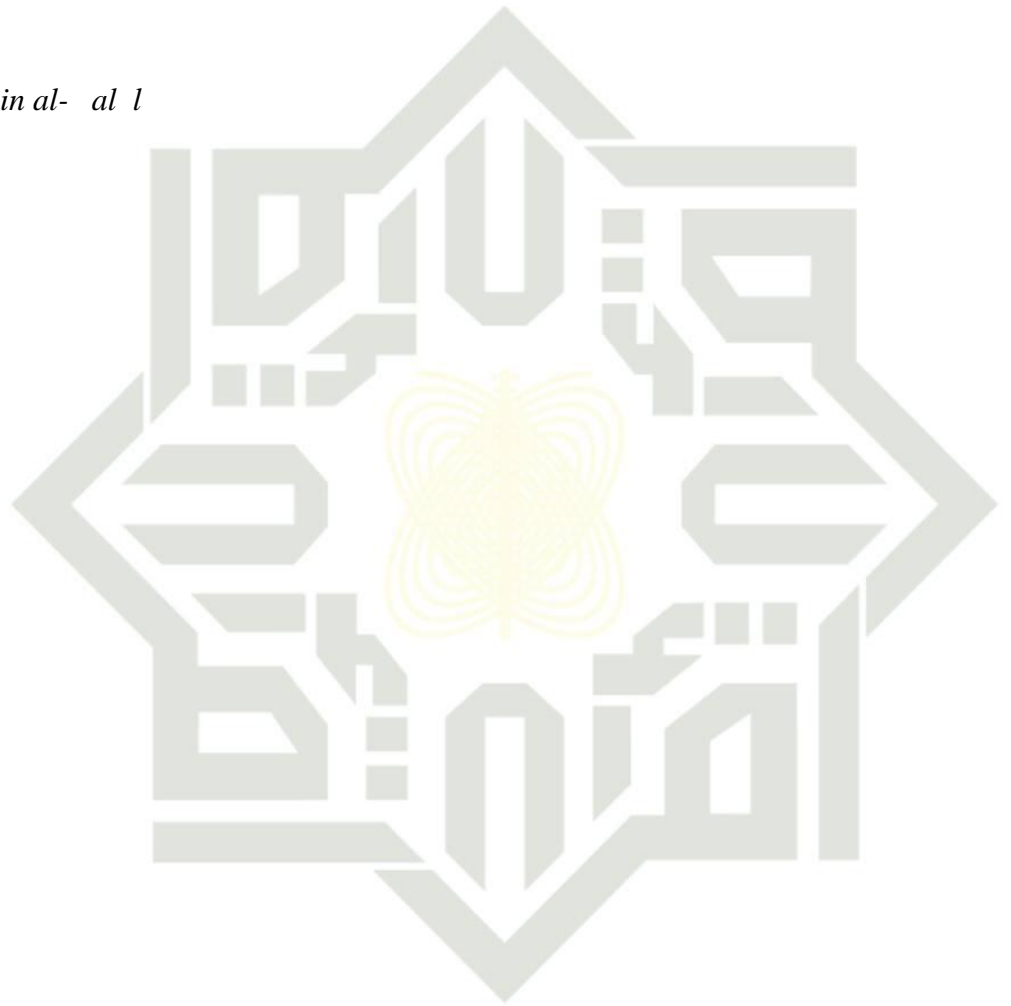
Ab Na r al-Far b

Al-Ghaz l

Al-Munqi min al- al l

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





ABSTRAK

Meksin, 2020 : Kebijakan dan Politik Hukum Nasional Tentang Air Susu Ibu di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi terpenting bahkan merupakan makanan utama bagi bayi dimana tidak akan ada yang dapat menggantikan. Gerakan untuk memberikan ASI eksklusif dinilai masih kurang menggema dan minim dukungan dari banyak pihak. Padahal, pemerintah telah membuat kebijakan yang menjamin hak anak untuk mendapatkan ASI seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : a) Bagaimana kebijakan pemerintah terkait pemberian Air Susu Ibu (ASI), b) Bagaimana dampak Air Susu Ibu (ASI) pada kehidupan keluarga; c) Bagaimana kajian hukum keluarga Islam terkait pemberian Air Susu ibu (ASI) ?.

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang pemenuhan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks, seperti buku-buku dan dokumen lainnya, Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah bersifat *deskriptif – kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1) Kebijakan Pemerintah Terkait Air Susu Ibu (ASI) dan politik hukum di Indonesia, bahwa Pemerintah telah membuat peraturan yang menjamin hak anak untuk mendapatkan ASI seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 128 ayat (1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis, ayat (2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Pemerintah juga membuat kebijakan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI eksklusif. 2) Dampak Air Susu Ibu (ASI) pada kehidupan keluarga yaitu pertama, Air Susu Ibu (ASI) dapat menurunkan angka kematian bayi. Kedua, Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dalam hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan pada anak-anak. Ketiga, dapat meningkatkan status kesehatan pada ibu dan bayi. Keempat, dapat menghemat pengeluaran rumah tangga. Kelima, dapat menumbuhkan teladan cinta kasih dan kemanusiaan pada orangtua dan anaknya. 3) Tinjauan hukum Islam mengenai hak menyusui bagi seorang ibu. Dimana para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena nanti hal itu akan ditanyakan di hadapan Allah SWT, baik wanita tersebut masih menjadi istri ayah dari bayi maupun sudah cerai dan sudah selesai iddahnya. Dalam hal ini bisa dipahami bahwa para ulama telah sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu.

Kata Kunci : Air Susu Ibu (Asi), Politik Hukum

ABSTRACT

Muklisin, 2020 : POLICIES AND POLITICS OF NATIONAL LAW ON BREAST MILK IN INDONESIA FROM ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Breastmilk (ASI) is the most important nutrient and is even the main food for babies where nothing can replace it. The movement to provide exclusive breastfeeding is still less echoed and lacks support from many parties. In fact, the government has made policies that guarantee children's rights to get breast milk as stated in Law Number 36 of 2009 concerning Health, and also Government Regulation (PP) Number 33 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding. This study aims to see: a) What are the government policies related to breast milk (ASI); b) How is the impact of breast milk (ASI) on family life; C) How is the study of family law related to breastfeeding (ASI)?

This type of research is library research (library research), which is research in which the object discovery is carried out with library information, especially text, such as books and other documents, while the approach used is descriptive - qualitative.

Based on the results of the research, it can be ignored: 1) Government policies related to breast milk (ASI) and legal politics in Indonesia, that the Government has made regulations that guarantee children's rights to breastfeed as stipulated in Law Number 36 Year 2009 concerning Health Article 128 Paragraph (1) Every baby has the right to receive exclusive breast milk for 6 (six) months, except for medical indications, paragraph (2) During breastfeeding, the family, government, local government and the community must fully support the mother of the baby. by providing special time and facilities. The government also makes a policy in the form of Government Regulation (PP) Number 33 of 2012 concerning exclusive breastfeeding. 2) The impact of breast milk (ASI) on family life, namely first breast milk (ASI) can reduce infant mortality. Second, exclusive breast milk (ASI) in this case can create welfare in children. Third, it can improve the health status of both mother and baby. Fourth, it can provide household expenses. Fifth, it can foster an example of love and affection for children and their children. 3) Review of Islamic law regarding the right of breastfeeding for a mother. Where the fuqaha agree that breastfeeding a child is obligatory for a mother, because later it will be asked before Allah SWT, whether the woman is still the wife of the father of the baby or is divorced and has finished her iddah. In this case it can be applied that the scholars have agreed that breastfeeding a child is obligatory for a mother.

Keywords: Breast Milk (Asi), Political Law

ber:

University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



ملخصة البحث

Muklisin, 2020 : حليب الأم والسياسة القانونية في إندونيسيا
(دراسة التأثير على الحياة الأسرية)

© Hak cipta #1111 UN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengutip sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حليب الأم (ASI) هو أهم عنصر غذائي وحتى الغذاء الرئيسي للأطفال حيث لا يمكن أن يحل أي شيء محلها. وتعتبر الحركة لتوفير الرضاعة الطبيعية أقل صدق ويفتقر إلى الدعم من العديد من الأطراف. في الواقع ، الحكومة سياسات تضمن حقوق الأطفال في الحصول على حليب الأم كما هو مذكور في القانون رقم 33 لعام 2012 بشأن الرضاعة الطبيعية الحصرية. (دراسة إلى تحديد: أ) كيف سياسة الحكومة فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية (ASI) ؟ (ب) كيف تأثير حليب على الحياة الأسرية؟ (ج) ما هي علاقة دراسة قانون الأسرة الإسلامي بالرضاعة الطبيعية؟ هذا النوع من البحث هو البحث المكتبي (Library research) ، وهو البحث الذي يتم فيه عن طريق استرجاع معلومات المكتبة ، خاصة في نصوص ، مثل الكتب والوثائق الأخرى ، بينما المنهج المستخدم هو وصفي - بناءً على نتائج الدراسة ، يمكن الاستنتاج: 1) السياسات الحكومية المتعلقة بحليب الأم (ASI) والسياسة القانونية في إندونيسيا ، أن الحكومة قد وضعت لوائح تضمن حقوق الأطفال في الرضاعة الطبيعية كما هو منصوص عليه في القانون رقم. الفقرة (1) لكل طفل الحق في الحصول على حليب الثدي الحصري منذ الولادة لمدة 6 أشهر ، باستثناء المؤشرات الطبية ، الفقرة (2) أثناء الرضاعة الطبيعية ، يجب على الأسرة والحكومة والحكومة والمجتمع دعم أم الطفل. بشكل كامل من خلال توفير الوقت والتسهيلات الخاصة. كما تضع الحكومة سياسات شكل اللائحة الحكومية رقم 33 لعام 2012 بشأن الرضاعة الطبيعية الحصرية. 2) تأثير حليب الأم (ASI) الحياة الأسرية ، وبالتحديد حليب الأم (ASI) يمكن أن يقلل من وفيات الرضع. ثانيًا ، يمكن أن يؤدي حليب الحصري (ASI) في هذه الحالة إلى تحقيق الرفاهية للأطفال. ثالثًا ، يمكنه تحسين الحالة الصحية لكل من والطفل. رابعًا ، يمكن أن يوفر نفقات المنزل. خامسًا ، يمكنها أن تعزز نماذج الحب والإنسانية لدى الوالدين وأبنائهم. 3) مراجعة الشريعة الإسلامية بخصوص حق الأم في الرضاعة الطبيعية. حيث اتفق الفقهاء على وجوب إرضاع الطفل على الأم ، لأنه يسأل فيما بعد أمام الله سبحانه وتعالى: هل المرأة مازالت زوجة أب المولود أم مطلقة وأكملت عدتها. وفي هذه الحالة يفهم أن العلماء اتفقوا على وجوب إرضاع الطفل على الأم.

الكلمة الأساسية : حليب الأم (ASI) ، القانون السياسي



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi terbaik dibandingkan unsur makanan lainnya yang merupakan makanan utama bagi bayi. Berbagai penelitian telah mengkaji manfaat pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dalam hal menurunkan mortalitas bayi. ASI mengandung komponen makro dan mikro sehingga membuat bayi mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. *World Health Organisation* (WHO) telah merekomendasikan standar emas pemberian makanan pada bayi yaitu menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur enam bulan, didahului dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) segera setelah lahir, tetapi kenyataannya di Indonesia saat ini belum ada kesadaran para ibu untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi. Hal ini dapat dilihat dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018.¹

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 memperlihatkan bahwa hanya 58,2 % proporsi ibu yang memberikan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), sementara ibu yang tidak memberikan IMD sebesar 41,8 %.² Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak ibu-ibu di Indonesia yang masih belum memberikan IMD. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya IMD masih sangat kurang. Di Indonesia, rata-rata ibu memberikan ASI eksklusif hanya dua bulan. Pada saat yang bersamaan,

¹ Tri Windiarto, Al Huda Yusuf, dkk, *Profil Anak Indonesia 2019*, (Jakarta : Diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2019), hal. 66

² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta pemberian susu formula meningkat tiga kali lipat. Tentu hal ini tidak sejalan dengan Undang Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 B.³

Saat ini, jumlah ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada bayinya sampai berumur enam bulan masih rendah, yaitu kurang dari 2% dari jumlah total ibu melahirkan. Hal tersebut lebih disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain karena pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI juga masih rendah, tata laksana rumah sakit yang salah, dan banyaknya ibu yang mempunyai pekerjaan di luar rumah. Beberapa rumah sakit memberikan susu formula pada bayi yang baru lahir sebelum ibunya mampu memproduksi ASI. Hal itu menyebabkan bayi tidak terbiasa mengisap ASI dari puting susu ibunya dan akhirnya tidak mau lagi mengonsumsi ASI atau sering disebut dengan “bingung puting”.⁴

³ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 1945 pada perubahan amandemen yang kedua, pada Bab XA yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 28 B amandemen UUD 1945 kedua, ayat ke 2 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menurut penulis jika bayi tidak mendapatkan asupan ASI eksklusif yang cukup dan sesuai dengan anjuran dokter maka tidak sejalan dengan aturan UUD 1945 yang telah dibuat pada amandemen kedua pasal 28B. Apalagi menurut hukum islam anjuran untuk menyusui anak bahkan sampai 2 tahun baru disapihnya. Inilah kontradiksi antara hak bayi yang seharusnya mendapatkan layanan ASI, justru dalam kenyataannya belum optimal.

⁴ Nurhetti Yuliarti, *Keajaiban ASI - Makanan Terbaik Untuk Kesehatan, Kecerdasan dan Keimanan si Kecil*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm. 2. Istilah bingung puting dipakai untuk menggambarkan keadaan bayi yang mengalami *nipple confusion* karena diberi susu formula dalam botol bergantian dengan menyusui pada ibu. Mekanisme menyusui dan minum dari botol sangat berlainan. Untuk menyusui bayi memerlukan usaha yang “lebih” dari minum susu dari botol. Pada saat menyusui pada ibu, bayi mempergunakan otot-otot pipi, gusi, palatum durum (langit-langit) dan lidah untuk menarik dan mengurut puting serta areolanya untuk membentuk suatu “dot”, kemudian ditekan oleh gusi atas dan bawah sehingga *sinus laktiferus* tertekan dan keluarlah ASI. Selanjutnya, dengan gerakan yang teratur ASI dihisap dan ditelan. Tidak demikian halnya dengan bayi yang mendapat minuman dari botol, sebab dot mempunyai lubang sehingga tanpa berusaha keras bayi dapat menelan susu karena susu dapat terus keluar tanpa dihisap. Oleh sebab itulah kenapa bayi yang terbiasa dari botol “dot” akan sulit dan enggan menyusui dari ibunya. Ibu yang menggunakan botol dan dot biasanya beralasan bahwa produksi ASI-nya kurang, atau ibu sakit, misalnya payudaranya bengkak, puting susu nyeri atau lecet dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Manfaat pemberian ASI makin dirasakan saat ASI diberikan secara eksklusif kepada bayi. Data Susenas tahun 2018 menunjukkan bahwa ibu di Indonesia cenderung memberikan air putih kepada bayinya selain ASI, yaitu sekitar 29,18 persen. Bayi usia 0-5 bulan yang diberi air lainnya (air tajin, madu, air teh, dan air gula) sekitar 8,30 persen. Data Susenas tahun 2018 menunjukkan bahwa 1 diantara 2 bayi usia 0-5 bulan diberi ASI eksklusif.

Sebaliknya di negara-negara maju seperti di negara Amerika Serikat, di Jepang, di Inggris dan di Filipina, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi, dan membuat kebijakan pelarangan memberikan susu formula dalam rangka mendukung ASI eksklusif. Di negara Amerika Serikat 60-70 % bayi mendapatkan ASI eksklusif.⁵ Begitulah paradoks antara panduan dengan kesadaran. Sementara dari data di atas menunjukkan bahwa masih banyak ibu di Indonesia yang masih belum memberikan inisiasi menyusui dini (IMD). Sementara di Negara-negara maju seperti di negara Amerika Serikat, justru berbanding terbalik dengan negara Indonesia.⁶

Hasil survei Demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan dari tahun ke tahun angka kematian bayi (AKB) mengalami penurunan. Dari 68 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1991, hingga 24 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Namun, perkembangan terbaru dari beberapa daerah di tanah air menunjukkan angka kematian bayi (AKB) naik turun. Di Tangerang AKB justru meningkat setiap tahunnya. Pada tahun

⁵ Nurheti Yuliarti, *Keajaiban ASI- Makanan Terbaik Untuk Kesehatan, Kecerdasan dan Kecantikan Si Kecil*, (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2010), hlm. 2

⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2016 ada 102 kasus, pada tahun 2017 ada 144 kasus, dan pada tahun 2018 terdapat 247 kasus AKB. Demikian pula yang terjadi terhadap angka kematian bayi (AKB) naik juga terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pada tahun 2017, dimana angka kematian bayi (AKB) sebesar 1,61 % naik menjadi 2,08 % per 1000 kelahiran hidup di tahun 2018. ⁷

Dalam upaya menurunkan angka kematian tersebut, berbagai upaya dilakukan, seperti imunisasi, pemberian ASI segera dan eksklusif. Upaya pencegahan terhadap penyakit infeksi dapat dilakukan apabila kondisi gizi dalam keadaan baik. Salah satu upaya agar gizi bayi tetap prima adalah dengan mendapat ASI sedini mungkin dan eksklusif. Air Susu Ibu (ASI) memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. Bahkan jiwa anak akan terselamatkan dengan memberikan asupan ASI dari ibunya.

Faktor yang mempengaruhi seorang ibu akan memberikan ASI eksklusif, seperti perilaku menyusui yang kurang dapat dukungan, pemberian makanan dan minuman sebelum ASI keluar, ibu kurang percaya diri kalau ASI-nya cukup untuk bayi, ibu kembali bekerja, dan yang paling dominan gengarnya promosi susu formula. Saat ini banyak sekali merek produk susu formula yang sangat gencar dalam mempromosikan produknya, baik media cetak dan media elektronik dengan memberikan hadiah yang menarik, sehingga para ibu banyak yang memilih produk susu formula dibandingkan dengan memberikan susu eksklusif kepada bayinya.

⁷ Beritagar, *Rapor Merah Angka Kematian Bayi di Indonesia*. Diakses dari www.beritagar.id pada hari Minggu, 14 April 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain itu, sikap petugas kesehatan yang juga kurang mendukung, lemahnya perencanaan terpadu Peraturan Pemerintah Air Susu Ibu (PP ASI), dan sering terjadinya pergantian personil yang berdampak terhadap program PP ASI. Lagipula, lemahnya sanksi pelaksanaan Rumah Sakit Sayang Bayi (RSSB) berdampak hanya 25 % yang masih RSSB, kurangnya integrasi dalam kurikulum tenaga kesehatan lintas sektor menyebabkan kendala dalam program PP ASI.⁸ Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang ASI eksklusif dinilai masih belum efektif sebagaimana diharapkan. Sejak diberlakukannya PP ini belum secara merata dipahami semua pihak.

Peraturan Pemerintah (PP) ini juga masih memiliki celah serta kelemahan, termasuk diantaranya celah dalam hal pemasaran produk pengganti ASI.

Gerakan untuk memberikan ASI secara eksklusif dinilai masih kurang menggetakan dan minim dukungan dari banyak pihak. Padahal, pemerintah telah membuat peraturan yang menjamin hak anak untuk mendapatkan ASI seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif. Menurut data Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 memperlihatkan bahwa hanya 58,2 % proporsi ibu yang memberikan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), sementara ibu yang tidak memberikan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sebesar 41,8. Padahal pemberian ASI tentu akan berdampak signifikan terhadap kualitas bangsa.⁹

⁸ Departemen Kesehatan RI, *Strategi nasional PP-ASI* (edisi 2007). Diunduh dari : <http://www.Gizi.net/kebijakan-gizi/download/star-nas%ofinal.com>

⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal ini memperlihatkan kegagalan pemerintah menjamin kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945 khususnya Pasal 28 B Ayat 2 yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Disamping itu juga ada, UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan tentang hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik masih jauh dari realisasinya.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Politik hukum muncul berupa kebijakan pemerintah terkait masalah pemberian ASI eksklusif. Dengan diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dimana sasaran politik hukum yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2019, pemerintah menetapkan target penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 24 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Dengan cara memberikan pertolongan kelahiran, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, imunisasi dan lainnya.

Memberi makan bayi dengan susu formula dalam keadaan darurat adalah upaya terakhir, ketika ada pilihan lain yang aman, seperti membantu ibu menyusui untuk mereka yang belum memberikan ASI, menemukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seorang Ibu donor ASI atau ASI *pasteurisasi* dari bank ASI sudah sepenuhnya dieksplorasi. *United Nations Emergency Children's Fund* (UNICEF) dan *World Health Organization* (WHO) mendesak semua untuk terlibat dalam pendanaan, perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan hak bayi, apalagi dalam kondisi darurat.

Di dalam ajaran Islam ada kewajiban menyusui bayi agar anaknya berkualitas. Dengan demikian, panduan Allah Swt tentang kewajiban memberikan ASI mendapatkan validasinya. Apalagi, ASI tidak hanya memenuhi asupan materi atau fisik semata. Lebih dari itu, melalui pemberian ASI terbina pula kontak bathin (psikis) antara si bayi dengan ibunya.

Mari kita dalam firman Allah Swt berikut ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2] : 233)¹⁰

Ayat di atas mengingatkan kita untuk memperhatikan hak bayi terhadap air susu ibu-nya. Sang ibu tidak boleh menghindar dari kewajibannya memberikan ASI. Orang tua hanya lepas dari tuntutan jika bayinya telah mendapatkan haknya, baik dari ibu kandungnya, atau ibu susuannya. Jadi jelas di dalam ajaran Islam bahwa seorang ibu ada kewajiban untuk menyusui anaknya agar melahirkan anak-anak yang berkualitas baik secara fisik dan juga secara mental. Oleh karenanya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif. Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah tersebut itulah yang dimaksud dengan politik hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ingin mengkaji kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak anak terhadap ASI eksklusif apakah sudah memenuhi standar yang diinginkan. Sementara dalam agama Islam atau ajaran Al-Qur'an ada kewajiban memberikan ASI eksklusif kepada bayinya sehingga menciptakan generasi Islam yang berkualitas. Untuk lebih memperdalam permasalahan tersebut maka peneliti akan menuangkannya ke dalam sebuah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan judul ***“Kebijakan dan politik hukum nasional tentang air susu ibu di Indonesia perspektif hukum Islam”***.

¹⁰ Al-Kalam, versi 1.0, (Bandung: Dipenogoro, 2009).

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian Disertasi ini yaitu :

- a. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait pemberian Air Susu Ibu (ASI) ?.
- b. Bagaimana dampak Air Susu Ibu (ASI) pada kehidupan keluarga?
- c. Bagaimana kajian hukum keluarga Islam terkait pemberian Air Susu ibu (ASI) ?.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan, agar lebih terarahnya penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah terkait pemberian Air Susu Ibu (ASI).
2. Studi tentang dampak ASI pada kehidupan keluarga.
3. Kajian hukum keluarga islam terhadap pemberian Air Susu Ibu (ASI).

C. Definisi Istilah

Untuk lebih jelasnya pada pembahasan Disertasi ini dan memudahkan pemahaman, perlu dijelaskan beberapa istilah. Hal ini digunakan agar menghindari kesalahpahaman tentang apa yang ada dalam judul ini serta menghilangkan kesalahpahaman dalam mengartikan judul ini. Berikut beberapa kata atau istilah yang mempunyai arti penting dalam penulisan Disertasi ini yaitu, Air Susu Ibu (ASI), politik hukum, dan kehidupan keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Air Susu Ibu (ASI) : Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan pertama yang paling baik bagi awal kehidupan seorang bayi. ASI mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan dengan jumlah kandungan yang tepat dan menyediakan antibodi atau zat kekebalan untuk membantu melawan infeksi.¹¹

Air Susu Ibu adalah hak milik bayi, telah terbukti dan diakui sebagai makanan tunggal paling ideal untuk pencernaan dan pertumbuhan bayi, sampai 4-6 bulan pertama. Hanya dengan ASI saja telah mencukupi kebutuhan bayi sejak lahir sampai bayi umur 4-6 bulan. Setelah umur 4-6 bulan bayi membutuhkan makanan tambahan seperti buah-buahan dan bubur, sedang ASI terus diberikan sampai dengan umur 2 tahun.¹²

Air susu ibu (ASI) merupakan sumber makanan utama yang sangat banyak sekali keunggulannya dibandingkan susu formula. Proses pemberian ASI bukan hanya berguna bagi bayi melainkan juga berguna bagi sang ibu. Dimana anak akan mendapatkan imun (kekebalan tubuh) dari sang ibu secara langsung dan ibu juga akan menjadi sehat karena bisa memberikan asupan gizi dan zat imun (kekebalan) kepada anak bayinya. Dalam hal ini jelas bahwa ASI memiliki keunggulan yang jauh dibandingkan dengan susu formula yang dijual di pasaran.

Kebijakan Publik : adalah sebuah fakta strategis dari pada fakta politis ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah

¹¹ Sara Lewis, *Makanan Pertamaku Panduan Para Ibu Untuk Menyapih Dan Mengenalkan Makanan Padat*, (Jakarta : Erlangga, 2000), hlm. 10

¹² BKKBN Provinsi Jambi, *Air Susu Ibu dan Kehamilan*, (Jambi ; BKKBN Provinsi Jambi, 1992), hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain.

Politik Hukum : adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹³

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.¹⁴ Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.¹⁵ Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu persyaratan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.¹⁶

¹³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), hlm. 1

¹⁴ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet. II, Hlm. 160

¹⁵ Padmo Wahjono, "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan", dalam majalah *Forum Keadilan*, No. 29, April 1991, hlm. 65

¹⁶ Teuku Mohammad Radhie, "Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional", dalam majalah *Prisma* No. 6 Tahun II, Desember 1973, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga : adalah secara *etimologi* (bahasa) dapat dilihat pengertiannya dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan dari Balai Pustaka. Keluarga berarti ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah, atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungan atau juga bisa diartikan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.¹⁷

Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan dalam manhaj amal islami khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu pencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan ummat, dan perisai penyelamat bagi negara.

Masyarakat di dalam setiap negara merupakan kumpulan keluarga. Maka keselamatan dan kemurnian keluarga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan bangunan daulah atau negara.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada Disertasi ini adalah hanya membahas dan meneliti *Kebijakan dan politik hukum nasional tentang air susu ibu di Indonesia perspektif hukum Islam*. Penelitian tentang Air Susu Ibu (ASI) dan politik hukum di Indonesia ini memiliki tujuan untuk mengetahui Kebijakan pemerintah terkait Air Susu Ibu (ASI) dan dampaknya pada kehidupan

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), hlm. 536

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga. Fokus penelitian ini adalah pada pembuat kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan kebaikan, keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Namun agar lebih efektif dalam pembahasan dan analisisnya, peneliti hanya membahas masalah kebijakan pemerintah terkait pemberian ASI dan dampaknya bagi kehidupan keluarga saja.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut di atas maka peneliti menyampaikan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pada masalah :

1. Kebijakan pemerintah terkait pemberian Air Susu Ibu (ASI).
2. Dampak Air Susu Ibu (ASI) pada kehidupan keluarga.
3. Kajian hukum keluarga Islam terkait pemberian Air Susu ibu (ASI) eksklusif ?.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat memberikan konstibusi bagi pemerintah tentang masalah kebijakan Air Susu Ibu (ASI) di tengah-tengah masyarakat dan dampaknya pada kehidupan keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi kepada ummat Islam agar selalu memberikan ASI kepada bayinya sampai umur 2 tahun.
- 3) Hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi kepada Kementrian Kesehatan untuk mengeluarkan aturan mengenai pemberian ASI kepada anaknya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Membantu pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pemberian ASI dan dampaknya dalam kehidupan keluarga.
- 2) Bagi akademisi, sebagai penambah wawasan keilmuan dan kepustakaan di bidang hukum keluarga, khususnya tentang kebijakan pemerintah terkait Air Susu Ibu (ASI) dan dampaknya bagi kehidupan keluarga.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini tersusun secara sistematis, penulisannya dikelompokkan ke dalam beberapa sub pembahasan yang terdiri dari lima bab.

Pada Bab I, **Pendahuluan**, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi istilah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab ke II merupakan bab **Landasan Teoritis**, yang berisi definisi air susu ibu (ASI), pentingnya ASI, manfaat ASI bagi ibu, sekilas tentang ASI, masalah-masalah ketika ibu menyusui, bank ASI, pendapat ulama tentang Bank ASI, Nawazil Bank Asi dan Fatwa MUI tentang ASI. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bab II, ini juga akan diuraikan tentang definisi kebijakan publik, teori-teori kebijakan publik, politik hukum di Indonesia mulai definisi, kedudukan politik hukum, hukum sebagai alat, makna dan ruang lingkup politik hukum, sistem hukum nasional dan penjelasan tentang definisi keluarga, tujuan keluarga, pentingnya pendidikan dalam keluarga dan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Bab ke III, merupakan bab **Metode Penelitian**, membahas tentang jenis penelitian dan pendekatan, sumber data dan teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan teknik analisa data. Pada bab ini menjadi acuan perbandingan untuk membahas persoalan utama Disertasi yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

Bab ke IV, merupakan bab inti dari Disertasi yang berisi **Hasil Pembahasan**, tentang apa saja kebijakan pemerintah terkait pemberian Air Susu Ibu (ASI) menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kebijakan pemerintah daerah dan DPRD terkait ASI, kebijakan air susu ibu (ASI) di Indonesia, kesejahteraan anak menurut UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, sosialisasi pemberian ASI eksklusif oleh pemerintah. Selain itu juga akan dibahas tentang bagaimana ASI bisa menurunkan angka kematian pada bayi, hak bayi untuk mendapatkan ASI, kebijakan pemberian ASI eksklusif menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, apa peran ASI pada kehidupan keluarga dan dampak kebijakan Air Susu Ibu (ASI) pada kehidupan keluarga. Dibahas juga bagaimana kajian hukum keluarga Islam terkait dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian Air Susu Ibu (ASI) seperti hak anak dalam masalah menyusui, syarat menyusui yang menyebabkan haramnya nikah menurut ulama.

Bab ke V, berisi bab **Penutup**, yang merupakan akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting sehubungan dengan penelitian tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah terkait ASI dan dampaknya dalam kehidupan keluarga.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORETIS

A. Sekilas Tentang Air Susu Ibu (ASI)

1. Definisi Air Susu Ibu (ASI)

Defenisi Air Susu Ibu (ASI) secara *etimologi* atau secara bahasa terdiri dari tiga kata. Dalam hal ini defenisi ketiga kata tersebut dapat dilihat dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka menjelaskan bahwa :

Air artinya cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang terdapat dan diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen.¹⁸

Susu artinya organ tubuh yang terletak di bagian dada, atau organ tubuh yang terletak di dada wanita yang dapat menghasilkan makanan untuk bayi, berupa cairan.¹⁹ Sedangkan Ibu artinya wanita yang telah melahirkan seseorang atau anak.²⁰

Jadi Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan pertama yang paling baik bagi awal kehidupan seorang bayi. ASI mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan dengan jumlah kandungan yang tepat dan

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), hlm. 15

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 1111.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 416.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyediakan antibodi atau zat kekebalan untuk membantu melawan infeksi.²¹

Air Susu Ibu adalah hak milik bayi, telah terbukti dan diakui sebagai makanan tunggal paling ideal untuk pencernaan dan pertumbuhan bayi, sampai 4-6 bulan pertama. Hanya dengan ASI saja telah mencukupi kebutuhan bayi sejak lahir sampai bayi umur 4-6 bulan. Setelah umur 4-6 bulan bayi membutuhkan makanan tambahan seperti buah-buahan dan bubur, sedang ASI terus diberikan sampai dengan umur 2 tahun.

Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan hasil sekresi kalenjer payudara ibu. Sedangkan Air Susu Ibu Eksklusif adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan, tanpa menambahkan dan mengganti dengan makanan atau minuman lain. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif kehidupan bayi dan memberi dampak yang baik bagi kesehatan ibu.

ASI juga mengandung hormon dan berbagai faktor pemacu pertumbuhan anak. Kadar asam lemak yang tinggi di dalam Air Susu Ibu (ASI) juga melindungi bayi dari kemungkinan alergi (terutama yang memiliki riwayat kurang toleran terhadap makanan atau alergi, seperti asma atau eksema).

Kadar zat besi di dalam Air Susu Ibu (ASI) rendah, tapi zat besi mudah diserap dan akan bergabung dengan cadangan zat besi di dalam

²¹ Sara Lewis, *Makanan Pertamaku Panduan Para Ibu Untuk Menyapih Dan Mengenalkan Makanan Padat*, (Jakarta : Erlangga, 2000), hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tubuh bayi sendiri. Komposisi ASI ibu akan berubah jika bayi lahir prematur. Air Susu Ibu (ASI) juga beradaptasi dengan pertumbuhan bayi dan perubahan kebutuhannya. ASI dapat menjadi lebih encer di cuaca yang panas untuk memuaskan rasa haus pada bayi. ASI juga bersifat steril, gratis, dan selalu siap pada suhu yang tepat untuk disajikan sesuai dengan kebutuhan.

Di awal bulan, satu-satunya makanan yang dibutuhkan bayi untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya adalah ASI. Semua bayi dilahirkan dengan cadangan zat besi alami yang akan habis dalam 6 bulan pertama dan ini bisa dipenuhi kembali dengan pemberian susu atau ASI. Bagi seorang ibu tidak semua bisa memberikan ASI-nya atau menyusui dengan baik. Butuh belajar dan keahlian khusus dalam hal memberikan ASI-nya kepada bayinya.

2. Pentingnya Air Susu Ibu (ASI)

Tidak diragukan lagi mengenai keunggulan ASI yang merupakan makanan terbaik bagi bayi. Hampir semua kalangan, termasuk dunia kedokteran ikut menganjurkan supaya ibu lebih memilih ASI sebagai makanan utama bayi dibandingkan dengan susu formula. Susu formula yang diproduksi melalui pabrik yang bahan bakunya berasal dari susu hewan sapi atau sejenisnya kurang bagus untuk pertumbuhan bayi diawal-awal kelahirannya. Sungguh disayangkan saat ini masih banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibu-ibu yang enggan menyusui bayinya, hanya karena alasan sibuk bekerja, untuk menjaga penampilan dan alasan lainnya.

Jikalau dibandingkan dengan susu formula maka ASI banyak memiliki keunggulan yang sangat banyak diantaranya yaitu :

1. Diproduksi sesuai dengan kebutuhan.
2. Lebih mudah dicerna.
3. Sangat aman untuk bayi.
4. Baik untuk sistem pencernaan bayi.
5. Mendukung pertumbuhan otak.
6. Tidak menyebabkan obesitas (kegemukan).
7. Mencegah alergi.
8. Mencegah infeksi.
9. Mengoptimalkan perkembangan mulut bayi.²²

Air susu ibu (ASI) merupakan sumber makanan utama yang sangat banyak sekali keunggulannya dibandingkan susu formula. Proses pemberian ASI bukan hanya berguna bagi bayi melainkan juga berguna bagi sang ibu. Dimana anak akan mendapatkan imun (kekebalan tubuh) dari sang ibu secara langsung dan ibu juga akan menjadi sehat karena bisa memberikan asupan gizi dan zat imun kepada anak bayinya. Dalam hal ini jelas bahwa ASI memiliki keunggulan yang jauh dibandingkan dengan susu formula yang dijual di pasaran.

²² Avie Andriyani, *Panduan Kesehatan Wanita (haid,hamil,melahirkan,nifas,dan menyusui)*, (Yogyakarta: As-Salam Publishing Group, 2013), Hlm. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di bawah ini akan diuraikan apa saja keunggulan ASI baik bagi bayi dan juga bagi ibunya. Apa saja keunggulan ASI?.

1. Diproduksi sesuai dengan kebutuhan.

Sesuai dengan kebutuhan bayi manusia, ASI mengandung sedikitnya 100 bahan yang tidak ditemukan dalam susu sapi dan tidak bisa ditiru dengan tepat oleh susu formula. ASI disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bayi. Bahan baku ASI dipilih dari aliran darah ibu pada saat dibutuhkan dan komposisinya berubah-ubah dari hari ke hari, dari satu saat menyusui ke saat menyusui yang lain sejalan dengan pertumbuhan dan perubahan bayi. Gizi pada ASI disesuaikan dengan kebutuhan bayi dan kemampuan untuk memprosesnya. Itulah keunggulan ASI dimana bisa memproduksi sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan asupan makan bayi. Secara otomatis ASI akan memproduksi sendiri oleh ibunya.

2. Lebih mudah dicerna.

Jumlah protein dalam ASI lebih rendah (1,5%) dari pada susu Sapi (3,5%) sehingga ASI akan lebih mudah dicerna. Protein dalam ASI sebagian besar adalah *laktalbumin*, yang lebih bergizi dari pada komponen terbesar dari susu sapi, yaitu *kaseinogen*. Lemak dari ASI maupun susu sapi jumlahnya hampir sama, tetapi lemak dari ASI lebih mudah dipecah dan digunakan oleh bayi. Disamping itu, bayi juga lebih mudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerap gizi mikro yang penting dari ASI daripada susu Sapi (mengingat bahwa gizi dalam susu sapi dirancang untuk diserap oleh anak sapi).

3. Sangat aman untuk bayi.

ASI yang diproduksi oleh payudara dapat dipastikan tidak akan tercemari, rusak, atau dibuat dengan salah. Karena hal tersebut sudah dirancang dengan sedemikian rupa, dan sempurna. Berbeda dengan susu formula buatan pabrik yang memiliki resiko terkontaminasi, baik pada saat pemrosesan maupun dalam pengemasannya. Komposisi susu formula yang sudah diperhitungkan dengan sangat cermat sekalipun masih memiliki kemungkinan salah, mengingat buatan manusia tidak ada yang sempurna. Berbeda dengan ASI yang diproduksi oleh ibu yang tercipta untuk bayinya.

4. Baik Untuk Sistem Pencernaan Bayi.

Bayi-bayi yang disusui sendiri oleh ibunya hampir tidak pernah mengalami sulit buang air besar, karena ASI lebih mudah dicerna. Biasanya bayi yang mendapat ASI juga jarang terkena diare (mencret). ASI dapat menghancurkan organisme penyebab diare sekaligus mendukung pertumbuhan flora yang bermanfaat di dalam saluran pencernaan, sehingga dapat mencegah gangguan saluran pencernaan. Tinja bayi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan ASI juga tidak berbau menyengat (paling tidak sampai bayi mendapatkan makanan padat). Di samping itu, tinja bayi yang mendapat ASI juga lebih jarang menyebabkan ruam popok (iritasi kulit akibat pemakaian popok).

5. Mendukung Pertumbuhan Otak.

ASI mengandung banyak sekali gizi atau vitamin. ASI juga mengandung DHA (asam lemak pembangun otak) yang berperan dalam meningkatkan kecerdasan otak anak (IQ), paling tidak sampai anak usia 15 tahun. Disamping itu, kedekatan interaksi ibu dan anak pada saat proses menyusui juga mendukung perkembangan intelektual pada anak.

Sistem pertumbuhan otak pada anak akan berjalan dengan baik karena asupan ASI eksklusif. Anak juga akan menjadi tumbuh kembang secara baik dan normal, sehat, dan rentan dengan penyakit dari luar. Dengan asupan ASI yang cukup anak akan tumbuh kembang menjadi pribadi yang sempurna.

6. Tidak menyebabkan obesitas (kegemukan).

Makanan ASI bukan saja tidak menyebabkan obesitas (kegemukan), tetapi bayi yang mendapat ASI tampaknya berkaitan dengan angka obesitas (kegemukan) yang lebih rendah di kehidupan di masa mendatang (setelah dewasa). Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini diduga berkaitan dengan kadar kolesterol yang lebih rendah ketika dewasa kelak.

7. Mencegah alergi.

Hampir tidak ada bayi yang alergi pada ASI. Jarang ada bayi alergi ketika meminum ASI. Meskipun beberapa bayi bisa saja menunjukkan reaksi alergi terhadap makanan tertentu yang dikonsumsi oleh ibunya. Lain halnya dengan susu sapi yang mengandung beta *lakto-globulin* justru dapat memicu respon alergi dengan gejala yang ringan sampai berat. Sementara itu, susu kedelai yang sering dijadikan pengganti ketika bayi alergi terhadap susu sapi ternyata komposisinya makin jauh dari yang dibutuhkan bayi dan juga bisa menyebabkan reaksi alergi. Riset juga menunjukkan bayi yang mendapat ASI lebih jarang mengalami asma di banding yang diberi susu formula.

Inilah kelebihan ASI alami yang langsung diberikan oleh ibu kepada anak bayinya. Banyak sekali penyakit yang bisa ditangkal dari ASI sang ibu. Bahkan penyakit asma jarang dijumpai pada anak bayi yang mendapatkan asupan ASI eksklusif dari sang ibunya.

8. Mencegah infeksi.

Bayi yang mendapatkan ASI ternyata juga kurang beresiko mengalami berbagai infeksi, seperti infeksi saluran nafas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian bawah, infeksi saluran kemih, infeksi telinga, dan sepsisemia (infeksi darah) di tahun pertama kehidupannya. Sebagian perlindungannya ini karena proses pemindahan faktor-faktor imun (kekebalan tubuh) di dalam kandungan ASI dan bahan pra-susu atau *kolostrum*.

9. Mengoptimalkan perkembangan mulut bayi.

Karena menyusu dari payudara ibu membutuhkan lebih banyak usaha bayi daripada menghisap botol, maka hal tersebut akan mengoptimalkan perkembangan rahang, gigi, dan langit-langit. Riset terbaru menunjukkan bahwa bayi yang menyusu payudara ibunya akan mengalami resiko lebih kecil (kurang) mengalami lubang di gigi di masa kanak-kanak dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan susu formula dari pabrik. Jadi banyak sekali keunggulan dari ASI dibandingkan dengan susu formula yang banyak beredar di pasaran.

3. Manfaat ASI dan Manfaat Menyusui Bagi Ibu.

ASI ternyata mempunyai manfaat yang sangat banyak. Bukan saja untuk bayi akan tetapi juga untuk ibunya. Hasil riset baik dalam bidang kesehatan dan juga riset ilmiah sudah banyak membuktikan bahwa ASI adalah makanan pertama bayi yang sangat baik dan menyehatkan. Selain itu juga sebagai imun tubuh bagi si bayinya. Manfaat ASI terbagi menjadi 2 bagian yaitu bagi bayi dan bagi ibunya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi Bayi

- a. Pemberian ASI merupakan metode pemberian makan bayi yang terbaik, terutama pada bayi umur kurang dari 6 bulan, selain juga bermanfaat bagi ibu. ASI mengandung semua zat gizi dan cairan yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh gizi bayi pada 6 bulan pertama kehidupannya.
- b. Pada umur 6 sampai 12 bulan, ASI masih merupakan makanan utama bayi, karena mengandung lebih dari 60% kebutuhan bayi. Guna memenuhi semua kebutuhan bayi, perlu ditambah dengan makanan pendamping ASI (MP-ASI).
- c. Bayi setelah berumur 1 tahun, meskipun ASI hanya bisa memenuhi 30% dari kebutuhan bayi, akan tetapi pemberian ASI tetap dianjurkan karena masih memberikan manfaat bagi bayi.
- d. ASI disesuaikan secara unik bagi bayi manusia, seperti halnya susu sapi adalah yang terbaik untuk anak sapi.
- e. Komposisi ASI ideal untuk bayi.
- f. Dokter sepakat bahwa ASI mengurangi resiko infeksi lambung-usus, sembelit, dan alergi.
- g. Bayi ASI memiliki kekebalan lebih tinggi terhadap berbagai penyakit. Contohnya, ketika si ibu tertular penyakit (misalnya melalui makanan seperti *gastroentretis* atau polio), antibodi sang ibu terhadap penyakit tersebut diteruskan kepada bayi melalui pemberian ASI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Bayi ASI lebih bisa menghadapi efek kuning (*jaundice*). Level bilirubin dalam darah bayi banyak berkurang seiring dengan diberikannya kolostrum dan mengatasi kekuningan, asalkan bayi tersebut disusui sesering mungkin dan tanpa mengganti ASI.
- i. ASI selalu siap sedia setiap saat bayi menginginkannya, selalu dalam keadaan steril dan suhu susu yang pas.
- j. Dengan adanya kontak mata dan badan, pemberian ASI juga memberikan kedekatan antara ibu dan anak. Bayi merasa aman, nyaman dan terlindungi, dan ini mempengaruhi keamanan emosi si anak dimasa depan.
- k. Apabila bayi sakit, ASI adalah makanan yang terbaik untuk diberikan karena sangat mudah dicerna. Bayi akan lebih cepat sembuh.
- l. Bayi premature lebih cepat tumbuh apabila mereka diberikan ASI perah. Komposisi ASI akan teradaptasi sesuai dengan kebutuhan bayi, dan ASI bermanfaat untuk menaikkan berat badan dan menumbuhkan sel otak pada bayi premature.
- m. Beberapa penyakit lebih jarang muncul pada bayi ASI, diantaranya : Kolik, SIDS (kematian mendadak pada bayi), Eksim, Chron's, Disease, dan Ulcerative Colitis.
- n. IQ pada bayi ASI lebih tinggi 7-9 point dari pada IQ bayi non-ASI. Menurut penelitian pada tahun 1997, kepandaian anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang minum ASI pada usia 9,5 tahun mencapai 12,9 point lebih tinggi dari pada anak-anak yang minum susu formula.

- o. Menyusui bukanlah sekedar memberi makan, tapi juga mendidik anak. Sambil menyusui, eluslah si bayi dan dekaplah dengan hangat. Tindakan ini sudah dapat menimbulkan rasa aman pada bayi, sehingga kelak ia akan memiliki tingkat emosi dan spiritual yang tinggi. Ini menjadi dasar bagi pertumbuhan manusia menuju sumber daya manusia yang baik dan lebih mudah untuk menyayangi orang lain.²³

2. Bagi Ibu

- a. Hisapan bayi membantu Rahim menciut, mempercepat kondisi ibu untuk kembali kemas pra-kehamilan dan mengurangi resiko pendarahan.
- b. Lemak disekitar panggul dan paha yang ditimbun pada masa kehamilan pindah ke dalam ASI, sehingga ibu lebih cepat langsing kembali.
- c. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang menyusui memiliki resiko lebih rendah terhadap kanker Rahim dan kanker payudara.
- d. ASI lebih hemat waktu karena tidak usah menyiapkan dan mensterilkan botol susu, dot, dan sebagainya.

²³ Mediakom, *Manfaat Air Susu ibu (ASI)*, (Jakarta : Mediakom, 2010), hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. ASI lebih praktis karena ibu bisa jalan-jalan keluar rumah tanpa harus membawa banyak perlengkapan seperti botol, kaleng susu formula, air panas, dan sebagainya.
- f. ASI lebih murah, karena tidak usah selalu membeli susu kaleng dan perlengkapannya.
- g. ASI selalu bebas kuman, sementara campuran susu formula belum tentu steril.
- h. Penelitian medis juga menunjukkan bahwa wanita yang menyusui bayinya mendapatkan manfaat fisik dan manfaat emosional.
- i. ASI tak bakal basi. ASI selalu diproduksi oleh pabriknya di wilayah payudara. Bila gudang ASI telah kosong. ASI yang tidak dikeluarkan akan diserap kembali oleh tubuh ibu. Jadi, ASI dalam payudara tak pernah basi dan ibu tak perlu memerah dan membuang ASI-nya sebelum menyusui.²⁴

Dalam sumber yang berbeda manfaat menyusui bagi ibu juga dapat dilihat dari berbagai segi, seperti secara ekonomis, segi kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi apa manfaat menyusui bagi ibu ?.

1. Kemudahan.

Menyusui tidak memerlukan perencanaan atau pengemasan terlebih dahulu, selalu tersedia dan selalu ada pada suhu yang tepat. Jika ibu terpaksa meninggalkan bayi untuk sementara

²⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu, misalnya untuk bekerja, maka ASI bisa diperas terlebih dahulu dan disimpan di lemari pendingin untuk diberikan pada bayi ketika diperlukan (dianjurkan untuk diberikan menggunakan sendok dari pada lewat botol).

2. Ekonomis.

Ibu dapat menghemat banyak biaya karena tidak perlu membeli botol susu, dot, dan susu formula yang harganya bisa sangat mahal. Apalagi bayi yang mendapat ASI insyaAllah akan lebih jarang sakit sehingga hal ini tentunya akan menekan pengeluaran keluarga untuk biaya pengobatan.

3. Mempercepat pemulihan.

Menyusui akan membantu mempercepat pengerutan Rahim kembali ke ukuran semula (sebelum hamil) dan mengurangi pengeluaran *lochia* (cairan yang keluar lewat vagina setelah melahirkan), yang berarti semakin sedikit darah yang keluar dari tubuh ibu. Menyusui juga akan memulihkan kondisi tubuh ibu karena dengan menyusui akan memperbanyak periode istirahat bagi ibu baru, yang terutama sangat penting selama enam pekan pertama setelah melahirkan.

4. Mempercepat kembali ke bentuk tubuh sebelum hamil.

Menyusui bagi ibu juga bisa membantu membakar lemak yang terkumpul selama hamil.

5. Membangun tulang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyusui bisa membantu memperbaiki mineralisasi tulang sesudah ibu menyapih dan juga dapat mengurangi resiko patah tulang panggul sesudah ibu *menopause* (berhenti dari haid).

6. Mengurangi rasa kanker.

Ibu yang menyusui mempunyai kemungkinan yang lebih kecil terhadap kemungkinan menderita kanker payudara dan kanker Rahim.

7. Meningkatkan kontak emosional dengan bayi.

Seorang ibu ketika menyusui akan mengalami kontak kulit dan kontak mata dengan bayinya paling tidak enam sampai delapan kali sehari. Kepuasan emosional, keintiman, dan saling berbagi cinta, serta kenikmatan bukan saja sangat memuaskan dan membentuk hubungan ibu-anak yang kuat, tetapi juga dapat meningkatkan perkembangan otak anak.

Selain manfaat yang didapatkan dari menyusui bagi anak dan ibunya.

Masih banyak juga keuntungan dari menyusui bagi ibu dan bagi bayinya. Diantara keuntungan dari menyusui bagi ibu adalah sebagai berikut :

1. Akan mengurangi pendarahan setelah melahirkan.
2. Membantu mengembalikan kondisi si ibu pada keadaan sebelum hamil, terutama membantu mengerutkan Rahim.
3. Tidak merepotkan si ibu (tidak perlu merebus botol dan menghangatkan susu), terutama pada malam hari.
4. Menghemat pengeluaran, tidak perlu dibeli karena ASI produksi dalam tubuh ibu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Hubungan ibu dan bayi/anaknya lebih erat dan akrab.
6. Menunda masa kesuburan.

Apapun keuntungannya bagi bayi adalah sebagai berikut :

1. ASI adalah makanan yang terbaik bagi bayi, mudah dicerna dan diserap karena konsentrasinya yang tepat, aman dari kontaminasi bakteri.
2. ASI menyempurnakan pertumbuhan dan kecerdasan bayi karena ASI mengandung asam amino esensial termasuk asam taurin untuk perkembangan sel-sel otak.
3. ASI memberikan perlindungan pada bayi terhadap berbagai penyakit infeksi.
4. Memperindah gigi dan bentuk rahang bayi.
5. ASI selalu tersedia dengan suhu yang tepat.
6. Bayi akan tumbuh kembang dengan baik.
7. ASI tidak menimbulkan alergi pada bayi.²⁵

Di bawah ini akan kami sajikan tabel perbandingan antara keunggulan ASI dengan susu formula yang diproduksi oleh pabrik :

Tabel 1. Keunggulan ASI dengan Susu Formula.

No	Air Susu Ibu (ASI)	Susu Formula
1	Mengandung zat anti dan kekebalan terhadap beberapa penyakit infeksi.	Tidak mengandung kekebalan.

²⁵ BKKBN Provinsi Jambi, *Air Susu Ibu dan Kehamilan*, (Jambi ; BKKBN Provinsi Jambi, 1992), hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2	Menyehatkan ibu.	Dapat menyebabkan diare/mencoret pada bayi.
3	Bersih.	Pemborosan.
4	Mudah diberikan.	Makan waktu dan tenaga.
5	Mengandung semua zat gizi yang sangat diperlukan oleh bayi.	Takaran yang tidak tepat dapat membahayakan bagi si bayi.
6	Merupakan ungkapan rasa kasih sayang ibu kepada anaknya.	Tidak ada ikatan batin antara ibu dan anaknya.
7	ASI adalah karunia Tuhan yang amat berharga.	-

4. Masalah-Masalah Ketika Menyusui

Seorang ibu dalam memberikan ASI-nya sering kali mendapatkan masalah-masalah, baik yang berdampak kepada anaknya ataupun kepada ibunya sendiri. Adapun masalah-masalah ketika menyusui yang sering di jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut :

a. Payudara Bengkak (*Engorgement*).

Sekitar hari ketiga atau keempat sesudah ibu melahirkan, payudara sering terasa lebih penuh, tegang, serta nyeri. Keadaan seperti itu disebut payudara bengkak (*engorgement*) yang disebabkan oleh adanya statis di vena dan pembuluh darah bening. Hal ini merupakan tanda bahwa ASI mulai banyak disekresi. Apabila dalam keadaan tersebut ibu menghindari menyusui karena alasan nyeri lalu memberikan *prelacteal feeding*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(makanan tambahan) pada bayi, keadaan tersebut justru berlanjut. Payudara akan bertambah bengkak atau penuh karena sekresi ASI terus berlangsung sementara bayi tidak disusukan sehigga tidak terjadi perangsangan pada puting susu yang mengakibatkan *refleks oksitosin* tidak terjadi dan ASI tidak dikeluarkan. Jika hal ini terus berlangsung, ASI yang disekresi menumpuk pada payudara dan menyebabkan areola (bagian berwarna hitam yang melingkari puting) lebih menonjol, puting menjadi lebih datar dan sukar dihisap oleh bayi ketika disusukan. Bila keadaan sudah sampai seperti ini, kulit pada payudara akan nampak lebih merah mengkilat, terasa nyeri sekali dan ibu merasa demam seperti influenza.

Untuk mencegah terjadinya payudara bengkak, beberapa cara yang dianjurkan antara lain sebagai berikut :

1. Susukan bayi segera setelah lahir, apabila memungkinkan.
2. Susukan bayi tanpa dijadwal (*on demand* /sesuka bayi).
3. Keluarkan ASI dengan tangan atau pompa bila produksi melebihi kebutuhan bayi.
4. Lakukan perawatan payudara pasca persalinan.
5. Keluarkan sedikit ASI sebelum menyusui agar payudara lebih lembek, sehingga puting lebih mudah dihisap oleh bayi.
6. Kompres dingin untuk mengurangi rasa sakit pada payudara.
7. Berikan kompres hangat sebelum menyusui untuk memudahkan bayi menghisap (menangkap) puting susu.
8. Lakukan pengurutan (*masase*) payudara yang dimulai dari puting ke arah payudara untuk mengurangi peningkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peredaran darah dan terjadinya statis di pembuluh darah dan pembuluh getah bening dalam payudara.

b. Kelainan Puting Susu

Kebanyakan ibu tidak memiliki kelainan anatomis payudara. Meskipun demikian, kadang-kadang dijumpai juga kelainan anatomis yang menghambat kemudahan bayi untuk menyusui, misalnya puting susu datar atau puting susu terpendam (tertarik ke dalam). Disamping kelainan anatomis, kadang dijumpai pula kelainan puting yang disebabkan oleh suatu proses, misalnya tumor. Diantara penyakit yang dapat dijumpai pada masalah tersebut di atas adalah :

1. Puting Susu Datar.

Apabila areola dijepit antara jari telunjuk dan ibu jari di belakang puting, puting yang normal akan menonjol keluar, bila tidak, berarti puting datar. Ketika menyusui puting menjadi lebih tegang dan menonjol karena otot polos puting berkontraksi, meskipun demikian pada keadaan puting datar akan tetap sulit di tangkap/diisap oleh mulut bayi.

2. Puting Susu Terpendam.

Sebagian atau seluruh puting susu tampak terpendam atau masuk ke dalam areola (tertarik kedalam). Hal ini karena ada sesuatu di bawahnya yang menarik puting ke dalam, misalnya tumor atau penyempitan saluran susu. Kelainan puting tersebut seharusnya sudah dapat diketahui sejak hamil atau sebelumnya sehingga dapat diperbaiki dengan meletakkan kedua jari telunjuk atau ibu jari di daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

payudara, kemudian dilakukan pengurutan menuju ke arah berlawanan. Perlu diketahui bahwa tidak semua kelainan tersebut di atas dapat dikoreksi dengan cara tersebut. Untuk itu, ibu menyusui dianjurkan untuk mengeluarkan ASI-nya dengan manual (tangan) atau pompa kemudian diberikan kepada bayi dengan sendok atau pipet.

c. Puting Susu Nyeri dan Lecet.

Puting susu nyeri pada ibu menyusui biasanya terjadi karena beberapa sebab sebagai berikut :

1. Posisi bayi saat menyusui yang salah, yaitu puting susu tidak masuk ke dalam mulut bayi sampai pada areola sehingga bayi hanya menghisap pada puting susu saja. Hisapan/tekanan terus menerus hanya pada tempat tertentu akan menimbulkan rasa nyeri waktu dihisap, meskipun kulitnya masih utuh.
2. Pemakaian sabun, lotion, cream, alkohol dan lain-lain yang dapat mengiritasi pada puting susu.
3. Bayi dengan tali lidah (*frenulum linguae*) yang pendek sehingga menyebabkan bayi sulit menghisap sampai areola dan hisapan hanya pada putingnya saja.
4. Kurang hati-hati ketika menghentikan menyusui (menghisap).

Puting susu nyeri biasanya dapat disembuhkan setelah memperhatikan teknik menyusui yang benar, khususnya letak puting dalam mulut bayi, yaitu bibir bayi menutup areola sehingga tidak nampak dari luar, puting di atas lidah bayi, areola di antara gusi atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bawah. Untuk menghindari puting susu nyeri atau lecet, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak membersihkan puting susu dengan sabun, alkohol, lotion, cream, dan obat-obat yang dapat mengiritasi.
2. Sebaiknya selesai menyusukan untuk melepaskan hisapan bayi, tekanlah dagu bayi atau pijit hidungnya atau masukkan jari kelingking ibu yang bersih ke mulut bayi.
3. Ibu dianjurkan tetap menyusui bayinya mulai dari puting yang tidak sakit serta menghindari tekanan lokal pada puting dengan cara merubah-rubah posisi menyusui. Untuk puting yang sakit dianjurkan mengurangi frekuensi dan lamanya menyusui.
4. Apabila dengan tindakan tersebut di atas puting tetap nyeri, sebaiknya dicari sebab-sebab lain (misalnya moniliasis). Puting susu lecet/ luka akan memudahkan terjadinya infeksi pada payudara (mastitis).

d. Saluran Susu Tersumbat.

Saluran susu tersumbat (*obstructive duct*) adalah suatu keadaan dimana terjadi sumbatan pada satu atau lebih saluran susu yang disebabkan oleh tekanan jari waktu menyusui atau pemakaian BH yang terlalu ketat. Hal ini juga dapat terjadi karena komplikasi payudara bengkak yang berlanjut yang mengakibatkan kumpulan ASI dalam saluran susu tidak segera dikeluarkan sehingga merupakan sumbatan. Sumbatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini pada wanita yang kurus dapat terlihat dengan jelas sebagai benjolan yang lunak pada perabaannya.

Untuk mengatasi terjadinya saluran susu tersumbat (*Obstructive Duct*) ada beberapa hal yang dianjurkan, diantaranya :

1. Sebaiknya ibu melakukan perawatan payudara setelah melahirkan agar tidak terjadi statis dalam payudara yang mengakibatkan terjadinya radang payudara (*mastitis*).
2. Gunakan BH dengan desain menopang (menyangga), bukan menekan pada payudara.
3. Keluarkan ASI setiap kali selesai menyusui bila payudara masih terasa penuh.

Sumbatan saluran susu ini harus segera di atasi karena dapat berlanjut menjadi radang payudara (*mastitis*). Untuk mengurangi nyeri dan bengkak pada payudara dapat diberikan kompres hangat dan dingin, yaitu kompres hangat sebelum menyusui dengan tujuan mempermudah bayi menghisap puting susu dan kompres dingin setelah menyusui untuk mengurangi nyeri dan bengkak.

e. Radang Payudara (*Mastitis*).

Radang payudara (*mastitis*) adalah infeksi yang menimbulkan reaksi sistemik (seperti demam) pada ibu. Hal ini biasanya terjadi pada 1-3 pekan setelah melahirkan dan sebagai komplikasi saluran susu tersumbat. Keadaan ini biasanya diawali dengan puting susu lecet/luka. Gejala-gejala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang biasa diamati pada radang payudara antara lain kulit Nampak lebih merah, payudara lebih keras serta nyeri dan berbenjol-benjol (merongkol).

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, ibu perlu dianjurkan agar tetap menyusui bayinya supaya tidak terjadi statis dalam payudara yang cepat menyebabkan terjadinya abses. Ibu perlu mendapatkan pengobatan (antibiotika, antipiretik/penurun panas, dan analgesik/pengurang rasa nyeri) serta banyak minum dan istirahat untuk mengurangi reaksi sistemik (demam). Bilamana mungkin, ibu dianjurkan melakukan senam laktasi (senam menyusui) yaitu menggerakkan lengan secara berputar sehingga persendian bahu ikut bergerak ke arah yang sama. Gerakan demikian ini akan membantu memperlancar peredaran darah dan limfe di daerah payudara sehingga statis dapat dihindari yang berarti mengurangi kemungkinan terjadinya abses payudara.

f. Abses Payudara.

Kelanjutan/komplikasi dari radang payudara akan menjadi abses. Hal ini disebabkan oleh meluasnya peradangan dalam payudara tersebut dan menyebabkan ibu tampak lebih parah sakitnya, payudara lebih merah mengkilap, benjolan tidak sekeras seperti pada radang payudara (mastitis), tetapi tampak lebih penuh / bengkak berisi cairan. Bila payudara seperti ini perlu segera diperiksa ke dokter ahli supaya mendapat tindakan medis dan tepat. Mungkin perlu dilakukan tindakan insisi atau drainase (operasi kecil untuk mengeluarkan cairan/nanah), pemberian antibiotik dan analgesik (anti nyeri).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu dianjurkan banyak minum air dan istirahat. Bayi dihentikan untuk menyusui sementara waktu pada payudara sakit dan setelah sembuh dapat disusukan kembali. Akan tetapi, bayi tetap bisa menyusui pada payudara yang sehat tanpa dijadwalkan (sesuka bayi).

g. Air Susu Ibu Kurang.

Masih banyak ibu mengira bahwa mereka tidak mempunyai cukup banyak ASI untuk bayinya, sehingga keinginan untuk menambah susu formula atau makanan tambahan sangat besar. Dugaan makin kuat apabila bayi sering menangis, ingin selalu menyusu pada ibunya dan terasa kosong/lembek meskipun produksi ASI cukup lancar.

Menilai kecukupan ASI sebenarnya bukan dari hal tersebut di atas tapi terutama dari berat badan bayi. Apabila ibu mempunyai status gizi yang baik, cara menyusui benar, secara psikologis percaya diri akan kemauan dan kemampuan untuk bisa menyusui bayinya serta tidak ada kelainan pada payudaranya maka akan terjadi kenaikan berat badan pada 4-6 bulan pertama usia bayi. Hal ini dapat dilihat dari KMS (kartu Menuju Sehat) yang diisi setiap kali penimbangan di Posyandu. Apabila tidak terjadi kenaikan berat badan bayi sesuai dengan usianya biasanya hal ini disebabkan oleh jumlah Air Susu Ibu (ASI) yang tidak mencukupi sehingga diperlukan tambahan sumber gizi yang lain.

h. Bayi Bingung Puting.

Istilah bingung puting dipakai untuk menggambarkan keadaan bayi yang mengalami *nipple confusion* karena diberi susu formula dalam botol bergantian dengan menyusu pada ibu. Mekanisme menyusu dan minum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari botol sangat berlainan. Untuk menyusui bayi memerlukan usaha yang “lebih” dari minum susu dari botol. Pada saat menyusui pada ibu, bayi mempergunakan otot-otot pipi, gusi, palatum durum (langit-langit) dan lidah untuk menarik dan mengurut puting serta areolanya untuk membentuk suatu “dot”, kemudian ditekan oleh gusi atas dan bawah sehingga *sinus laktiferus* tertekan dan keluarlah ASI. Selanjutnya, dengan gerakan yang teratur ASI dihisap dan ditelan. Tidak demikian halnya dengan bayi yang mendapat minuman dari botol, sebab dot mempunyai lubang sehingga tanpa berusaha keras bayi dapat menelan susu karena susu dapat terus keluar tanpa dihisap. Oleh sebab itulah kenapa bayi yang terbiasa dari botol “dot” akan sulit dan enggan menyusui dari ibunya. Ibu yang menggunakan botol dan dot biasanya beralasan bahwa produksi ASInya kurang, atau ibu sakit, misalnya payudaranya bengkak, puting susu nyeri atau lecet dan sebagainya. Tanda-tanda bayi bingung puting antara lain :

1. Bayi mengisap puting seperti menghisap dot.
2. Waktu menyusui bayi menghisapnya terputus-putus atau tersendat-sendat.
3. Bayi menolak menyusui kepada ibu.

Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya bingung puting adalah sebagai berikut :

1. Ibu harus mengusahakan agar bayi hanya menyusui ibu saja.
2. Ibu harus menerapkan cara menyusui yang benar.
3. Ibu sebaiknya menyusui bayi tanpa dijadwal (sesuka bayi saja).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ibu perlu lebih sabar dan lebih telaten ketika menyusui bayi.

Bayi Enggan Menyusu.

Bayi enggan menyusui perlu mendapat perhatian khusus terutama terhadap bayi dengan gumoh, diare, mengantuk, kuning, dan kejang-kejang. Bayi dengan gejala tersebut perlu dibawa ke dokter ahli untuk mendapatkan tindakan oleh tim medis. Selain itu masih ada penyebab lain bayi enggan menyusui antara lain :

1. Hidung tertutup lendir atau ingus karena pilek sehingga sulit menghisap/ bernafas.
2. Bayi dengan sariawan/moniliasis, nyeri untuk menghisap.
3. Terlambat dimulainya menyusui waktu di Rumah Sakit karena tidak dirawat gabung antara ibu dan anak.
4. Bayi ditinggal lama karena ibu sakit atau bekera.
5. Bayi mendapat susu dari botol selain dari menyusui ibunya.
6. Bayi yang *prelacteal feeding* atau mendapatkan makanan tambahan terlalu dini.
7. Teknik menyusui ibu yang salah.
8. ASI kurang lancar atau terlalu deras (memancarkan air).
9. Bayi yang *frenulum linguae* (tali lidah) pendek.

Penanggulangan bayi yang enggan menyusui sebagai berikut :

1. Bersihkan lubang hidung bayi yang sedang pilek.
2. Berikan pengobatan bila mulut bayi sakit sariawan.
3. Berikan lebih banyak kesempatan kepada ibu untuk merawat bayinya sendiri agar lebih mengenal sifat/cirinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ibu perlu tahu teknik menyusui yang benar.
5. Sebaiknya ibu tidak memberi *prelacteal feeding* (makanan tambahan) yang terlalu dini pada bayi.
6. Apabila ASI keluar terlalu deras/memancar, keluarkan ASI sedikit sebelum menyusui baru kemudian bayi disusukan dengan posisi agak tegak/berdiri.
7. Bila ASI kurang lancar, sebaiknya menyusui lebih lama dan lebih sering (sesuka bayi) serta pada waktu menyusui posisi kepala bayi lebih berdekatan pada payudara, tangan ibu menahan kepala bayi agar tetap pada posisinya. Dengan begitu, ASI bisa keluar lebih sempurna.
8. Tindakan operatif pada *frenulum linguae* yang pendek.

j. Bayi Sering Manangis.

Menangis merupakan cara bayi untuk berkomunikasi sehingga bila bayi sering menangis pasti ada sebabnya. Kita perlu mencari sebabnya agar dapat diambil tindakan yang tepat. Penyebabnya bisa karena bayi lapar, haus, takut, kesepian, bosan, popok basah/kotor, atau karena sakit.

Delapan puluh persen dari penyebab tersebut di atas dapat ditanggulangi dengan menyusukan bayi dengan teknik yang benar. Di samping itu, tentu saja dengan mengatasi sebab-sebabnya seperti mengganti popok yang basah, membelai bayi supaya tenang, dan membawanya ke dokter jika memerlukan penanganan karena sakitnya.

5. Sekilas Tentang Air Susu Ibu (ASI)

Tidak ada yang meragukan bahwa Air Susu Ibu adalah nutrisi terbaik bagi bayi. ASI mengandung semua gizi yang dibutuhkan untuk membangun dan menyediakan energi bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal. Di dalam ASI terkandung zat-zat gizi yang diperlukan bayi untuk pertumbuhan dan mengandung zat-zat kekebalan yang sangat penting untuk mencegah timbulnya penyakit, serta mudah dicerna oleh pencernaan bayi. Dengan demikian ASI adalah makanan terbaik bagi bayi, oleh karena itu setiap bayi setidaknya memperoleh ASI.²⁶

Disamping itu, ASI mengandung beberapa zat anti terhadap penyakit-penyakit yang keberadaannya tidak diberikan melalui jalan lain. ASI merupakan sebuah asupan paling penting untuk bayi dibawah umur 2 tahun.²⁷ Kebutuhan nutrisi bayi sampai usia 6 bulan dapat dipenuhi hanya dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) saja, atau yang dikenal sebagai ASI eksklusif. Bayi tidak perlu diberi apa-apa, kecuali makanan yang langsung diproduksi oleh ibu. Makanan terbaik untuk bayi, dengan nutrisi terbaik, telah dicukupkan melalui ASI.²⁸

Kandungan yang terdapat dalam Air Susu Ibu (ASI) antara lain: Kolostrum, Laktosa, Protein, Taurin, Lemak, Mineral, Vitamin, dan zat

²⁶ Departemen Kesehatan RI, *Buku Panduan Manajemen Laktasi*, (Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat, 1991), hlm. 45.

²⁷ Muhammad Yudi Prawira, Purwanto, M. Azis Muslim, *Pengendalian Suhu Pada Pasteurisasi Asi (Air Susu Ibu) Dengan Metode Flash Heating Berbasis Mikrokontroler Atmega 2560*

²⁸ Yuliarti, *op.cit.*, hlm. 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*Kekebalan (imun).*²⁹ ASI memiliki kekebalan dari berbagai mikro-organisme yang membantu melindungi bayi dari serangan penyakit. Hal itu didukung oleh ragam vitamin yang melekat pada ASI, yaitu vitamin A, B (asam folat), C (pelarut), D (tulang), E, dan K (faktor pembeku). Vitamin A berfungsi untuk kesehatan mata, untuk mendukung pembelahan sel, kekebalan tubuh, dan pertumbuhan. Sedangkan vitamin E untuk ketahanan dinding sel darah merah.

ASI mengandung 1,6% albuminoidal, 0,4% lemak, 3,8% gula, garam, dan beberapa vitamin. Kandungan tersebut hanya terdapat dalam ASI, dan tidak terdapat pada yang lain, baik susu formula maupun susu sapi atau kambing.³⁰ Bayi yang tidak segera mendapatkan ASI setelah kelahirannya atau tidak diberikan makanan pendamping (MP) ASI secara dini akan lebih mudah terkena infeksi saluran pencernaan dan pernafasan, mudah terkena alergi serta intoleransi susu formula.³¹

Selain vitamin, kekuatan ASI ada pada kolostrum, yaitu ASI yang keluar pada hari pertama dan kedua setelah melahirkan. Warnanya kekuning-kuningan dan lebih kental, lebih banyak mengandung protein dan vitamin berfungsi untuk melindungi bayi dari penyakit infeksi. Zat lain adalah Laktosa, yaitu karbohidrat utama dalam ASI dan berfungsi sebagai salah satu sumber untuk otak. Jumlahnya meningkat terutama pada ASI transisi (7-14

²⁹ Zakiudin Munasir dan Nia Kurniati, "[Air Susu Ibu dan Kekebalan Tubuh](http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/air-susu-ibu-dan-kekebalan-tubuh)" Lihat <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/air-susu-ibu-dan-kekebalan-tubuh>

³⁰ Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), hlm. 32-

³¹ I. Komang Agusjaya Mataram, "*Aspek Imunologi Air Susu Ibu*", Jurnal Ilmu Gizi, Vol. 2 No. 1, Februari 2011, hlm. 37-48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hari setelah melahirkan). Adapun protein ASI mudah diserap oleh usus bayi dibandingkan dengan susu formula.

Air Susu Ibu (ASI) yang keluar dari kelenjar susu ibu pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga macam ASI berdasarkan waktu keluarnya serta kandungan zat gizinya. ASI yang keluar pertama kali setelah ibu melahirkan disebut kolostrum. Setelah kolostrum tidak keluar lagi, ASI disebut sebagai ASI masa transisi dan setelah masa itu tepatnya 10 hari kelahiran ASI disebut ASI matang/ASI dewasa. ASI yang pertama keluar disebut dengan *fore milk* dan selanjutnya disebut dengan *hind milk*. *Fore milk* merupakan ASI awal yang banyak mengandung air, sedangkan *hind milk* lebih banyak mengandung karbohidrat dan lemak.³²

Kemudian, Air Susu Ibu (ASI) dilengkapi juga dengan *taurin*, yaitu zat putih telur yang hanya terdapat pada ASI. Fungsinya sebagai neuro transmitter dan berperan penting untuk proses maturasi sel otak. Lemak berfungsi untuk pertumbuhan otak bayi. Kandungan lemak dalam ASI sekitar 70-78%. Zat besi dan kalsium di dalam ASI merupakan mineral dan jumlahnya tidak terlalu banyak dalam ASI. Mineral ini berfungsi sebagai pembentukan atau pembuatan darah dan pembentukan tulang.³³

Berbicara tentang Air Susu Ibu (ASI) tak luput dari fisiologi laktasi, karena menyusui merupakan proses yang cukup kompleks. Laktasi atau menyusui mempunyai dua pengertian yaitu produksi ASI dan pengeluaran.³⁴

³² U. Roesli, *Mengenal ASI Eksklusif*, (Jakarta: Trubus Agriwidya, 2005), hlm.22.

³³ Soetjiningsih, *ASI Petunjuk untuk Tenaga Kesehatan*, (Jakarta: EGC, 1997), hlm. 25.

³⁴ Ariani, *Ibu Susui Aku. Bayi Sehat dan Cerdas dengan ASI*, (Bandung: Khasanah Intelektual, 2009), hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ASI diproduksi saat saat hamil, dimulai dengan meningkatnya hormon prolaktin. Saat hamil, ASI masih terhambat oleh kadar estrogen yang begitu tinggi. Namun, saat melahirkan (+3), kadar estrogen dan progesterone turun drastis sehingga pengaruh prolaktin lebih besar. Saat itulah ASI bisa dikeluarkan. Mekanisme ini akan optimal dalam waktu sekitar 72 jam setelah melahirkan, termasuk perangsangan putting susu, sehingga pembuatan ASI semakin lancar.

Pengeluaran air susu dari payudara adalah faktor penting dalam kelanjutan produksinya, terdapat bahan kimia dalam ASI yang dirancang untuk menghentikan produksi ASI jika tidak digunakan, jika ASI yang sudah diproduksi tidak diisap atau dikeluarkan dari payudara dalam waktu yang lama, bahan kimia (penghambat) atau inhibitor autokrin ini akan menghentikan sel-sel pembuat ASI memproduksi ASI. Intensitas yang tinggi pada bayi untuk menyusu maka semakin banyak ASI diproduksi, sebaliknya jika semakin jarang bayi untuk menyusu makin sedikit payudara menghasilkan ASI.³⁵ Isapan bayi pada payudara akan merangsang hormon prolaktin dan oksitosin untuk menstimulus produksi ASI.³⁶

Di Indonesia, kesadaran tentang penggunaan air susu ibu telah muncul sejak tahun 1970-an. Hal itu bisa dilihat Simposium Peningkatan Penggunaan air susu ibu pada pertumbuhan dan perkembangan bayi-anak, Semarang, 24

³⁵ Marie Biancuzzo, *Breastfeeding the Newborn: Clinical Strategies for Nurses*, (Michigan: Mosby, 1999), hlm. 115.

³⁶ Baca Marilyn J. Hockenberry and David Wilson, *Wong's Nursing Care of Infants and Children*, (St. Louis Missouri, Elsevier Mosby, 2015), hlm. 277, 694, 740, 1125.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

September 1977.³⁷ Penelitian di Filipina menegaskan tentang manfaat pemberian ASI eksklusif dan dampak negatif pemberian cairan tambahan tanpa nilai gizi terhadap timbulnya penyakit diare. Seorang bayi yang diberi air putih, teh, atau minuman herbal lainnya akan berisiko terkena diare 2-3 kali lebih banyak dibanding bayi yang diberi ASI eksklusif.³⁸

Demikian pentingnya ASI dan pemberian ASI, *World Health Organization* (WHO) memberi perhatian khusus. Pada tanggal 1–7 Agustus 2016, *World Health Organization* (WHO) mengadakan acara *World Breastfeeding Week*, sebuah agenda tahunan yang diadakan oleh organisasi kesehatan dunia untuk mendorong (kampanye) pemberian ASI dan meningkatkan kesehatan bayi di seluruh dunia. Hal itu dalam rangka memperingati sebuah deklarasi yang ditandatangani pada bulan Agustus 1990 oleh petinggi pemerintahan, WHO, *United Nations Emergency Children's Fund* (UNICEF) dan organisasi lain, untuk melindungi, mempromosikan dan mendukung pemberian ASI.³⁹

Memberi ASI kepada bayi adalah cara terbaik untuk menyediakan nutrisi yang dibutuhkan bayi. WHO merekomendasikan bahwa setiap ibu harus mulai memberikan ASI eksklusif sejak satu jam setelah melahirkan sampai usia bayi 6 bulan. Setelah itu, berikan makanan tambahan sebagai pelengkap nutrisi, dan pemberian ASI tetap berlangsung sampai 2 tahun.

³⁷ Sebagai referensi bisa dilihat dalam http://perpustakaan.litbang.depkes.go.id/pusat2/index.php?p=show_detail&id=5271

³⁸ Yuliarti, *op.cit.*, hlm. 32.

³⁹ Lihat <http://www.who.int/mediacentre/events/2016/world-breastfeeding-week/en/> setiap tanggal 1 – 7 Agustus.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tahun ini, *World Health Organization* (WHO) mengajak semua orang untuk “Mendukung ibu-ibu memberikan ASI kepada bayinya kapanpun, dimanapun”, termasuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua untuk mendukung pemberian ASI. Hal ini mengingat "distribusi yang tidak terkendali dan penggunaan susu formula bayi dalam situasi darurat seperti ini - di mana ada tantangan air dan sanitasi yang serius dan resiko penyakit lainnya sangat berbahaya. Mendukung pemberian ASI adalah salah satu hal yang paling penting yang dapat kita lakukan untuk melindungi bayi di daerah

UNICEF dan WHO memprioritaskan perlindungan, promosi dan dukungan menyusui sebagai tindakan yang menyelamatkan jiwa untuk bayi di mana-mana, dan terutama dalam keadaan darurat. Selama situasi darurat, penyakit dan tingkat kematian di kalangan bayi dan anak-anak lebih tinggi daripada kelompok usia lainnya, dan lebih muda anak tersebut, semakin tinggi juga risikonya, terutama bayi di bawah enam bulan yang paling rentan. Bayi yang minum susu formula dibuat dengan air yang terkontaminasi dengan kuman atau diberikan dengan botol tidak steril atau dot, bisa menjadi sangat sakit dengan diare dan dapat meninggal dunia dalam hitungan jam.

Memberi makan bayi dengan susu formula dalam keadaan darurat adalah upaya terakhir, ketika ada pilihan lain yang aman - seperti membantu ibu menyusui untuk mereka yang belum memberikan ASI, menemukan seorang Ibu donor asi atau ASI pasteurisasi dari bank ASI sudah sepenuhnya dieksplorasi. UNICEF dan WHO mendesak semua untuk terlibat dalam pendanaan, perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan hak bayi, apalagi dalam kondisi darurat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, panduan Allah SWT tentang kewajiban memberikan ASI mendapatkan validasinya. Apalagi, ASI tidak hanya memenuhi asupan materi atau fisik semata. Lebih dari itu, melalui ASI, terbina pula kontak bathin (psikis) antara si bayi dengan ibunya.

Mari kita dalam firman Allah SWT berikut ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2] : 233)⁴⁰

⁴⁰ Al-Kalam, versi 1.0, (Bandung: Dipenogoro, 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas mengingatkan kita untuk memperhatikan hak bayi terhadap air susu ibunya. Sang ibu tidak boleh menghindar dari kewajibannya memberikan ASI. Orang tua hanya lepas dari tuntutan jika bayinya telah mendapatkan haknya, baik dari ibu kandungnya, atau ibu susuannya.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ
- أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ - ٤١

Artinya: “dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”⁴¹

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِإِحْسَانٍ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ
وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ
- لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ - ٥٠

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun.”⁴²

Demikian sayangnya Allah SWT, Dia bantu proses pemenuhan ASI itu melalui shalat. Gerakan *qiyam* dan *takbiratul ihram* (dalam shalat) merupakan bentuk meditasi yang sempurna. Gerakan tersebut akan mengurangi

⁴¹ Q.s. 31: 14.

⁴² Q.s. 46: 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketegangan dan melahirkan relaksasi. Keadaan ini akan memperlancar peredaran darah dan merangsang pengeluaran hormone prolaktin yang akan merangsang pengeluaran ASI.⁴³ Shalat juga mendidik ibu untuk tetap tenang. Siapa ibu yang kesal, misal karena bayi menangis, itu dapat mengganggu proses laktasi.⁴⁴

6. Bank ASI

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa berbagai kemudahan bagi kehidupan umat manusia. Di antara berbagai kemudahan itu adalah dibentuknya suatu lembaga atau yayasan yang berusaha menghimpun air susu ibu dari ibu-ibu menyusui yang air susunya melebihi kebutuhan bayinya. Air susu yang telah dihimpun itu disterilkan dan disimpan dalam suatu wadah dengan baik untuk kemudian diberikan kepada bayi-bayi yang membutuhkannya. Misalnya, bayi-bayi yang air susu ibunya kurang atau tidak mencukupi kebutuhannya atau bayi-bayi yang lahir premature, dimana pada tahap kehidupannya yang rawan, akan sangat membahayakan dirinya jika ia tidak diberikan air susu ibu. Lembaga atau yayasan yang bergerak dalam bidang ini dapat disebut sebagai Bank Air Susu Ibu.⁴⁵

Bank ASI adalah tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa

⁴³ Ewa Molika Sitompul, *Dahsyatnya Gerakan Shalat untuk Ibu dan Janin*, (Jakarta: Publishing Langit, 2014), hlm. 115.

⁴⁴ Yuliarti, hlm. 35.

⁴⁵ Mendra Siswanto, *"Pola Penalaran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer"*, Tesis tidak diterbitkan, (Pekanbaru: UIN Suska, 2011), hlm. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan ASI sendiri ke bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah, yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri.⁴⁶ Bank ASI, yaitu suatu sarana yang dibuat untuk menolong bayi-bayi yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan ASI. Bank ASI adalah Bank khusus untuk menampung air susu ibu atau suatu lembaga untuk menyimpan atau menghimpun air susu ibu.

Bank ASI merupakan sebuah institusi yang didirikan untuk tujuan mengumpulkan, memeriksa, memproses, menyimpan, dan menyalurkan donor ASI kepada bayi yang bukan keturunan biologis dari ibu pendonor.⁴⁷ Bank Air Susu Ibu adalah: suatu lembaga atau yayasan yang berusaha menghimpun air susu dari ibu-ibu menyusui yang air susunya melimpah ruah, yang mana air susu yang telah dihimpun itu disterilkan dan disimpan dengan baik kemudian diberikan kepada bayi-bayi yang membutuhkannya.⁴⁸

Zaman dahulu, tidak ada lembaga seperti Bank ASI. Lembaga ini muncul di zaman ini pengaruh modernisasi. Justru, ada kebanggaan bersama tradisi jika seorang ibu berhasil mendapatkan kepercayaan dari pembesar Quraisy. Kegiatan penyusuan yang berjalan di kalangan Bangsa Arab waktu itu adalah perjodohan antara ibu-ibu dari Bani Sa'd yang pergi ke Makkah untuk mencari bayi yang bisa disusui dengan wanita 'karir' di Makkah yang

⁴⁶ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Cet. V, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 120

⁴⁷ Dipa K. Guha, *Neonatology: Principles and Practice*, (New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2005), hlm.

⁴⁸ Al-Qardhawi, *al-Fatawa al-Mu'ahirah*, juz 2, hal. 550-1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mencari wanita-watnita yang bisa menyusui anak-anaknya. Rasulullah pun termasuk dalam bagian tradisi tersebut.

Bank ASI pertama muncul di Wina Austria pada tahun 1909 dan kemudian merambah ke Jerman dan Boston Amerika sepuluh tahun kemudian, kini telah berkembang di ke berbagai negara. Pada tahun 2009, tercatat bahwa bank ASI berkembang di 38 negara, dengan lebih dari 300 bank ASI.⁴⁹ Pada tahun 1943 *The American Academy of Pediatrics* merilis panduan untuk oprasional Bank ASI. Pada tahun 1970, neonatology menjadi satu kajian tersendiri, yaitu bagaimana menangani bayi prematur supaya bertahan hidup.

Sejak itulah donor ASI menjadi menu utama bayi prematur dan jumlah Bank ASI semakin meluas.

Awal tahun 1980, jumlah donor Bank ASI menurun drastis akibat isu penyakit AIDS dan berbagai infeksi lainnya. Seperti halnya darah, air susu yang dapat disusupi virus. Setelah itu, penggunaan susu formula melonjak drastis. Ditambah lagi, susu formula ini dikembangkan agar bisa sesuai untuk bayi prematur. Namun demikian harus diakui, nutrisi komplit dalam ASI tidak akan pernah tergantikan. Kini, dengan *screening* yang ketat, Bank ASI kembali bangkit dan menjadi pilihan nutrisi yang dipilih oleh ahli kesehatan dan dokter anak. Bahkan pendonor cukup menelpon agar ASI-nya dijemput dengan tas khusus yang steril. ASI donor hanya bisa diperoleh melalui Bank

⁴⁹ Ahwan Fanani, *Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Jurnal Ishraqi, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, hlm. 83–96. Tercatat Negara berikut telah memiliki Bank ASI: Amerika Serikat, Australia, Brazil, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Finland, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, India, Inggris, Jepang, Norway, Swedia, Switzerland.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ASI yang resmi ditunjuk setelah melewati persyaratan ketat yang harus dipenuhi.

Dalam pengelolaannya, terutama higienitas dan kualitas ASI yang tersimpan, Bank ASI menerapkan langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi dan screening donor, termasuk sejarah rinci penyakit dan tes darah;
2. Susu hibah dikirimkan ke Bank ASI dalam kondisi membeku.
3. Susu dicairkan dan dicampurkan dengan susu dari donor lainnya.
4. Suhu disterilkan pada suhu 62,5° celcius selama 30 menit.
5. Bakteri yang bermanfaat dibiakkan untuk menjamin hasil sterilisasi.
6. Analisis kandungan susu, seperti lemak, karbohidrat, dan laktosa.
7. Susu disalurkan dengan resep dokter.⁵⁰

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akreditasi sebagai Bank ASI. Bank ASI juga tidak menerima pendonor begitu saja. Mereka harus memenuhi banyak kriteria, terutama dari kontaminasi penyakit berbahaya. Asosiasi Bank ASI Amerika Utara (HMBANA) Jika kamu hendak menyumbangkan ASI, ingatlah bahwa perbuatan itu sesuatu yang sungguh berharga, terutama jika kita ditakdirkan melahirkan seorang bayi premature.⁵¹

Semua ibu donor diskriminasi dengan hati-hati. Ibu donor harus memenuhi syarat, yaitu non-perokok, tidak minum obat dan alkohol, dalam

⁵⁰ Ahwan Fanani, *Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Jurnal Ishraqi, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, hlm. 83–96).

⁵¹ Dana Wechsler Linden, Emma Trenti Paroli, Mia Wechsler Doron, *Preemies - Second Edition: The Essential Guide for Parents of Premature Babies*, (New York: Gallery Books, 2010), hlm. 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kesehatan yang baik dan memiliki kelebihan ASI. Selain itu, ibu donor harus memiliki tes darah negatif untuk Hepatitis B dan C, HIV 1 dan 2, serta HTLV 1 dan 2, memiliki kekebalan terhadap rubella dan sifilis negatif. Juga tidak memiliki riwayat penyakit TBC aktif, herpes atau kondisi kesehatan kronis lain seperti *multiple sclerosis* atau riwayat kanker. Selain itu, suhu ruangan harus diatur sedemikian rupa untuk ketahanannya. Suhu 19-25 derajat celsius ASI dapat tahan 4-8 jam; Suhu 0-4 derajat celsius ASI tahan 1-2 hari; Suhu dalam freezer khusus bisa tahan 3-4 bulan.

Keberadaan Bank ASI amat didukung oleh UNICEF dan WHO. Hanya saja proses uji kelayakan ASI ini membutuhkan peralatan canggih dengan dana yang tidak sedikit. Bank ASI adalah isu besar dan luar biasa. Klinik Laktasi Carolus pernah melakukan praktek semacam bank ASI, dengan berbekal berbagai literatur mengenai bank ASI di luar negeri serta persetujuan dari 5 pemuka agama di Indonesia. Sayangnya hanya berjalan 3 tahun. Pasalnya, pihaknya hanya mampu melakukan tes kesehatan dan wawancara untuk calon ibu penyumbang. Tak ada screening dan teknik pasturisasi canggih seperti yang dilakukan bank ASI di luar negeri. Jadi tak dapat menjamin air susu sumbangan ibu 100% aman.

Pelaksanaan bank ASI di negara berpenduduk muslim tidak lepas dari kontroversi, utamanya menyangkut dampak dari pemberian ASI terhadap hubungan antara pemberi dan penerima ASI dan istilah bank yang digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

untuk menyebut institusi yang mengumpulkan dan menyalurkan ASI tersebut.⁵²

Di Barat, Bank ASI bersifat komersial. Ada harga yang harus dikeluarkan untuk setiap ons ASI. Setidaknya 3 dollar US harus disiapkan, dan hukum pasar berlaku: harganya semakin mahal jika persediannya langka.⁵³ Menurut mereka, harga itu cukup wajar karena proses menuju ASI siap konsumsi sangat mahal. Dimulai dari seleksi kesehatan pendonor, sterilisasi pemrosesan, dan kualitas tempat penyimpanan.⁵⁴

Bank ASI bisa bersifat individual, maupun institusi yang professional. Di Barat, ada banyak wanita yang ingin mempertahankan karirnya tanpa mengorbankan hak anaknya akan ASI. Sebutlah Janice, ibu yang berprofesi sebagai wanita karier dan memiliki Komitmen untuk menyusui. Ia menyediakan rak atau ruang khusus dalam lemari pembekunya untuk menampung selusin botol penampung ASI-nya. Ia melengkapinya dengan tanggal, dan ia bangga menunjuk koleksinya sebagai bank.⁵⁵

Di Indonesia, pernah didirikan Bank ASI pada awal tahun 1970-an. Rumah Sakit Jakarta mendirikan bank air susu manusia dimana ibu-ibu yang

⁵² Noraida Ramli, Nor Roshidah Ibrahim, Van Rostenberghe Hans. "Human Milk Banks: The Benefits and Issues in an Islamic Setting" *Eastern Journal of Medicine* 15 (2010), hlm. 163-166.

⁵³ Wechsler, hlm. 172.

⁵⁴ Wechsler, hlm. 176. Lihat juga Guha, *Neonatology*, hlm. 162.

⁵⁵ William Sears, dkk., *The Baby Book: Segala Hal yang Perlu Anda Ketahui tentang Bayi Anda Sejak Lahir Hingga Usia Dua Tahun*, (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 238.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempunyai kelebihan air susu dapat memberikan kelebihan itu dan menyimpannya untuk bayi-bayi yang ibunya kekurangan air susu.⁵⁶

Keberadaan Bank ASI adalah solusi karena hal-hal berikut:

1. Menolong bagi bayi-bayi yang prematur (<1500g) dan membutuhkan suplementasi;
2. Menolong bayi yang berisiko hipoglikemia karena gangguan adaptasi metabolic atau peningkatan kebutuhan glukosa;
3. Membantu bayi yang berisiko kehilangan cairan akut (misal karena fototerapi untuk jaundice) dan menyusui serta memerah ASI belum bisa mengimbangi kebutuhan cairan.
4. Memudahkan dan membantu ibu yang memiliki bayi namun terjangkit penyakit berbahaya, seperti AIDS, HIV, Harpes, dan sebagainya;
5. Menolong ibu menyusui Ibu yang mengalami kelainan payudara, riwayat operasi pada payudara, atau jaringan payudara tidak berkembang.

7. Pendapat Ulama Tentang Bank ASI

Respon ulama terhadap Bank ASI ada dua: *Pertama*, ulama yang berpendapat bahwa Bank ASI tidak boleh didirikan. Salah satu rujukannya adalah ulama dan pakar yang berdiskusi pada symposium yang diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 11 Sya'ban 1403 H. Mereka yang hadir, bersepakat bahwa Bank ASI haram didirikan. Bank ASI akan menyebabkan percampuran nasab bagi anak-anak yang memanfaatkan produk

⁵⁶ M.B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, penerjemah: Iding Rasyidin Hasan, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 254.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bank ASI tersebut. Mahram yang dimaksud adalah sampainya air susu ke perut bayi, meskipun tanpa penyusuan langsung seperti ibu yang menyusui anaknya.

Hal itu didasarkan hadits Aisyah R.a., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة

Artinya: “*Sesungguhnya susuan mengharamkan segala sesuatu yang diharamkan oleh kelahiran*”⁵⁷

Pakar yang mengharamkan itu adalah Syaikh Badr al-Mutawally ‘Abd al-Basith, seorang pakar hukum dari Kuwait. Bersamanya ada Muhammad al-Asyqar dan ‘Izz al-Din Tuni. Mereka berdua adalah pakar dan peneliti ensiklopedi hukum. Ada juga Menteri Wakaf Mesir, Ibrahim al-Dusuqi. Selain itu, turut serta Syaikh al-Islam Kuwait, Umar al-Asyqar dan ‘Abd al-Rahman Khaliq.⁵⁸

Demikian juga dengan Majma’ al-Fiqh al-Islamiy melalui Badan Mukhtar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 10 – 16 Rabi’u al-Akhir. Mereka menilai bahwa persusuan dalam Islam mengakibatkan adanya

⁵⁷ Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 1452. Lihat Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, penerjemah Izzudin Karimi, (Jakarta: Daarul Haq, 2016), hlm. 533.

⁵⁸ Lihat “Munadloma al-Islamiyah li al-‘Ulum al-Thobibah”, *Majma’ al-Fiqh al-Islamiy*, Edisi II, Vol. I, 1986, hlm. 404.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hubungan keluarga. Konsekuensinya, mereka –yang sesusuan—tidak boleh menikah seperti halnya yang satu keturunan.⁵⁹

Begitu juga dengan Kesepakatan ahli fiqh dan kajian ahli kedokteran tentang bank ASI pada Muktamar II yang diselenggarakan pada tanggal 22 – 28 Desember 1985 atau bertepatan dengan tanggal 10 – 16 Rabi’u al-Tsani 1406 H. Setelah dipaparkan penjelasan secara fiqh dan penjelasan secara ilmu kedokteran tentang Bank ASI, dan setelah mempelajari pemaparan dari masing-masing bidang disiplin ilmu, dan diskusi yang melibatkan berbagai sudut pandang, maka disimpulkan bahwa:

1. Bank ASI telah diuji cobakan di masyarakat Barat. Namun muncul beberapa hal negatif, dari sisi teknis dan ilmiah dalam uji coba ini, sehingga mengalami penyusutan dan kurang mendapatkan perhatian.
2. Syariat Islam menjadikan hubungan persusuan sebagaimana hubungan nasab. Orang bisa menjadi mahram dengan persusuan sebagaimana status mahram karena hubungan nasab, dengan sepakat ulama. Kemudian, diantara tujuan syariah adalah menjaga nasab. Sementara Bank ASI menyebabkan tercampurnya nasab atau menimbulkan banyak keraguan nasab.
3. Interaksi sosial di masyarakat islam masih memungkinkan untuk mempersusukan anak kepada wanita lain secara alami. Keadaan ini menunjukkan tidak perlunya Bank ASI.

⁵⁹ Lihat ‘Ali Ahmad al-Salus, *Mawsu’ah al-Qadlaha al-Fiqhiyyah al-Mu’ashiroh*, (Mesir: Maktabah Daar al-Qur’an, 2002), hlm. 723 – 724.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka diputuskan terlarangnya mengadakan Bank ASI untuk para Ibu-ibu di tengah masyarakat islam, serta haramnya memberikan susu dari Bank ASI.⁶⁰

Kedua, Bank ASI boleh didirikan dengan beberapa kondisi. Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan bahwa Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i. Kebolehan memberikan dan menerima ASI itu jika Ibu yang memberikan ASI sehat, baik fisik maupun mental, dan tidak sedang hamil. Pemberian ASI tersebut menyebabkan terjadinya mahram.⁶¹

Salah satu pakar yang memperbolehkan adalah Yusuf Qardawi. Ia setuju dengan bank ASI karena sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan bayi yang lahir prematur dan bayi yang ditinggal mati oleh ibunya. Menurutnya, bank ASI tidak ada implikasinya terhadap hurmat *rada'ah*, sebab hisapan puting susu ibu yang menjadi syarat *rada'ah* tidak berlaku pada bank ASI karena bayi yang diberi susu dengan botol atau dengan cara lainnya tidak akan berada dalam pangkuan dan pelukan ibu susuan, dengan demikian tidak terdapat jalinan kasih sayang (sifat *ummumah*). Sehingga tidak ada

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Damaskus: Daar al-Fikr, t.t), hlm. 5085-6. Lihat juga dalam Jilid IV, hlm. 3024.

⁶¹ Lihat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 14-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

proses penyusuan yang menimbulkan hukum mahram antara bayi dan wanita yang menyumbang susunya melalui bank ASI.⁶²

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa dia tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya “Bank Air Susu Ibu” asalkan bertujuan untuk mewujudkan *mashlahat syar’iyyah* yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Dan tidak mengakibatkan haramnya melakukan perkawinan, adapun sifat susuan yang mengharamkan adalah apabila bayi menyusu langsung dengan ibu yang menyusunya.⁶³

Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn Hazm yang menyatakan bahwa sifat penyusuan yang mengakibatkan dampak hukum hanyalah yang diisap saja dengan mulut dan menyusui dari puting ibu yang disusunya. Bila air susu seorang wanita diminumnya dari satu wadah atau diperaskan ke mulutnya, lalu ditelannya, atau diberi makan dengan roti atau makanan lainnya, atau air susu masuk melalui hidungnya, atau telinganya, atau matanya, atau disuntikkan kepadanya, maka itu semua tidak mendatangkan dampak keharaman.⁶⁴

Sementara itu, organisasi massa Persatuan Islam pun menyetujuinya dengan catatan. Dewan Hisbah Persatuan Islam memutuskan bahwa Bank ASI bisa halal bisa juga haram. Bank ASI hukumnya halal jika ibu pendonor dan bayi penerima donor memelihara kejelasan hubungan ini,

⁶² Rafiah Aini, “Studi Kritis Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hurmat Rada’ah, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010)

⁶³ Winda Alisriani, “Telaah terhadap Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Bank Air Susu Ibu dan Konsekuensinya terhadap Larangan Perkawinan karena Sepersusuan, tesis tidak diterbitkan, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015)

⁶⁴ Ali ibn Ahmad ibn Sa’id Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Jilid X, (Mesir: Mathba’ah al-Nahdlah, 1347H), hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sehingga tidak mengakibatkan kerancuan nasab. Namun, jika ASI dijadikan sebagai komoditi, hukumnya haram. Demikian pula menjadi haram jika ibu pendonor dan orang tua bayi yang menerima donor tidak memelihara kejelasan asal usul penerima donor.⁶⁵

Keputusan itu lahir atas berbagai pertimbangan, terutama terkait fakta bahwa air susu ibu adalah asupan terbaik untuk bayi yang tidak tergantikan nilainya. ASI dari seorang ibu dapat diberikan kepada bayi, walaupun bukan anaknya. ASI bisa diberikan kepada bayi baik langsung ataupun tidak langsung. Dalam kadar tertentu, bayi-bayi yang menyusu kepada ibu yang sama menjadi saudara sesusu dan termasuk mahram.

8. Nawazil Bank ASI

1. Konsekuensi Hukum

Pembahasan tentang Bank ASI memiliki konsekuensi yang harus menjadi perhatian. Hal itu terkait dengan mahram dalam pernikahan. Dalam Islam, bayi-bayi yang menyusu bukan kepada ibu kandungnya akan menjadi saudara sepersusuan, dimana akibat hukumnya adalah satu sama lain haram menikah sama seperti saudara sepertalian darah. Demikian pula ibu yang menyusui bayi-bayi tersebut akan menjadi ibu susunya; anak-anak dari ibu susu akan menjadi saudara-saudara sepersusuannya yang diharamkan menikah satu sama lain. Hukum ini dapat dipahami dari surat al-Nisa' ayat 23 :

⁶⁵ Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Pada Sidang Dewan Hisbah Lengkap di Gedung Haji Qanul Manazil, Ciganitri Bandung, 26 Rabi'ul Awwal 1433 H/19 Februari 2012 M Tentang "Hukum Bank ASI "

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا - ٢٣

Artinya: “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁶⁶

Konsekuensi dari mahramnya penyusuan adalah pemenuhan syarat terjadinya saudara sepersusuan. Menurut Ibnu Rusyd, air susu yang mendatangkan status mahram adalah ASI yang menjadi satu-satunya makanan yang menghilangkan lapar. Oleh karena itu, istri-istri Nabi saw.

⁶⁶ Diambil dari Al-Kalam Digital versi 1.0., (Bandung: Dipenogoro, 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain ‘Aisyah melihat hadits ini sebagai “keringanan” bagi Salim. Kasus itu menjadi kekhususan tentang mahramnya penyusuan sesudah baligh.⁶⁷

Menurut Baihaqi, hadits di atas merupakan panduan persusuan, bahwa seorang ibu harus menahan diri untuk tidak menyusui anak (manusia) yang sudah besar. Persusuan adalah bagian dari kelaparan.⁶⁸ Artinya, motif orang dewasa ketika ingin menyusui tidak disebabkan oleh rasa lapar. Ia masih bisa mengkonsumsi makanan selain ASI. Bahkan menjadi aneh jika orang dewasa masih meminum ASI.

Menurut al-Hafidh, laki-laki itu anaknya Abu Qa’is. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah saw bertanya: “Hai ‘Aisyah, siapa dia?”. “Dia saudaraku, saudara sepersusuan” jawab ‘Aisyah. Kemudian, Rasulullah melanjutkan, “Kamu harus meneliti dan cermat dalam menentukan saudara sepersusuan. Apakah syarat dan sebab-sebabnya telah terpenuhi atau belum. Jika tidak, maka kalian haram berkhawat seperti itu.” Kalimat *المجاعة* adalah penegasan bahwa susuan itu karena sebab “kelaparan”.⁶⁹

Artinya, ASI adalah satu-satunya jawaban atas laparnya anak. ASI itu tidak sekadar menghilangkan kebutuhannya, juga membantu pertumbuhan fisiknya. Hal ini sesuai dengan hadits dari Ummu Salamah bahwa Nabi bersabda: “Mahram susuan itu terjadi karena kontak putting dengan bibir bayi sebelum masa pengasuhan berakhir”. Oleh karena itu,

⁶⁷ Abu al-Walid ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, Juz II, (Mesir: Musthafa al-Babi, 1975), hlm. 36.

⁶⁸ Hadits nomor 15.411 dalam Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubro*, Juz VII, (Mekah: Maktabah Dar al-Baaz, 1414H), hlm. 456.

⁶⁹ Hamzah Muhammad Qasim, *Manar al-Qori Syarah Mukhtashar Shahih Bukhori*, Juz V, (Damaskus: Daar al-Bayan, 1410H), hlm. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tidak ada *radla'ah* setelah usia bayi itu lebih dari dua tahun.⁷⁰ Hadits itu – dalam Sunan al-Tirmidziy no. 1.152—berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الشَّذِيِّ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ»: [ص: 451] هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الرِّضَاعَةَ لَا تُحْرَمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحْرَمُ شَيْئًا «وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَهِيَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ»⁷¹

Rasulullah Saw tersenyum –menurut Ibnu Abi Amir: tertawa— ketika memerintahkan Sahlah binti Suhail untuk menyusui Salim, laki-laki yang sudah besar. Salim adalah teman Sahlah yang datang ke rumahnya, sementara itu suaminya, Abi Hudzaifah, “merasa tidak senang dengan kedatangan Salim”. Menurut Sahlah, bagaimana mungkin saya menyusui dia, sedang laki-laki itu sudah baligh. Seakan-akan Rasulullah berseloroh, “*nah tu dia, kamu sudah tahu*”.⁷² Kisah ini tertulis dalam Shahih Muslim dengan nomor hadits 1.453 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حَذِيقَةً مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ،

⁷⁰ Dikeluarkan oleh Imam Turmudzi, hadits No. 1152, dengan status Hasan Shahih menurut Abu 'Isa, dan disepakati pengamalannya oleh banyak sahabat Nabi. Lihat Muhammad Nasiruddin al-Albaniy, *Shahih wa Dla'if Sunan*, Juz III, (Iskandariyah: Nurul Islam, t.t.), hlm. 152.

⁷¹ Muhammad bin Isa bin al-Tirmidzy, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, (Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1395H), hlm. 450.

⁷² Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz II, diteliti oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baaqiy, (Beirut: Daar Ihya al-Turots al-'Arabiyy, t.t.), hlm. 1076.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضِعِيهِ»، قَالَتْ: وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ؟ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ»، زَادَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁷³

Ulama berbeda pendapat tentang kasus penyusuan seperti ini. ‘Aisyah dan Dawud berpendapat bahwa penetapan mahram dari susuan anak-anak adalah usia baligh. Adapun sebagian besar sahabat, tabi’in, dan ulama berpendapat bahwa penetapan mahram hanya bagi mereka yang dibawah dua tahun. Menurut Abu Hanifah, dua tahun setengah. Adapun Jumhur menyandarkan pendapatnya pada Q.s. al-Baqarah [2]: 233 bahwa semua ibu harus menyusui anak-anaknya secara sempurna, dua tahun. Oleh karena itu, Muslim menegaskan dengan kalimat إنما الرضاعة من

المجاعة⁷⁴

Jadi, hadits Sahlah adalah petunjuk khusus untuk dia dalam kasus Salim. Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah dan istri-istri Nabi, mereka berbeda dengan ‘Aisyah. Hakim berkata, semoga Sahlah menyusui (dan memberi minum) Salim tidak untuk sentuhan putting, tidak juga untuk bersenang ria dalam kemesraan. Inilah yang dikatakan baik/boleh

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Hakim, sehingga sentuhan itu terampuni, sebagaimana pengecualian persusuan bagi manusia dewasa.⁷⁵

Menurut al-Khathaby, susuan yang mengakibatkan mahram adalah susuan ketika anak itu masih kecil. Susuan itu membuatnya menjadi kuat dan menghilangkan kebutuhannya dari ASI. Menurut para fuqaha, hadits ini menegaskan kembali syari'at susuan yang asasi (yang paling diikuti/dipertimbangkan), yaitu pemenuhan hak anak (dari lapar) atas ASI. Seorang anak tidak mungkin terus menyusu jika telah sempurna dua tahun.⁷⁶

Menurut al-Sijistaniy, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa *radla'ah* – yang membuat mahram—itu adalah yang membuat tulang menjadi kuat dan menumbuhkan daging. Hal itu hanya terjadi pada manusia di usia pertumbuhan, yaitu sewaktu masih bayi. Oleh karena itu Abu Musa menguatkan, “jangan bertanya itu lagi kepada kami, nikmatilah kondisi yang ada”. Ibnu Mas'ud mengutip dari Nabi saw., dengan ungkapan **أَنْشَرَ الْعَظْمَ**.⁷⁷

Imam Malik juga menjelaskan bahwa penyusuan adalah penyusuan di waktu kecil. Dalam kitabnya, Ia menceritakan kisah tentang seorang laki-laki yang datang kepada Abdullah bin 'Umar tentang penyusuan orang yang sudah besar (*baligh*). Kemudian, Abdullah bin 'Umar

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Lihat hadits no. 2.059 dan hadits 2.060 dalam Al-Sijistaniy, Juz II, hlm. 222.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjawab dengan cerita seorang laki-laki yang mendatangi ayahnya, Umar ibn Khaththab. Laki-laki itu berkata kepada ayahnya (Umar) bahwa dirinya memiliki budak yang telah digaulinya. Kemudian, istrinya dengan sengaja menyusui budak tersebut. Oleh karena itu, ketika saya ingin menggauli budak itu lagi, saya dilarang oleh istri saya. Ia berkata, “Demi Allah, ia haram digauli karena telah saya susui”. Dari peristiwa itu, Umar bin Khatthab mengambil keputusan: “Acuhkan istrimu, dan gaulilah budakmu”, karena sesungguhnya penyusuan itu adalah penyusuan di waktu kecil.

Secara lengkap, hadits itu berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطْوُهَا فَعَمَدْتُ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعْتُهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ دُونَكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا فَقَالَ عُمَرُ أَوْجَعَهَا وَأَتِ جَارِيَتَكَ فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ⁷⁸

Demikian pula dengan pendapat al-Qurthubiy, penyusuan setelah baligh tidak mendatangkan mahram. Itu sudah menjadi kesepakatan para imam (Mesir) hari ini. Landasan Jumhur Muhadditsin adalah Q.s. al-Baqarah 233: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. Artinya, Allah mewajibkan

⁷⁸ Hadits nomor 2.248, lihat Malik bin Anas, *al-Muwatha*, Juz IV, (Kairo: Zayid bin Sulthon Ali Nahyan, 1425H), hlm. 875.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua untuk menyempurnakan penyusuan dua tahun. Dengan demikian, penyusuan setelah dua tahun bukanlah syari'at. Jika masih terjadi penyusuan setelah dua tahun, penyusuan itu sudah di luar kesempurnaan.

Makna kalimat إنما الرضاعة من المجاعة adalah peringatan bagi siapapun yang melakukan penyusuan anak yang sudah besar. Apalagi ada hadits dari Ummu Salamah bahwa Nabi saw. pernah bersabda: "Syarat susuan yang menyebabkan mahram adalah ketika susu mencapai usus melalui puting, sampai masa penyusuan berakhir."⁷⁹

Sebaliknya, Mazhab Dlahiri berpendapat bahwa hadits 'Aisyah ini menjadikan mahram meskipun pihak yang disusunya sudah besar. Kasus penyusuan Salim adalah pengecualian karena alasan 'adopsi' anak angkat. Selain Salim, aturan ini tidak berlaku. Apalagi dengan turunnya Q.s. al-Baqarah [2]: 233 maka hadits itu telah dihapus. Kita tidak boleh lagi mengambil hukum atas dasar hadits tadi, kecuali aspek المجاعة.

2. Terma Kedaruratan

Untuk mendudukan *maqashid*, apakah Bank ASI menjadi darurat, hajiyyat, atau tahsinat, ada dua sandaran yang saling menguatkan. Pada tahun 2014, Kementerian Kesehatan menetapkan target cakupan pemberian ASI eksklusif Indonesia sebesar 80%. Kenyataannya, hanya Propinsi Nusa Tenggara Barat yang berhasil melampaui target, yaitu

⁷⁹ Hadits dari Ummu Salamah. Lihat Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abu al-Fadl al-'Asqalaniy al-Hafsi, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Juz IX, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1379H), hlm. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar 84,7%. Selain itu, tidak mencapai target. Bahkan, ada tiga propinsi terbawah capaiannya, yaitu Jawa Barat, Papua Barat, dan Sumatera Utara. Sedangkan Propinsi Riau menempati urutan ke-23 dengan prosentase 55,7.⁸⁰

Jika disandarkan kepada Q.s. Al-Baqarah [2]: 233 seperti telah dituliskan di halaman 7, fakta ini adalah ironi. Bisa jadi penafsiran “hendaklah” itu bukan kewajiban. Padahal, inti dari ayat itu adalah perintah kepada orang tua untuk memenuhi hak ASI anak, apapun kondisinya. Apalagi jika menggunakan *term* pemerintah bahwa ASI eksklusif itu hanyalah enam bulan. Kedaruratan itu tidak hanya pada pendidikan, tetapi juga kesadaran, yang keduanya saling berkelindan.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Desintha Dwi Asriani, mengatakan bahwa cakupan air susu ibu eksklusif di Indonesia baru mencapai 42%. Hal itu masih jauh dari harapan. Dari jumlah kelahiran di Indonesia sekitar 4,7 juta orang per tahun, jumlah bayi yang memperoleh ASI eksklusif selama enam bulan, ternyata tidak mencapai dua juta jiwa. Padahal, WHO pun menargetkan capaian ASI eksklusif itu 50%.

Secara sosiologis, pemerintah hanya memosisikan perempuan sebagai objek demi sebuah program besar yang digagas oleh pemerintah tentang kesejahteraan dan kesehatan. Padahal kenyataannya, ada banyak hal yang perlu dinegosiasikan terutama bagi perempuan yang bekerja. Hal itu antara lain pendeknya masa cuti melahirkan, tidak ada system cuti

⁸⁰ Yudianto dkk., (ed.), *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015), hlm. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusui, terbatasnya waktu istirahat, tidak ada fasilitas ruang laktasi, tidak punya lemari penyimpanan ASI, factor kelelahan, maupun persoalan kulturan, dan malu jika memerah ASI di tempat bekerja.⁸¹

Dengan demikian, selain faktor pendidikan (orang tua) dan “ketidakpercayaan” terhadap perintah Allah, pihak yang berwenang tidak serius menjalankan amanah yang titipkan. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh merasa cukup hanya dengan mengeluarkan aturan dan kebijakan. Lebih dari itu, pemerintah harus menjamin bahwa benih-benih generasi muda Indonesia telah terjaga kesempurnaannya lahir bathin. Itu juga yang seharusnya diemban oleh para ‘alim ‘ulama. Mereka harus berpartisipasi aktif dalam mendakwahkan *radla’ah* sebagai kewajiban orang tua yang harus ditunaikan kepada anak-anaknya.

Pendirian Bank ASI di Indonesia dengan dua sebab utama. *Pertama*, sebagai solusi darurat atas “keengganan” wanita-wanita karir yang tidak siap menjadi ibu. Mungkin juga bagi selain wanita karir, yang pernikahannya dilakukan secara terpaksa. *Kedua*, ASI adalah hak dasar bayi untuk kemaslahatan dan pemeliharaan kesempurnaan. ASI adalah titipan Allah SWT sebagai imun yang tidak tergantikan oleh apapun.

Bayi yang tidak mendapatkan ASI, hidupnya rentan sekali. Kita bisa belajar dari bencana topan Haiyan di Filipina, November 2013. UNICEF dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meminta mereka yang terlibat dalam penanggulangan bencana untuk mempromosikan dan melindungi

⁸¹ Lihat dalam <http://m.bisnis.com/lifestyle/read/20161023/236/594995/cakupan-asi-eksklusif-di-indonesia-baru-42> pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 3:05 pm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian ASI untuk menghindari penyakit dan kematian anak-anak. Setiap bayi yang lahir di daerah yang terkena dampak harus disusui secara eksklusif. Artinya, mereka tidak boleh mengonsumsi apapun kecuali ASI, yang melindungi mereka dari infeksi yang mematikan. Para ibu yang belum memberikan ASI harus didukung untuk transisi ke ASI eksklusif.⁸²

Apa yang mereka lakukan sesuai dengan kaidah *ushul al-fiqh*: “kita harus mencegah setiap kemungkinan terjadinya kejadian darurat. Jika sudah terjadi, segera hilangkan”. Oleh karena itu wajar jika hasil penelitian membuktikan bahwa anak-anak yang di masa bayinya mengonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih kuat daripada anak-anak yang di masa kecilnya tidak menerima asupan ASI.⁸³

⁸⁴ الضرر يزال

Kaidah itu diturunkan dari sabda Rasulullah saw.:

⁸⁵ لا ضرر و لا ضرار من ضار ضاره الله و من شاق شاق الله عليه

Anak adalah generasi penerus yang menjaga kelangsungan hidup dunia. Jika setiap keluarga tidak memiliki anak, maka dunia ini terancam punah. Oleh karena itu, menjaga anak tetap sehat dimana ketika bayinya

⁸² Lihat “ASI adalah Penyelamat Bayi-Bayi di Daerah Darurat Topan Filipina” dalam http://www.unicef.org/indonesia/id/media_21914.htm

⁸³ Abdullah, *Keutamaan ...*, hlm. 30.

⁸⁴ ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadlair al-Syafi’i*, Juz I, (Mesir: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), hlm. 35.

⁸⁵ Hadits ini sahih, memenuhi persyaratan Imam Muslim. Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khadrî r.a. Lihat Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim al-Naisabury, *al-Mustadrak ‘ala al-Shohihain*, Juz II, (Mesir: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberi asupan ASI yang sempurna, hal itu sama dengan telah menjaga jiwa.⁸⁶ Secara psikologis, ibu yang berada dalam keadaan stress, kacau, marah dan sedih, kurangnya dukungan dan perhatian keluarga serta pasangan kepada ibu, kondisi itu ikut mempengaruhi produksi ASI.⁸⁷

Secara sosiologi dan psikologi, kita akan mengalami kesulitan memberikan pemahaman dalam jangka pendek kepada wanita-wanita yang tidak merasa jadi ibu. Mereka adalah wanita yang orientasi hidupnya semata dunia, dimana karir adalah masa depan mereka dan tujuan hidupnya. Mereka bukan berarti tidak bisa diubah, namun diperlukan waktu yang lama, juga intensif, untuk mengembalikan pemahaman bahwa mereka adalah yang dipercaya oleh Allah untuk melanjutkan dan memelihara kehidupan.⁸⁸

Bagaimana mungkin kita menceramahi mereka, sementara dirinya misorientasi. Dikeluarkan ayat 33 dari al-Ahzab⁸⁹ pun, mereka kehilangan makna. Bisa jadi mereka akan balik berkata: “itu untuk istri-istri Rasul, bukan untuk saya, zaman sekarang bukan zaman jahiliyah”. Mereka tidak tahu bahwa Allah sedang memuliakannya, juga menjaganya tetap sempurna. Mereka lebih menerima *term* ‘terkekang’ daripada bangga dengan statusnya sebagai *mar’ah sholihah*. Jadilah wanita itu seperti

⁸⁶ Abu Ishak Ibrahim al-Syathiby, *al-Muwafaqat*, Juz II, (Daar ibn ‘Affan, 1997), hlm. 19–

20

⁸⁷ Lawrence, (2004)

⁸⁸ Para perempuan harus belajar kepada Siti Maryam. Lihat Q.s. Maryam [19]: 16–35.

⁸⁹ Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah lak) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak Menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan Membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jahiliyah, yang lupa shalat, tak mengerti zakat, amnesia bahwa dirinya diciptakan oleh Allah SWT.

Oleh karena itu, untuk “agar tetap di rumah, dan keluar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara”, suami harus menjalin komunikasi secara intensif, bijak, terbuka, dan *islah*.⁹⁰ Suami membuka diri, melakukan identifikasi, termasuk membimbing istrinya supaya mempersiapkan diri. Satu hal penting yang harus dimusyawarahkan adalah pentingnya memelihara diri supaya tidak ada kendala dengan ASI.

Bank Air Susu Ibu (ASI) adalah solusi terakhir. Sebelum itu terjadi, suami harus mengajak istrinya untuk menyamakan persepsi: visi dan misi. Kedua pihak harus bersandar pada kebajikan dan kebijakan, mereka berdua harus bertemu dalam kecerdasan dan persamaan. Untuk mencapai titik itu, dimana kedua belah pihak saling menyadari, butuh waktu yang cukup lama. Jika memang ada masalah dengan karahiman melalui penyusuan, jangan terburu-buru dengan susu formula. Contohnya Rasul kita, tetap mendapatkan ASI meskipun tidak dari ibu kandungnya.

Bagi yang telah jauh tersesat, proses untuk penyadaran tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Sebagaimana bias dan jauhnya ketersesatan mereka, mengembalikannya pun membutuhkan waktu yang lama. Bersabarlah dalam kebahagiaan, dan berbahagialah dalam kesabaran. Dalam menjalani proses itu, suami atau keluarga tidak boleh berjauhan dari sang istri. Suami harus mendampingi istrinya dengan bijak dan sabar.

⁹⁰ Lihat Q.s. al-Nahl [16]: 125 dan Q.s. al-Thalaq [65]: 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian juga dengan wanita-wanita yang menikah terpaksa. Mereka yang dijodohkan oleh orang tuanya, akan dengan mudah lari dari tanggung jawabnya sebagai ibu. Mereka yang menikah karena kecelakaan, mudah sekali mengambil jalan pintas yang secara kesehatan dan agama tidak diperbolehkan. Sementara itu, titipan bayi sudah terlahir ke dunia. Di sinilah prinsip agama terasa bermakna: “tidak ada paksaan dalam beragama”. Insan yang terpelihara sangat tahu mana yang tidak baik untuk dirinya.⁹¹

Secara *ushuly*, kita tahu bahwa ukuran (pemahaman) mereka belum tentu sama dengan ukuran kita. Apa yang kita fahami tentang pentingnya ASI bagi bayi belum tentu dipahami oleh mereka. Kita lah yang harus berupaya untuk meningkatkan pemahaman mereka dengan menurunkan sementara ukuran kita. Setelah bertemu dalam persamaan, pelan-pelan kita kembalikan posisi mereka ke tempat yang seharusnya.

Ketika mereka menikah, konsekuensinya adalah kesediaan dan pertanggung-jawaban atas semua tugas dan bebannya. Mereka harus siap dengan segala kerepotan dan permasalahan. Kalau tidak siap dengan “beban” anak, tidak perlu membuat anak. Jika tidak siap dengan kerepotan berkeluarga, jangan dulu menikah. Maksud sesungguhnya, menikahlah secara *ladies* dan *gentleman* dengan Allah SWT sebagai sandaran abadi.

⁹¹ Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar kepada Thaghut ** dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Q.s. al-Baqarah [2]: 256.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsekuensi sebagai *gentleman*, ia harus menjadi *leader* yang mumpuni. Al-Qur'an menyebut *gentleman* dengan *qawwamun*. Ia adalah suami siap siaga dan berjaga-jaga supaya tidak terjadi apa-apa. Jikapun terjadi, ia telah siap sedia dengan segala solusi. Suami seperti ini akan bermusyawarah bersama istri bagaimana keluarga akan dikelola. Tentu, setelah visi, misi, arah dan orientasinya disepakati, dan diadministrasikan dengan jelas. Jika tidak, istri dengan mudah akan *musyuz* dan lari dari tanggung jawab.⁹²

Oleh karena itu, dengan mudah pula mereka akan lari dari memberikan ASI. Mereka akan berkilah, “sejak dulu saya ucapkan, saya belum siap untuk menikah, belum terbayang untuk berepot-ria dengan ke anak. Sementara, bayi sudah keluar dari rahimnya. Ternyata, ia sendiri tidak paham dengan kerahiman yang dimilikinya. Padahal, air susu ibu adalah penyempurna bayi yang tidak boleh diabaikan oleh ibunya. Setidaknya, oleh makhluk yang memiliki ASI. Demikian pentingnya ASI, Allah mewajibkan suami untuk “membayar istri” dalam hal penyusuan.⁹³

Bank ASI yang didirikan harus profesional dalam pengelolaannya. Mereka harus memenuhi syarat secara kesehatan dan agama, juga tertib secara administrasi. Hal itu untuk menjaga kekacauan dalam kemahraman. Jangan sampai terjadi ada ASI yang tidak jelas dari mana sumbernya. Disamping ada catatan kesehatan dalam kemasan, harus jelas juga siapa yang mendonorkan ASI tersebut. Jika secara administrasi telah rapi dan

⁹² Panduannya ada dalam Q.s. al-Nisa [4]: 34 dan Q.s. al-Thalaq [65]: 6.

⁹³ “Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara ketat dilaksanakan, hal itu akan menjaga dari munculnya ASI yang tak jelas asal-usulnya.

Dengan demikian, tidak ada lagi pernikahan yang kemudian dibatalkan karena datangnya kesaksian dari seorang ibu yang telah menyusui. Pembatalan itu terjadi karena calon pengantin adalah saudara sepersusuan. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبيدُ بْنُ أَبِي مَرْثَمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، - قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لِكُنِّيَ لِحَدِيثِ عُبيدٍ أَحْفَظُ - قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: أَرْضَعُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قَبْلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: «كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، دَعَهَا عَنْكَ» وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، يَحْكِي أَيُّوبُ⁹⁴

UIN SUSKA RIAU

Namun demikian, saya tidak setuju mendirikan Bank ASI jika tidak ada jaminan tentang kualitas ASI yang tersimpan, atau tidak memenuhi

⁹⁴ Hadits no. 5.104 dalam Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulullah saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi*, (Kairo: Daar Thuuq al-Najaat, 1422H), Juz VII, hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan yang ditentukan. ASI yang tersimpan di Bank hanya tahan selama-lamanya 4 bulan. itupun harus disimpan dalam *freezer* khusus dengan suhu yang terkontrol. Petugas di Bank ASI harus melakukan pemeriksaan (*screening*) ibu donor secara ketat dan sangat teliti. Mereka tidak boleh meloloskan Ibu donor yang tidak memenuhi syarat.

Di Negara Barat, pendonor ASI akan mendapatkan bayaran atas ASI yang telah diberikannya. Bahkan, tertulis tarif pembelian ASI untuk ‘membayar’ Ibu donornya. Al-Qur’an memungkinkan hal itu terjadi, seperti disebutkan dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 233. Namun di al-Qur’an sifatnya sukarela berdasarkan prinsip kebaikan dan tolong menolong. Artinya, angka itu muncul dari pihak suami/ayah bayi karena merasa terbantu dengan infaq ASI yang telah diterimanya. Di luar itu, tidak boleh ada ASI yang dipertukarkan dengan prinsip jual beli. Seketika muncul orientasi ASI dengan jual-beli, maka kualitas ASI tidak akan terjamin lagi.

Bank ASI tidak boleh didirikan tanpa koordinasi dengan pemerintah dan lembaga alim ulama. Hal itu penting untuk menjamin bahwa Bank ASI menjadi solusi. Jika tidak dikelola secara professional, termasuk dalam pencatatan dan prinsip-prinsip administrasi, Bank ASI akan menjadi media terjadinya keharaman dan kemadlaratan yang lebih besar.

Oleh karena itu, sebaiknya kita menjadikan Rasul kita Muhammad SAW sebagai panduan, secara mutlak. Sebelum ke Bank ASI, ibu-ibu atau orang tua yang mengalami kendala dalam menunaikan kewajiban ASI kepada bayinya, lakukan silaturahmi untuk mencari solusi terbaik. Jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa dengan ibu susuan, seperti Rasulullah dahulu pernah alami, tunaikan hak ASI anak melalui hubungan persaudaraan.

9.Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang ASI

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia selalu identik dengan Fatwa. Majelis Ulama Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M oleh Musyawarah Nasional I Majelis Ulama se-Indonesia di Jakarta adalah wadah musyawarah ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim. Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniyah serta jasmaniah yang diridhai Allah Swt dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berdirinya MUI pada tahun 1975, MUI telah berperan sebagai pemberi fatwa bagi masyarakat yang membutuhkan. Permintaan fatwa dapat berasal dari *ulil amri* (pemerintah), dapat juga dari masyarakat luas. Permasalahan yang sering muncul untuk dimintakan fatwanya ke MUI pun sangat beragam, mulai dari masalah keseharian yang berkaitan dengan urusan pribadi hingga masalah kebijakan yang terkait dengan urusan publik. Dalam hal ini mulai dari masalah ibadah sampai masalah sosial politik dan sosial kemasyarakatan, mulai dari masalah halal dan haramnya makanan hingga masalah kedokteran serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja keseluruhan berelasi dengan masalah-masalah keagamaan.

Semua Fatwa-fatwa tersebut ternyata tidak hanya dibutuhkan oleh si penanya saja. Melainkan juga dicari oleh masyarakat sebagai panduan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

acuan serta pedoman dalam kehidupan keseharian. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka MUI selalu membuat fatwa-fatwa sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti perkembangan zaman.

Pada tahun 2013 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 28 Tahun 2013 yang mengatur tentang seputar masalah donor air susu ibu (*Istirdha*) dengan berbagai pertimbangan yang ada di masyarakat. Dimana dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah masyarakat ada aktivitas berbagi air susu ibu (ASI) untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh ASI dari ibunya sendiri. Dalam hal ini baik disebabkan oleh kekurangan suplai ASI dari ibu kandungnya, ibunya sudah meninggal, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak.

Adapun yang menjadi dasar dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait masalah pemberian donor ASI, karena di tengah masyarakat sudah muncul pertanyaan mengenai ketentuan agama mengenai masalah tersebut di atas serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah keagamaan sebagai akibat dari aktivitas dari masyarakat.

Di dalam ajaran agama islam sudah jelas bahwa anjuran untuk memberikan ASI pada anak-anaknya yaitu selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah Swt Q.S : Al-Baqarah (2) : 233). Itulah salah satu dasar sebagai dalil oleh MUI untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah donor air susu ibu (*istirdha*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun isi dari fatwa MUI tentang seputar masalah donor Air Susu Ibu (ASI) yaitu :

Ketentuan Umum :

1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan *syar'i*.
2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental.
 - b. Ibu tidak sedang hamil.
3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radha* (persusuan).
4. Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi delapan kelompok sebagai berikut :
 - a. *Ushul asy-syakhsi* (pangkal atau induk keturunan seseorang), yaitu : ibu susuan (donor ASI) dan ibu dari ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, buyut, dst).
 - b. *Al-furu' min ar-radha* (keturunan dari anak susuan), yaitu anak susuan itu sendiri, kemudian anak dari anak susuan tersebut terus ke bawah (cucu, cicit dst).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Furu' al-abawayni min ar-radha'* (keturunan dari orangtua susuan), yaitu anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut terus ke bawah (cucu dan cicit).
- d. *Al-furu' al-mubasyirah min al-jaddi wa al-jaddati min ar-radha'* (keturunan dari kakek dan nenek sesuan), yaitu bibi sesuan yang merupakan saudara kandung dari suami ibu donor ASI dan bibi sesuan yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASI. Adapun anak-anak mereka tidaklah menjadi mahram sebagaimana anak paman/bibi dari garis keturunan.
- e. *Ummu az- Zawjah wa Jaddatiha min ar-radha'* (ibu sesuan dari istri dan nenek moyangnya), yaitu : ibu susuan (pendonor ASI) dari istri, kemudian ibu dari ibu susuan istri sampai ke atas (nenek moyang).
- f. *Zawjatu al-abi wa al-jaddi min ar-radha'* (istri dari bapak sesuan dan kakek moyangnya), yaitu istri dari suami ibu pendonor ASI (istri kedua, ketiga atau keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri kedua, ketiga, atau keempat dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya).
- g. *Zawjatu al-ibni wa ibni al-ibni wa ibni al-binti min ar-radha'* (istri dari anak sesuan dan istri dari cucu sesuan serta anak laki-laki dari anak perempuan sesuan), yaitu : istri dari anak sesuan kemudian istri dari cucu sesuan (istri dari anaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak sesusuan) dan seterusnya sampai ke bawah (cicit, dst).
Demikian pula istri dari anak laki dari anak perempuan sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit, dst).

- h. *Bintu az-zawjah min ar-radha' wa banatu awladiha* (anak perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari istri), yaitu: anak perempuan susuan dari istri (apabila istri memberikan donor ASI kepada seseorang anak perempuan, maka apabila suami dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri (senggama) maka anak perempuan susuan istri tersebut menjadi *mahram*, tetapi bila suami tersebut belum melakukan senggama maka anak perempuan susuan istrinya tidak menjadi *mahram*).
Demikian pula anak perempuan dari anak laki-lakinya anak perempuan susuan istri tersebut sampai ke bawah (cicit dan seterusnya).
5. Terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radha'* (persusuan) jika :
 - a. Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.
 - b. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.
 - c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.
 - d. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.
6. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.
7. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.
8. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) *ujrah* (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.⁹⁵

B. Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai banyak pemahaman teoretis. Harold Laswell dan Abraham Kaplan⁹⁶ mendefinisikannya sebagai *suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (a projected program of goals, values, and practices)*. David Easton⁹⁷ mendefinisikannya sebagai *akibat dari aktivitas pemerintah (the impact of government activity)*. James Anderson⁹⁸ mendefinisikannya sebagai *a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*.

⁹⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia bidang sosial dan budaya*, (Jakarta : Emir, 2015), hlm. 423

⁹⁶ Laswell dan Kaplan *Power and Society* (1970), hlm. 71

⁹⁷ Easton *A System Analysis of Political Life* (1965), hlm. 212

⁹⁸ Anderson *Public Policy Making* (2000), hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

James Lester dan Robert Steward⁹⁹ mendefinisikannya sebagai *a process or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined*. Austin Steven A. Peterson¹⁰⁰ mendefinisikannya sebagai *government action to address some problem*. B. G. Peters¹⁰¹ mendefinisikannya sebagai *the sum of government activities, wether acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens*.

Michael Howlett dan M. Ramesh mengemukakan bahwa *public policy is a complex phenomenon consisting of numerous decisions made by numerous individual and organizations. It is often shaped by earlier policies and is frequently linked closely with other seemingly unrelated decisions*¹⁰². Thomas R Dye mendefinisikannya sebagai *segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (what government do, why they do it, and what difference it makes)*.¹⁰³

Dari pemahaman teoretis tersebut, kita dapat merumuskan definisi sebagai berikut :

“kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.”

Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor

⁹⁹ Lester dan Steward *Public Policy: an Evolutionary Approach* (2000), hlm. 18

¹⁰⁰ Peterson “Public Policy” dalam Jack Rabin (2003) *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy* (2003), hlm. 1030

¹⁰¹ Peters *American Public Policy* (1993), hlm. 4

¹⁰² Howlett & Rames *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem* (1995), hlm. 7

¹⁰³ Thomas R Dye *Undersyanding Public Policy* (1995), hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain.

Meskipun terdapat ruang bagi win-win solution dimana sebuah tuntutan dapat diakomodasi, namun pada akhirnya ruang bagi win-win solution sangat terbatas, sehingga kebijakan publik lebih banyak pada ranah zero-sum-game, yaitu menerima yang ini, dan menolak yang lain.

Dalam pemahaman ini, istilah keputusan termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” isu terkait. Dengan demikian, pemahaman di sini mengacu kepada pemahaman Dye, bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

2. Teori-teori Kebijakan Publik

a. Teori Proses Kebijakan

Seperti dipelajari dalam ilmu politik, sistem politik terdiri dari input, throughput, dan output. Kebijakan publik berada dalam sistem politik dengan mengandalkan kepada masukan (input) yang terdiri dari dua hal yaitu tuntutan dan dukungan.

Namun demikian, terdapat satu pola yang sama, bahwa model formal dari proses kebijakan adalah dari gagasan kebijakan, formalisasi dan legalisasi kebijakan, implementasi, baru kemudian menuju kepada kinerja atau mencapai prestasi yang diharapkan – yang didapatkan setelah dilakukan evaluasi kinerja kebijakan.

Kebijakan publik mempunyai proses saling mengembangkan dalam bentuk kontribusi *value* antar sub-sistem. *Value* yang dikreasikan pada tahap perumusan menyumbangkan pada tahap implementasi. *Value* yang dikreasikan pada tahap implementasi menyumbangkan kepada tahap kinerja kebijakan. *Value* yang dikreasikan di lingkungan kebijakan menyumbangkan kepada setiap tahap, baik

perumusan, implementasi, maupun kinerja. Pendekatan *value creation* ini merupakan pendekatan manajemen dalam proses kebijakan publik. Keberhasilan pada masing-masing tahap akan mengontribusikan keberhasilan pada tahapan selanjutnya; demikian pula kegagalan pada masing-masing tahap akan mengontribusikan kegagalan pada tahapan selanjutnya. Keberhasilan inilah yang disebut sebagai *value creation* yang merupakan modal penting bagi tahapan selanjutnya.

b. Teori-teori Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan adalah pijakan awal dalam kebijakan publik. Dalam khasanah teori perumusan kebijakan, dikenal setidaknya tiga belas jenis perumusan kebijakan, yaitu :

1. Teori Kelembagaan

Formulasi kebijakan dari teori kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Jadi, apa pun yang dibuat pemerintah dengan cara apa pun adalah kebijakan publik. Ini adalah teori yang paling sempit dan sederhana dalam formulasi kebijakan publik. Teori ini mendasar kepada fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah, di setiap sektor dan tingkat, dalam formulasi kebijakan. Disebutkan Dye, ada tiga hal yang membenarkan pendekatan ini, yaitu bahwa pemerintah memang sah membuat kebijakan publik, fungsi tersebut bersifat universal, dan memang pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan (koersi) dalam kehidupan bersama.

Teori kelembagaan sebenarnya merupakan derivasi dari ilmu politik tradisional yang lebih menekankan struktur daripada proses atau perilaku politik. Prosesnya mengandaikan bahwa tugas formulasi kebijakan adalah tugas lembaga-lembaga pemerintah yang dilakukan secara otonom tanpa berinteraksi dengan lingkungannya. Salah satu kelemahan dari pendekatan ini adalah terabaikannya masalah-masalah lingkungan tempat kebijakan itu diterapkan.

2. Teori Proses

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam teori ini, para pengikutnya menerima asumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses.

3. Teori Kelompok

Teori pengambilan kebijakan teori kelompok mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan (equilibrium). Inti gagasannya adalah interaksi dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan, dan keseimbangan adalah yang terbaik. Di sini individu dalam kelompok-kelompok kepentingan berinteraksi secara formal maupun informal, secara langsung atau melalui media massa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik yang diperlukan. Di sini peran dari sistem politik adalah untuk manajemen konflik yang muncul dari adanya perbedaan tuntutan, melalui :

- a. Merumuskan aturan main antar kelompok kepentingan
- b. Menata kompromi dan menyeimbangkan kepentingan
- c. Memungkinkan terbentuknya kompromi dalam kebijakan publik (yang akan dibuat)
- d. Memperkuat kompromi-kompromi tersebut

Teori kelompok merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang di dalamnya beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk memengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif.

4. Teori Elit

Teori elit berkembang dari teori politik elit-massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan atau elit dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Teori ini mengembangkan diri kepada kenyataan bahwa sedemokratis apapun, selalu ada bias dalam formulasi kebijakan, karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elit.

Ada dua penilaian dalam pendekatan ini, negatif dan positif. Pada pandangan negatif dikemukakan bahwa pada akhirnya dalam sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik, pemegang kekuasaan politiklah yang akan menyelenggarakan kekuasaan sesuai dengan selera dan keinginannya. Dalam konteks ini, rakyat dianggap sebagai kelompok yang sengaja dimanipulasi sedemikian rupa agar tidak masuk dalam proses formulasi kebijakan. Pemilihan umum pun bukan bermakna partisipasi melainkan mobilisasi.

Pandangan positif melihat bahwa seorang elit menduduki puncak kekuasaan karena berhasil memenangkan gagasan membawa negara-bangsa ke kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Pemimpin pasti mempunyai visi tentang kepemimpinannya, dan kebijakan publik adalah bagian dari karyanya untuk mewujudkan visi tersebut menjadi kenyataan. Soekarno memilih politik sebagai panglima sementara Soeharto memilih ekonomi sebagai panglima. Tidak ada yang secara mutlak keliru, ini hanya masalah preferensi dari visi setiap elit serta tentang bagaimana tujuan atau cita-cita bangsa yang sudah disepakati akan dijalani melalui jalur yang diyakininya.

Prosesnya, elit secara top down membuat kebijakan publik untuk diimplementasikan oleh administrator publik kepada rakyat banyak. Pendekatan ini dapat dikaitkan dengan paradigma pemisahan antara politik dengan administrasi publik yang diikonkan dalam konstanta Woodrow Wilson, *where politics end, administrations begin*.

Jadi teori elit merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang kebijakan publiknya merupakan perspektif elit politik. Prinsip dasarnya adalah karena setiap elit politik ingin mempertahankan status quo maka kebijakannya menjadi bersifat konservatif. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para elit politik tidaklah berarti selalu mementingkan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah kelemahan-kelemahan dari teori elit.

5. Teori Rasionalisme

Teori ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maximum social gain, yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberi manfaat optimum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi masyarakat. Teori ini dikembangkan dari teori cost-benefit analysis, sebuah teori yang diawali di US Corps and Engines tahun 1930-an dalam rangka membangun bendungan dan jembatan. Tidak dipungkiri, teori ini adalah teori yang paling banyak diikuti dalam praktik formulasi kebijakan publik di seluruh dunia.

Teori ini mengatakan bahwa proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, teori ini lebih menekankan pada aspek efisiensi atau aspek ekonomis.

Cara-cara formulasi kebijakan disusun dalam urutan :

- a. Mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya
- b. Menemukan pilihan-pilihan
- c. Menilai konsekuensi masing-masing pilihan
- d. Menilai rasio nilai sosial yang dikorbankan
- e. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien

Apabila dirunut, kebijakan ini merupakan teori ideal dalam formulasi kebijakan, dalam arti mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas kebijakan. Studi-studi kebijakan biasanya memberikan fokus pada tingkat efisiensi dan keefektifan kebijakan.

Namun demikian, kebijakan ini mempunyai beberapa kelemahan pokok, yakni konsep maximum social gain berbeda-beda di antara kelompok kepentingan,

Kedua, sangat sulit dicapai kebijakan yang maximum social gain mengingat patologi birokrasi yang cenderung melayani diri sendiri daripada melayani publik.

Kenyataan ini sulit diingkari mengingat pegawai negeri adalah institusi yang kurang memberikan insentif yang memadai, sehingga menciptakan kecenderungan korupsi, termasuk mengorupsi kebijakan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, idealisme dari teori rasional ini perlu diperkuat dan ditingkatkan, karena di sepanjang sejarah kenegaraan, selalu ada negarawan-negarawan dan birokrat-birokrat profesional yang mengabdikan diri secara tulus kepada kemajuan bangsanya daripada sekedar mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu, teori rasional ini perlu menjadi kajian dalam proses formulasi kebijakan.

Teori rasional ini juga dikenal dengan teori “rasional komprehensif (RK)”. Unsur-unsur dalam teori RK ini tidak jauh berbeda dengan rasioanl, yaitu :

- a. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain, atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain.
- b. Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang memedomani pembuat keputusan amat jelas dan dapat diterapkan rankingnya sesuai dengan urutan kepentingannya
- c. Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama
- d. Akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih diteliti
- e. Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif lainnya
- f. Pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya, yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai, atau sasaran yang digariskan.

Pada akhirnya, teori ini berhadapan dengan kritikan bahwa para pengambil keputusan tidak mampu merumuskan masalah itu sendiri, sehingga kebijakannya justru tidak rasional.

Herbert Simon menemukan bahwa dalam keputusan administrasi, rasionalitas sebenarnya tidaklah ada; yang ada adalah bounded

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rationality¹⁰⁴ karena rasionalitas tergantung kepada manusianya, dan rasionalitas manusia ditetapkan oleh irasionalitas yang ada di belakang rasionalitasnya. Pada praktiknya mengambil keputusan acap kali tidak mempunyai cukup kecakapan untuk melakukan syarat-syarat dari teori ini, mulai dari analisis, penyajian alternatif, memperbandingkan alternatif, hingga penggunaan teknik-teknik analisis komputer yang paling maju untuk menghitung rasio untung-rugi. Rasionalisme menjadi irasionalisme yang dijustifikasi, baik secara ilmiah maupun secara kekuasaan, sebagai rasionalisme.

6. Teori Inkrementalis

Teori inkrementalis pada dasarnya merupakan kritik terhadap teori rasional. Dikatakannya, para pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang disyaratkan oleh pendekatan rasional karena mereka tidak memiliki cukup waktu, intelektual, maupun biaya, ada kekhawatiran akan munculnya dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya, adanya hasil-hasil dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan, dan menghindari konflik.

Teori ini melihat bahwa kebijakan publik merupakan variasi ataupun kelanjutan dari kebijakan di masa lalu. Teori ini dapat dikatakan sebagai teori pragmatis/praktis. Pendekatan ini diambil ketika pengambil kebijakan berhadapan dengan keterbatasan waktu, ketersediaan informasi, dan kecukupan dana untuk melakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif. Pengambil kebijakan dihadapkan pada ketidakpastian yang muncul di sekelilingnya. Pilihannya adalah melanjutkan kebijakan di masa lalu dengan beberapa modifikasi seperlunya. Pilihan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah yang berada di lingkungan masyarakat yang pluralistik, yang membuatnya tidak mungkin membuat kebijakan baru yang dapat memuaskan seluruh warga.

¹⁰⁴ Simon, *The Administrative Behavior*, (1945)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inti kebijakan inkrementalis adalah berusaha mempertahankan komitmen kebijakan di masa lalu untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai.

7. Teori Pengamatan Terpadu (Mixed-Scanning)

Teori ini merupakan upaya menggabungkan antara teori rasional dengan teori inkrementalis. Inisiatornya adalah pakar sosiologi organisasi, Amitai Etzioni tahun 1967. Ia memperkenalkan teori ini sebagai suatu pendekatan terhadap formulasi keputusan-keputusan pokok dan inkremental, menetapkan proses-proses formulasi kebijakan pokok dan urusan tinggi yang menentukan petunjuk-petunjuk dasar, proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok, dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai. Teori ini ibaratnya pendekatan dengan dua kamera: kamera dengan wide angle untuk melihat keseluruhan, dan kamera dengan zoom untuk melihat detailnya.

Pada dasarnya teori ini adalah teori yang amat menyederhanakan masalah. Etzioni pun hanya memperkenalkan dalam sebuah papernya dalam *Public Administration Review* Desember 1967 dengan judul “*Mixed Scanning: A Third Approach to Decisions Making*”. Namun harus diakui, di Indonesia teori ini disukai karena merupakan teori kompromi, meski tidak efektif.

8. Teori Demokratis

Beberapa pengajar di Indonesia belakangan ini sering mengelaborasi sebuah teori yang berintikan bahwa pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi suara dari stakeholders. Teori ini dapat dikatakan sebagai teori demokratis karena menghendaki agar setiap pemilik hak demokrasi diikuti-sertakan sebanyak-banyaknya.

Teori ini berkembang khususnya di negara-negara yang baru saja mengalami transisi ke demokrasi, seperti Indonesia. Gambaran sederhananya dapat diandaikan dalam sebuah proses pengambilan keputusan demokratis dalam teori politik. Teori ini biasanya dikaitkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan implementasi good governance bagi pemerintahan yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan, para konstituen dan pemanfaat diakomodasi keberadaannya.

Teori yang dekat dengan teori pilihan publik ini baik, namun kurang efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang kritis, darurat, dan dalam kelangkaan sumber daya. Namun, jika dapat dilaksanakan teori ini sangat efektif dalam implementasinya, karena setiap pihak mempunyai kewajiban untuk ikut serta mencapai keberhasilan kebijakan, karena setiap pihak bertanggung jawab atas kebijakan yang dirumuskan.

9. Teori Strategis

Meskipun disebut strategis, pendekatan ini tidak mengatakan bahwa pendekatan lain tidak strategis. Intinya adalah bahwa pendekatan ini menggunakan rumusan tuntutan perumusan strategi sebagai basis perumusan kebijakan. Salah satu yang banyak dirujuk adalah John D. Bryson, seorang pakar perumusan strategis bagi organisasi-organisasi non-bisnis.

Bryson mengutip Olsen dan Eadie untuk merumuskan makna perencanaan strategis, yaitu upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memadu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. Perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternatif, dan menekankan implikasi masa depan dengan keputusan sekarang.

Perencanaan strategis lebih memfokuskan kepada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu, lebih menekankan kepada penilaian terhadap lingkungan di luar dan di dalam organisasi, dan berorientasi pada tindakan. Perencanaan strategis dapat membantu organisasi untuk :

- a. Berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memperjelas arah masa depan
- c. Menciptakan prioritas
- d. Membuat keputusan sekarang dengan mengikat konsekuensi masa depan
- e. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi formulasi keputusan
- f. Menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada di bawah
- g. Kontrol organisasi
- h. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi
- i. Memecahkan masalah utama organisasi
- j. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif
- k. Membangun kerja kelompok dan keahlian

Proses perumusan strategis sendiri disusun dalam langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis, yang meliputi kegiatan
- b. Memahami manfaat proses perencanaan strategis, mengembangkan kesepakatan awal
- c. Merumuskan panduan proses
- d. Memperjelas mandat dan misi organisasi, yang meliputi kegiatan perumusan misi dan mandat organisasi
- e. Menilai kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. Proses ini melibatkan kegiatan perumusan hasil kebijakan yang diinginkan, manfaat-manfaat kebijakan, analisis SWOT (penilaian lingkungan eksternal dan internal), proses penilaian, dan panduan proses penilaian itu sendiri
- f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. Proses ini melibatkan kegiatan-kegiatan merumuskan hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan manfaat yang diinginkan dari kebijakan, merumuskan contoh-contoh isu strategis, mendeskripsikan isu-isu strategis

g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu

Teori ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai salah satu derivat manajemen dari teori rasional karena mengandaikan bahwa proses perumusan kebijakan adalah proses rasional, dengan perbedaan bahwa teori ini lebih fokus pada rincian-rincian langkah manajemen.

10. Teori Permainan

Teori seperti ini biasanya di cap sebagai teori konspiratif. Teori permainan ini sudah mulai mengemuka setelah berbagai pendekatan yang sangat rasional tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang sulit diterangkan dengan fakta-fakta yang tersedia, karena sebagian besar dari kepingan fakta tersebut tersembunyi erat.

Gagasan pokok dari kebijakan dalam teori permainan adalah, *pertama* formulasi kebijakan berada dalam situasi kompetisi yang intensif, *kedua* para aktor berada dalam situasi pilihan yang tidak independen ke dependen melainkan situasi pilihan yang sama-sama bebas atau independen. Sama seperti sebuah permainan catur, setiap langkah akan bertemu dengan kombinasi langkah lanjut dan langkah balasan yang masing-masing relatif bebas.

Teori permainan adalah teori yang sangat abstrak dan dedutif dalam formulasi kebijakan. Teori ini mendasar pada formulasi kebijakan yang rasional, namun dalam kondisi kompetisi yang tingkat keberhasilan kebijakannya tidak lagi hanya ditentukan oleh aktor pembuat kebijakan, namun juga aktor-aktor lain.

Konsep kunci dari teori permainan adalah strategi, yang konsep kuncinya bukanlah yang paling optimum namun yang paling aman dari serangan lawan. Jadi, di dasarnya konsep ini mempunyai tingkat konservativitas yang tinggi, karena pada intinya adalah strategi defensif. Pendekatan teori permainan ini dapat pula dikembangkan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategi ofensif terlebih apabila yang bersangkutan berada dalam posisi superior.

Inti dari teori permainan yang terpenting adalah bahwa ia mengakomodasi kenyataan yang paling riil, bahwa setiap negara, setiap pemerintahan, setiap masyarakat tidak hidup dalam vakum. Ketika kita mengambil keputusan lingkungan tidak pasif, melainkan membuat keputusan bisa menurunkan keefektifan keputusan kita. Di sini teori permainan memberi kontribusi yang paling optimal.

11. Teori Pilihan Publik

Teori kebijakan ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Akar kebijakan ini sendiri berakar dari teori ekonomi pilihan publik (economic of public choice) yang mengandaikan bahwa manusia adalah homo economicus yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipuaskan. Prinsipnya adalah *buyer meet seller*; *supply meet demand*.

Pada intinya, setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus merupakan pilihan dari publik yang menjadi pengguna. Proses formulasi kebijakan publik dengan demikian melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan. Secara umum, ini adalah konsep formulasi kebijakan publik yang paling demokratis karena memberi ruang luas kepada publik untuk mengontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan. Sebuah pemikiran yang dilandasi gagasan John Locke bahwa pemerintah adalah sebuah lembaga yang muncul dari kontrak sosial di antara individu-individu warga masyarakat.

Teori ini membantu untuk menjelaskan, kenapa para pemenang pemilu acap kali gagal memberikan yang terbaik kepada masyarakat karena mereka lebih berkepentingan kepada publiknya yaitu para pemberi suara atau pendukungnya. Teori ini juga membantu kita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami kenapa kebijakan-kebijakan publik tempatnya selalu di tengah-tengah dari kebijakan yang liberal maupun yang konservatif.

Teori kebijakan publik, meski ideal dalam konteks demokrasi dan kontrak sosial, namun memiliki kelemahan pokok dalam realitas interaksi itu sendiri, karena interaksi akan terbatas pada publik yang mempunyai akses, dan di sisi lain terdapat kecenderungan dari pemerintah untuk memuaskan pemilihnya daripada masyarakat luas. Tidak jarang kita melihat kebijakan publik yang seakan-akan adil namun apabila dikaji, ia hanya menguntungkan sejumlah kecil warga atau kelompok saja. Misalnya, konsep perdagangan bebas adalah konsep yang adil, namun keadilan itu akan lenyap apabila diterapkan dalam keadaan di mana terjadi kesenjangan antara sebagian masyarakat yang sudah kompeten dan yang jauh dari kompeten. Seperti membuat jalan tol, yang memiliki mobil hanya 10% dari populasi, dan 90% sisanya bersepeda motor, bersepeda angin dan berjalan kaki. Teori ini sesuai, namun ada ceteris paribusnya, yaitu apabila sudah tercapai kondisi kesetaraan di antara masyarakat.

12. Teori Sistem

Pendekatan ini pertama kali oleh David Easton yang melakukan analogi dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam terminologi ini Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Dalam pendekatan ini dikenal tiga komponen: input, proses, dan output. Salah satu kelemahan dari pendekatan ini adalah terpusatnya perhatian pada tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah, dan pada akhirnya kita kehilangan perhatian pada apa yang tidak pernah dilakukan pemerintah.

Jadi, formulasi kebijakan publik dengan teori sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem (politik).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori ini merupakan teori yang paling sederhana namun cukup komprehensif meski tidak memadai lagi untuk dipergunakan sebagai landasan pengambilan keputusan atau formulasi kebijakan publik.

13. Teori Deliberatif

Teori ini dikembangkan oleh Maarten Hajer dan Henderik Wagenaar (2003) dengan mengembangkan konsep dari Frank Fisher dan John Forester yang menulis *The argumentative turn in policy analysis and planning* (1993). Istilah lain yang digunakan adalah collaborative policy making. proses analisis kebijakan publik teori musyawarah ini jauh berbeda dengan teori-teori teknokratik, karena peran dari analisis kebijakan hanya sebagai fasilitator agar masyarakat menemukan sendiri keputusan kebijakan atas dirinya sendiri.

Peran pemerintah disini lebih sebagai legalisator dari kehendak publik. Sementara peran analisis kebijakan adalah sebagai prosesor proses dialog publik agar menghasilkan keputusan publik untuk dijadikan sebagai kebijakan publik.

Mengapa publik perlu dilibatkan ? Tanpa publik, proses kebijakan akan kering dan sangat berbau teknokratis. Analisis kebijakan adalah teknokrat sosial, yang seharusnya belajar dari rekannya, teknokrat ilmu alam, yang menjadi korban keserakahan kekuasaan politik.

3. Politik dan Kebijakan Publik

Politik pada awalnya berasal dari kata Yunani *Politeia* dan diperkenalkan pertama kali oleh Plato (347SM) dengan makna hal ihwal mengenai negara dan dikembangkan oleh muridnya Aristoteles (322SM) yang memahami politik sebagai seni mengatur dan mengurus negara. ini merupakan makna pertama tentang politik. di sini politik kemudian dipahami sebagai kegiatan suatu sistem politik atau negara untuk mencapai tujuan bersama. Pemahaman ini menjadi pemahaman yang paling universal, termasuk diantaranya untuk memahami kebijakan-kebijakan tertentu sebagai upaya merealisasikan tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Salah satu bentuk derivatnya adalah munculnya istilah politik pembangunan, politik pendidikan, dan seterusnya.¹⁰⁵

Politik yang diperkenalkan oleh masyarakat Yunani Kuno lenyap setelah mereka dikalahkan oleh Sparta, dan kemudian terjadi perang antar bangsa selama ratusan tahun, dan muncul tradisi perebutan kekuasaan di dalam negara. Pada saat tersebut, politik dipahami sebagai perjuangan memperebutkan termasuk mempertahankan kekuasaan. Pada puncaknya, terdapat pemikiran-pemikiran jenius dari Niccolo Machiavelli (1469-1498) yang merupakan sebuah ajaran yang lengkap tentang bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang paling mungkin, kalau perlu dengan cara yang jahat. Machiavelli dengan tajam menemukan dua pertanyaan pokok dalam kehidupan setiap sistem politik : mana yang lebih baik, pimpinan yang baik atau sistem hukum yang baik? Pada masa di mana tindakan politik terpisah dengan kerangka moral, maka pilihannya adalah pimpinan.

Para praktisi politik berebut mendapatkan kekuasaan, dan kemudian mempertahankan selama mungkin. Pada saat inilah berkembang pemahaman politik sebagai the struggle for power. Pemahaman kedua ini banyak dipergunakan untuk memahami perilaku animalis dari para elit politik, dibandingkan pemahaman pertama yang melihat politik sebagai sebuah proses menuju tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Politik mempunyai dua sisi. Pertama, makna mencapai tujuan bersama dalam praktiknya, tujuan bersama itu dirumuskan oleh elit politik yang sering disebut sebagai founding father, yang dengan kebijaksanaannya merumuskan tujuan bersama yang dinilai tepat untuk bangsanya. Pada setiap negara tujuan tersebut biasanya dirumuskan pada konstitusi masing-masing. Proses perumusan tersebut tidak dapat

¹⁰⁵ BN Marbun, *Kamus Politik* (2002), hlm. 445

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipisahkan dari kepentingan nilai dari para perumus, baik dalam arti nilai yang ideal, teoretikal, maupun praktikal.

Politik sebagai *struggle for power* juga perlu dipahami sebagai sebuah proses persaingan politik demokratis yang bisa bersifat tidak sehat, misalnya melalui cara-cara yang tidak dapat dibenarkan secara moral hingga secara hukum, namun juga dapat dilihat sebagai cara yang sehat, seperti proses pemilihan umum yang dijalankan secara jujur dan terbuka, baik langsung atau tidak langsung.

Dengan demikian, secara keilmuan politik merupakan sebuah fakta yang diturunkan dari prinsip utama, yaitu etika politik, sebagai pembimbing gagasan politik. Politik sebagai kekuasaan dipergunakan untuk mewujudkan gagasan politik kesejahteraan rakyat. Namun demikian, ancamannya adalah jika etika politik itu dikalahkan oleh dominasi hasrat kekuasaan, sehingga tujuan akhir yang hendak diwujudkan adalah kekuasaan itu sendiri, dan bukan tujuan dari kekuasaan. Dengan bahasa lain, dapat dipahami bahwa tujuan kekuasaan (politik) adalah kekuasaan itu sendiri, dan kekuasaan (politik) tidak lagi menjadi cara untuk mencapai tujuan politik itu sendiri.

C. Politik Hukum Di Indonesia

1. Definisi Politik Hukum

Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁰⁶

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.¹⁰⁷ Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.¹⁰⁸ Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu persyaratan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.¹⁰⁹

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu, 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk

¹⁰⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), hlm. 1

¹⁰⁷ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet. II, Hlm. 160

¹⁰⁸ Padmo Wahjono, "Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan", dalam majalah *Forum Keadilan*, No. 29, April 1991, hlm. 65

¹⁰⁹ Teuku Mohammad Radhie, "Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional", dalam majalah *Prisma* No. 6 Tahun II, Desember 1973, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai tujuan tersebut dengan baik.¹¹⁰ Mantan ketua perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹¹¹ Pada tahun 1986, Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.¹¹²

2. Kedudukan Politik Hukum

Politik hukum nasional harus dapat mendorong dan mengisi semua unsur di dalam sistem hukum nasional agar bekerja sesuai dengan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan kaidah penentuan hukum di negara Republik Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.¹¹³

Mahfud MD mengemukakan beberapa ahli yang pernah mengemukakan definisi politik hukum sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Teuku Muhammad Radhi, mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet. III, hlm. 35-353

¹¹¹ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20

¹¹² Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 151

¹¹³ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP-ES, 2006), hlm. 13

¹¹⁴ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP-ES, 2006), hlm. 13-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

- b. Padmo Wahyono, mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.
- c. Soedarto, mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
- d. Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih cara yang hendak dipakai untuk menciptakan suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan pertanyaan: 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 2) cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.
- e. Sunaryati Hartono, mengemukakan bahwa hukum sebagai alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengemukakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu yang meliputi: 1) pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; 2) pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum yang baru; 3) penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya; dan 4) peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan.

Dari definisi-definisi tersebut, politik hukum membahas beberapa hal pokok, yaitu :

1. Tujuan negara
2. Sistem hukum
3. Pembentukan hukum
4. Pembaruan hukum
5. Keselarasan antara tujuan negara, sistem hukum, pembentukan, dan pembaruan hukum.

Atas dasar pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa politik hukum merupakan aktivitas yang menentukan pola atau cara membentuk hukum, mengawasi bekerjanya hukum, dan memperbaiki hukum untuk mencapai tujuan negara. Pengelolaan keuangan daerah dalam tinjauan politik hukum diarahkan untuk terciptanya tata kelola yang baik atau *good financial governance* yang mengharuskan berfungsinya seluruh unsur dalam sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah harus diletakkan pada pelaksanaan semua aturan hukum keuangan daerah, serta pelaksanaan visi, misi, dan program pembangunan pemerintah daerah baik Rencana Kerja Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RKPD), Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Politik hukum menentukan arah pembangunan hukum di Indonesia, jika arah pembangunan hukum diletakkan di atas dasar dan landasan yang kuat, hukum akan memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat. Kebijakan pembangunan hukum nasional selaras dengan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia yang adil dan sejahtera. Kita contohkan masalah pengelolaan keuangan daerah memiliki makna yang sangat penting dalam tujuan yang sama untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Uang negara/uang daerah adalah milik rakyat yang harus digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Hukum pengelolaan keuangan daerah harus diciptakan untuk menata hubungan antara pejabat pengelola keuangan, pejabat pengguna anggaran, pejabat penanggung jawab keuangan dan *stakeholders* yang memiliki hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka menatakelolakan keuangan daerah yang tertib sehingga dari sisi *output*, *outcome*, dan *benefit* keuangan daerah tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk rakyat.¹¹⁵

¹¹⁵ Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap II yang termuat dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 menetapkan bahwa pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang berkualitas tercipta sejak manusia berada di dalam kandungan ibunya. Salah satu faktor kesehatan yang sangat penting bagi ibu hamil adalah pemberian gizi yang baik bagi ibu dan bayi yang dikandungnya, karena status gizi ibu akan mempengaruhi status gizi bayi di dalam kandungannya. Nutrisi bagi bayi dan anak adalah pondasi bagi pertumbuhan badan yang sehat yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan yang sehat, sedangkan kekurangan nutrisi pada bayi dan anak dapat meningkatkan risiko kesakitan dan menyebabkan sepertiga kematian balita baik secara langsung maupun tidak langsung dari perkiraan 9,5 juta kematian balita pada tahun 2006.¹¹⁶

Politik hukum terkait masalah kebijakan Air Susu Ibu (ASI) bertujuan untuk menciptakan dan memberikan arah yang jelas bagi terlaksananya pemberian ASI eksklusif dengan tertib untuk mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera. Pemerintah daerah dan DPRD adalah aktor utama terlaksananya program pemberian ASI eksklusif. Karena pemberian ASI yang dilaksanakan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah PP Nomor. 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif secara holistik memberikan kewenangan kepada kepala daerah dan DPRD untuk melaksanakan tanggung jawabnya yang

¹¹⁶ WHO, *Infant and Young Child Feeding Model Chapter for Textbooks for Medical Student and allied Health Professionals*, Geneva: WHO, 2009, hlm. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sampai pada tahap pemberian sanksi. Luasnya kewenangan tersebut jika tidak disertai dengan *good will* untuk melaksanakan kebijakan pemberian ASI eksklusif cenderung tidak efektif, karena kewenangan yang luas cenderung disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Bagi bangsa Indonesia, saat ini hukum harus diciptakan untuk melindungi masyarakat dari ketidaknyamanan menjadi nyaman, dari ketidakadilan menjadi adil, dari kegelapan menjadi terang. Filosofi kebijakan pemberian ASI eksklusif mencita-citakan terwujudnya dan terselenggaranya pemerintahan yang berkarya dan bekerja untuk rakyat, harus tetap menjadi spirit yang kuat melahirkan kebijakan dalam pemberian ASI eksklusif. Kasus-kasus masih adanya intervensi dari para produsen susu formula bermula dari tidak adanya pengawasan oleh pemerintah daerah dan DPRD, hal itu terjadi karena pemerintah daerah dan DPRD belum sungguh-sungguh dalam menugaskan tugas sebagai aparatur penyelenggara negara yang seharusnya bekerja untuk rakyat.

Penataan substansi hukum terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam masalah pemberian ASI eksklusif masih belum begitu jelas dan tegas. Hal ini dapat kita lihat dalam penerapan sanksi masih ada kontradiktif antara PP nomor 33 tahun 2012 dengan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dimana PP hanya mengatur sanksi teguran dan administrative, sementara dalam UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan secara tegas mengatur sanksi pidana 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Kebijakan tersebut sebenarnya untuk menciptakan stabilitas pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nasional, menekan angka kematian bayi (AKB), pengentasan kemiskinan, menekan angka kematian ibu (AKI), dan mengatasi disparitas pembangunan dalam skala regional, maupun nasional. Carut-marut kebijakan ASI yang tidak diiringi oleh pemerintah di tingkat daerah menyebabkan pemberian ASI eksklusif menjadi tidak optimal dan tidak tertib. Hal itu adalah bukti bahwa betapa pemerintah daerah dan DPRD telah kehilangan orientasi dalam ikut serta menekan angka kematian bayi (AKB) dan ikut serta mensejahterakan rakyatnya.

Untuk mengatasi problematik tersebut, maka kita harus menjalankan nilai-nilai yang ada pada Pancasila yaitu pada sila ke 2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap kemanusiaan harus kembali diletakkan sebagai ideologi bangsa dalam upaya untuk meletakkan pembangunan hukum menjadi spirit bagi politik hukum, nilai-nilai pancasila tersebut harus menjadi bagian penting dan menjadi kata kunci untuk terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa. Politik hukum atau kebijakan ASI eksklusif diperlukan dalam rangka membangun stabilitas dan pembangunan pemerintahan untuk menjaga martabat bangsa Indonesia agar terhindar dari banyaknya angka kematian bayi (AKB).

Dalam konteks internasional, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi juga merupakan salah satu hak asasi manusia dimana pemerintah setiap negara harus berupaya secara sungguh-sungguh agar masyarakatnya mempunyai akses terhadap pangan cukup dan sehat. Padahal persoalan aksesibilitas pangan dan gizi masih menjadi masalah utama dalam pembangunan di bidang pangan dan gizi di Indonesia. Meskipun data statistik menunjukkan ada penurunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

prevalensi gizi kurang (dari 14,8 persen pada tahun 2005 menjadi 13,0 persen pada tahun 2011) dan gizi buruk (9,7 persen pada tahun 2005 menjadi 4,9 persen pada tahun 2010) berdasar hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), namun prevalensi anak balita pendek (kerdil) secara nasional hanya turun sedikit, yakni dari 36,8 persen pada tahun 2007 menjadi 35,6 persen pada tahun 2010, padahal target pada RPJMN pada 2014 harus diturunkan menjadi 32 persen. Data ini menggambarkan bahwa persoalan gizi masih harus menjadi prioritas pembangunan, karena anak kerdil merupakan anak yang terhambat pertumbuhannya dan suatu indikator jangka panjang yang cukup baik untuk mengukur kekurangan gizi. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kesejahteraan anak di Indonesia di bidang kesehatan masih kurang.¹¹⁷

Hukum yang kacau akan melahirkan perilaku masyarakat yang kacau, masyarakat yang kacau cenderung tidak tertib dan dapat merusak tata nilai dan sikap hidup bermasyarakat. Sebenarnya, persoalan yang paling mendasar dalam pelaksanaan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan PP nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif adalah di bidang pembinaan dan pengawasan. Oleh sebab itu, politik hukum merupakan aktivitas yang menentukan pola atau cara membentuk hukum, mengawasi bekerjanya hukum, dan memperbarui hukum untuk mencapai tujuan negara.

Dimanakah politik hukum tersebut berada? Apakah dalam ilmu politik atau dalam ilmu hukum? Belifante mengemukakan bahwa hukum tata negara mencakup hal-hal di luar hukum positif dan hal inilah yang memberikan

¹¹⁷ Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012, *Pemantapan Ketahanan Pangan dan Perbaikan Gizi Berbasis Kemandirian dan Kearifan Lokal*, 6 September 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat bagi politik hukum sebagai bagian dari ilmu hukum khususnya hukum tata negara.¹¹⁸ Mahfud MD mengemukakan bahwa sebenarnya letak politik hukum dalam studi ilmu hukum dapat ditemukan dalam pohon ilmiah hukum. Jika pohon ilmiah hukum dibayangkan sebagai sebuah pohon, maka akan tergambar sekurang-kurangnya terdiri atas akar, pohon/batang, cabang, dan ranting ilmu hukum. Cakupan pohon ilmiah hukum dalam pandangan Mahfud MD sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Akar ilmu hukum adalah filsafat bangsa dan ideologi negara. Di Indonesia, akar ilmu hukum adalah Pancasila (juga Pembukaan UUD 1945) yang meletakkan prinsip-prinsip dan penuntun kaidah hukum tertentu dalam pembuatan berbagai produk perundang-undangan.
- b. Batang/pohon hukum adalah serat-serat pohon (subsistem kemasyarakatan), seperti: sosiologi, sejarah, politik, ekonomi, budaya, dan administrasi yang melahirkan cabang-cabang hukum. Dari sini muncul studi sejarah hukum, sosiologi hukum, administrasi hukum, dan menjadi bagian studi ilmu hukum.
- c. Cabang-cabang ilmu hukum adalah hukum positif yang dibedakan atas berbagai bidang pokok, seperti: hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara.

¹¹⁸ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LPES, 2006), hlm. 2

¹¹⁹ Mahfud MD, *Kontroversi Perubahan Konstitusi*, (Jakarta: TP. TT.), hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif adalah pemberian air susu ibu kepada bayi umur 0-6 bulan tanpa diberikan makanan atau minuman tambahan. ASI mempunyai manfaat yang besar bagi bayi karena memiliki efek positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Bayi yang mendapatkan ASI akan lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit infeksi. Hal inilah yang dapat menurunkan angka kematian bayi. Dari aspek hukum, pemberian ASI eksklusif berarti memenuhi hak anak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang menjamin hak anak untuk menapatkan ASI, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif.

Gerakan untuk memberikan ASI secara eksklusif dinilai masih kurang menggema dan minim dukungan dari banyak pihak. Padahal, pemerintah telah membuat peraturan yang menjamin hak-hak anak untuk mendapatkan ASI seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif. Menurut data Riskesdas tahun 2010, hanya 15,3% bayi Indonesia yang mendapat ASI eksklusif sampai 6 bulan. Padahal pemberian ASI tentu akan berdampak signifikan terhadap kualitas bangsa. Bahkan jauh sebelum dikeluarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pemerintah juga telah mengatur pemberian ASI eksklusif dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 240/MENKES/PER/V/1985 tentang pengganti ASI, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 237/MENKES/SK/IV/1997 tentang Pemasaran Pengganti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ASI, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 Tentang Pemberian ASI secara Eksklusif pada bayi di Indonesia.¹²⁰

3. Hukum Sebagai Alat

Berbagai pengertian atau definisi tersebut bermakna bahwa politik hukum itu merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Di sini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan ini Sunaryati Hartono mengatakan tentang “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.¹²¹

Dasar pemikiran dari berbagai definisi yang seperti ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara kita mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui pemberlakuan atau penidakberlakuan huku-hukum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.

Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan,

¹²⁰ Tatty Elmir, *Bravo Ayah dan Ibu ASI: Para Pahlawan di jalan Sunyi*, 3 September 2019.

¹²¹ C.F.G. Sunaryati hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam Undang- Undang sekaligus berlaku sebagai politik hukum.

Ada pun yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut, misalnya, pada periode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada periode 2004-2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan UU yang dicantumkan di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Berbagai definisi menyebutkan bahwa studi politik hukum mencakup *legal policy* (sebagai kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Jadi ada perbedaan cakupan antara politik hukum dan studi politik hukum, yang pertama lebih bersifat formal pada kebijakan resmi sedangkan yang kedua mencakup kebijakan resmi dan hal-hal lain yang terkait dengannya.

Dengan demikian, studi politik hukum mencakup tiga hal :
Pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; *Kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum; *Ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.

4. Makna dan Ruang Lingkup Politik Hukum

Istilah politik hukum diperkenalkan di Indonesia untuk pertama kali oleh Soepomo pada tahun 1947, melalui tulisannya di Majalah *Hoekoem* melalui artikelnya berjudul “Soal-soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia”¹²² Selanjutnya Politik Hukum menjadi cabang ilmu pengetahuan sekaligus diajarkan sebagai suatu mata kuliah dalam kurikulum Ilmu hukum di Indonesia setelah diperkenalkan oleh Mahfud MD dalam disertasinya yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul *Politik Hukum di Indonesia*.¹²³

Istilah “Politik Hukum” terbentuk dari kata politik dan hukum. Kedua kata tersebut mengandung maknanya masing-masing, sehingga paduan kata tersebut akan melahirkan pengertian tersendiri. Pengertian tersebut tentunya tetap menyimpan makna dari kedua kata asalnya. Untuk itu, dalam memahami pengertian politik hukum terlebih dahulu dicermati pengertian kedua kata asalnya.

Menurut Miriam Budiardjo, pada umumnya politik (*politics*) diartikan sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (suatu negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem

¹²² Hotma P. Sibuea, *Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017)

¹²³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.¹²⁴

Dari pengertian tersebut dapat ditarik unsur-unsur pokok politik, yaitu : (1) Negara (*state*), yang memusatkan perhatian pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya; (2) Kekuasaan (*power*), yang menganggap politik sebagai semua kegiatan yang menyangkut masalah merebut dan mempertahankan kekuasaan. Perjuangan kekuasaan ini mempunyai tujuan untuk kepentingan seluruh masyarakat; (3) Pengambilan keputusan (*decision making*), yang mengartikan politik sebagai keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat; dapat pula menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mencapai tujuan itu; (4) kebijaksanaan (*policy, beleid*), adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu; (5) pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*), adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat. Dalam hal ini politik dianggap sebagai membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat.¹²⁵

¹²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008), hlm. 5-16

¹²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008), hlm. 17-21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara istilah hukum sendiri jika ditinjau dari perspektif ontologis, sejak awal bahwa konsepsi hukum memang tidaklah tunggal, tiap ruang dan generasi memaknai hukum secara berbeda sesuai dengan ‘sistem situasi’ tuang dan generasi itu.¹²⁶

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa dalam sejarah perkembangan pengkajian hukum tercatat sekurang-kurangnya ada tiga konsep hukum yang pernah dikemukakan orang, yakni : (a) hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal, dan menjadi bagian *inheren* sistem hukum alam; (b) hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik yang terlegitimasi; dan (c) hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses-proses penarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.

Pemikiran hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan dapat kita telusuri dalam pemikiran-pemikiran hukum yang termasuk dalam kelompok aliran teori hukum alam. Pemikiran-pemikiran tentang hukum alam terutama dikembangkan oleh aliran *Stoic* yang didirikan oleh Zeno. Konsep tentang kealaman merupakan pusat perhatian aliran ini. Yang dimaksud dengan alam adalah prinsip yang meresapi alam semesta yang

¹²⁶ A. Mukhtie Fadjar, *Pergeseran Paradigma Ilmu Pengetahuan*, (Hand Out Kuliah PDIH Universitas Brawijaya Malang, 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka kenali dalam bentuk akal. Akal yang meresapi seluruh alam semesta dianggap sebagai dasar dari hukum dan keadilan oleh aliran *Stoic*.

Trio filsuf Athena (Socrates, Plato, dan Aristoteles) menekankan aspek keadilan. Hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama, yakni keadilan. Isi kaidah hukum harusnya adil. Tanpa keadilan, hukum hanya merupakan kekerasan yang diformalkan. Hukum dirasakan penting ketika berhadapan dengan ketidakadilan. Orang menuntut ke pengadilan sebenarnya untuk menuntut keadilan. Jadi pengadilan sebenarnya untuk keadilan.

Sementara konsep hukum sebagai kaidah-kaidah hukum positif dapat ditelusuri dari pemikir-pemikir hukum yang beraliran positivis (*analitical jurisprudence*). Aliran ini muncul pada abad ke-19. H.L.A. Hart¹²⁷ membedakan arti dari 'positivisme' seperti yang banyak disebut dalam ilmu hukum kontemporer, yakni: *Pertama*, anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah manusia; *kedua*, anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau antara hukum yang ada dengan seharusnya ada; *ketiga*, anggapan bahwa analisis (studi tentang arti) dari konsepsi-konsepsi hukum (a) layak dilanjutkan; (b) harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang dari penelitian sosiologis mengenai

¹²⁷ W. Friedmann, *Legal Theory*, (New York: Columbia University Press, 1967), hlm. 256-257

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya; dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral atau sebaliknya; *keempat*, sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup, artinya putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan hukum yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa memperhatikan tuntutan-tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral; *kelima*, anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan, seperti halnya dengan pernyataan-pernyataan tentang fakta, dengan alasan yang rasional, petunjuk atau bukti.

John Austin seorang positivis utama, menegaskan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Austin mengartikan ilmu hukum sebagai teori hukum positif yang otonom dan mencukupi dirinya sendiri. Ilmu tentang hukum berurusan dengan hukum positif atau dengan hukum-hukum lain yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan kejelekannya. Menurut Austin, tugas ilmu hukum hanyalah untuk menganalisis unsur-unsur yang secara nyata dari sistem hukum modern. Sekalipun diakui ada unsur-unsur yang bersifat historis di dalamnya tetapi secara sadar unsur tersebut diabaikan dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.

Selanjutnya, konsep hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat dapat kita pahami secara lebih baik dengan melihat gugus pemikiran dalam teori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang bertipologi sosiologis. Menurut D.H.M. Meuwissen¹²⁸ kajian sosiologis tentang hukum/ sosiologis hukum pada saat ini tengah berkembang pesat dan ilmu ini terarah untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku. Artinya, isi dan bentuknya yang berubah-ubah menurut waktu dan tempat dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Hukum bukanlah gejala yang netral yang semata-mata hasil rekaan bebas manusia, tetapi berada dalam jalinan yang sangat erat dengan masalah-masalah perkembangan kemasyarakatan. Pada satu sisi hukum dapat dijelaskan dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan, pada sisi lain gejala-gejala kemasyarakatan dapat dijelaskan dengan bantuan hukum.

Selanjutnya, politik hukum sebagai suatu kajian hukum oleh para pakar dan pengkaji hukum diberikan definisi yang berbeda-beda. Politik hukum menurut Abdul Hakim G. Nusantara adalah kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan dan dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu.¹²⁹ Sementara Satjipto Rahardjo melihat politik hukum sebagai adanya keharusan untuk menentukan pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut.¹³⁰

Tengku M. Radhie mengartikan politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah di mana hukum dikembangkan. Jadi hukum apa dan

¹²⁸ Pendapat Mauwissen dikutip Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 69

¹²⁹ Pendapat A. Hakim G. Nusantara dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, *Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hlm. 42

¹³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 334

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana yang akan mengatur tata kehidupan masyarakat bersumber pada politik hukum.¹³¹

Politik hukum dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional akan ditentukan oleh berbagai faktor, seperti dasar atau corak politik yang hendak dibangun, sistem ekonomi yang hendak dikembangkan termasuk pemahaman tentang keamanan, dan juga tentang perkembangan masyarakat, realitas dan susunan masyarakat serta kecenderungan-kecenderungan global yang akan mempengaruhinya.¹³²

L.J. van Apeldorn lebih membatasi pengertian politik hukum pada hukum tertulis. Beliau menggunakan istilah politik perundang-undangan, yang diartikan sebagai menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan.¹³³ Sehubungan dengan itu, Padmo Wahyono memberikan pengertian politik hukum sebagai kebijaksanaan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penetapan hukum, dan penegakkannya sendiri.

Oleh karena politik hukum itu diproyekikan untuk terciptanya *ius constituendum* untuk bidang-bidang tertentu (substansi) dalam masyarakat, maka Bagir Manan berpendapat bahwa politik tidak lain dari politik ekonomi, politik budaya, politik pertahanan dan keamanan (Hankam), dan politik dari politik itu sendiri. Jadi politik hukum mencakup politik

¹³¹ Tengku M. Radhie, "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional" dalam majalah *Prisma*, Nomor 5 Tahun II Desember 1973, hlm. 42

¹³² A. Mukhtie Fadjar, *Beberapa Masalah Pembangunan Hukum dan Hukum Pembangunan*, (Malang: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1996), hlm. 22

¹³³ L.J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (terjemahan Utarid Sadino), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum.

Lebih lanjut, Bagir Manan mengemukakan bahwa politik hukum terdiri dari politik hukum yang bersifat tetap (permanen) dan politik hukum yang bersifat temporer. Yang tetap berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Bagi Indonesia, politik hukum yang tetap antara lain: (1) Ada satu sistem hukum Indonesia; (2) Sistem hukum nasional yang dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945; (3) Tidak ada hukum yang memberikan hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan suku, ras atau agama. Kalaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa; (4) Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat; (5) Hukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat; (6) Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat; (7) Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan hukum dan berkonstitusi.

Politik hukum temporer adalah kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Termasuk dalam kategori ini hal-hal seperti penentuan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kolonial, pembaharuan peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan nasional dan sebagainya.

M. Mahfud MD dalam buku yang diangkat dari disertasinya di Universitas Gajah Mada memberikan definisi politik hukum sebagai *legal policy* yang akan dan telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: (1) pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; (2) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹³⁴

Bintan Saragih dalam bukunya yang berjudul *Politik Hukum* memberikan pengertian politik hukum sebagai “kebijakan” yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti mensejahterakan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud.

Hikmahanto Juwana membagi politik hukum dalam dua dimensi; dimensi yang pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya peraturan perundang-undangan (*basic policy*), sementara

¹³⁴ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 9

dimensi kedua dari politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul di balik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.¹³⁵

Bernard L. Tanya menegaskan bahwa politik hukum selalu bersifat ideal, dan berangkat dari idealisme. Politik hukum menurut Bernard lebih mirip suatu etika, yang menuntut agar suatu tujuan yang dipilih harus dapat dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji, dan dites dengan kriteria moral. Sehingga politik hukum memiliki fungsi ideologis untuk dua hal mendasar; yakni (1) memberi titik tolak dan arah dasar bagi tatanan hukum dalam mengelola berbagai persoalan dalam berbagai bidang demi mencapai tujuan bersama; (2) mengarahkan dan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki hukum untuk mewujudkan tujuan bersama.¹³⁶

Berdasarkan berbagai pengertian tentang politik hukum sebagaimana dipaparkan di atas, maka ruang lingkup atau wilayah kajian dari politik hukum adalah sebagai berikut :

1. Proses penggalan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum
2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum
3. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum

¹³⁵ Hikmahanto Juwana, "Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia" Artikel dalam *Jurnal Hukum* Volume 1, Nomor 1, Universitas Sumatera Utara, 2005, hlm. 24-39

¹³⁶ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 1-12

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan
6. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.¹³⁷

5. Politik Hukum di Indonesia

Politik hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila tersebut, menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Terdapat beberapa arah politik hukum tentang pemberlakuan hukum nasional, yaitu asas konkordansi yang memberlakukan hukum barat ke dalam hukum nasional, begitu juga dengan asas kodifikasi, baik tertutup maupun terbuka.

Dalam perjalanan kodifikasi hukum nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hukum nasional. Hukum Islam sangat dekat dengan sosio-antropologis bangsa Indonesia, sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Kedekatan sosio-antropologis hukum Islam dengan masyarakatnya menjadi fenomena tersendiri yang ditandai dengan maraknya upaya formalisasi pemberlakuan syariat Islam di berbagai wilayah Indonesia.

¹³⁷ Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 51-52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melihat peranan hukum Islam dalam pengembangan hukum nasional, ada beberapa fenomena yang bisa dijumpai dalam praktik. *Pertama*, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Dalam hal ini, hukum Islam diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. *Kedua*, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat. Oleh karena aturan hukum tersebut bersifat umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara.

Ismail Sunny, mengilustrasikan politik hukum sebagai suatu proses penerimaan hukum Islam digambarkan kedudukannya menjadi dua periode, yakni *pertama*, periode *persuasive source* di mana setiap orang Islam diyakini mau menerima keberlakuan hukum Islam itu; dan *kedua*, periode *authority source* di mana setiap orang Islam meyakini bahwa hukum Islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, hukum Islam dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasikan dalam perundang-undangan nasional.¹³⁸

Sebagai negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila, negara melindungi agama dan penganutnya bahkan berusaha memasukkan hukum agama, ajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sbagaimana pernyataan *the founding father* RI, Mohammad Hatta, bahwa dalam pengaturan Negara Hukum Republik Indonesia,

¹³⁸ Ismail Sunny, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam*, dikutip dari *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, (Bandung: Ulul Albab Press, 1997), Jilid I, hlm. 40-43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga orang Islam mempunyai sistem syariat yang sesuai dengan kondisi Indonesia.¹³⁹ Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dalam salah satu konsiderannya menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu rangkaian kesatuandengan konstitusi tersebut.¹⁴⁰ Prospek hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional sangat positif karena secara kultural, yuridis, dan sosiologis memiliki akar yang kuat. Hukum Islam memiliki serta menawarkan konsep hukum yang lebih universal dan mendasarkan pada nilai-nilai esensial manusia sebagai *khalifatullah*.

Menurut Hazairin, dipakainya hukum Islam sebagai sumber hukum nasional karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sedangkan hukum adat dibelakukan karena hukum tersebut sudah cukup lama eksis di dalam budaya dan perilaku bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka penetapan hukum nasional haruslah didasarkan pada politik hukum yang bersumber pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dengan mengakui hukum agama dan hukum adat serta menghapus hukum warisankolonial sepanjang bersifat diskriminatif dan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi hukum pada saat ini.

Fakta membuktikan bahwa politik hukum pada saat ini memperhatikan pluralisme hukum, seperti pemberlakuan hukum Islam di

¹³⁹ Ichtiyanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994) cet. ke-2, hlm. 16

¹⁴⁰ M. Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nanggoe Aceh Darussalam, juga memperhatikan berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bagi kalangan Muslim, jelas yang dimaksudkan sebagai hukum adalah hukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an, dan untuk kurun zaman tertentu lebih dikonkretkan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam tingkah laku beliau, yang lazim disebut dengan Sunnah Rasul. Kaidah-kaidah yang bersumber dari Allah SWT, kemudian lebih dikonkretkan dan diselaraskan dengan kebutuhan zamannya melalui ijtihad atau penemuan hukum oleh para mujtahid dan pakar di bidangnya masing-masing, baik secara perorangan maupun kolektif.

6. Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang diwujudkan melalui politik hukum nasional, merupakan sistem hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, meliputi sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Eropa. Ketiga sistem hukum tersebut menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional yang holistik dan komprehensif melalui politik hukum nasional.¹⁴¹ Oleh karena itu, membahas politik hukum di Indonesia, tanpa membahas politik hukum sebagai suatu ilmu dan politik hukum nasional sebagai suatu fakta adalah irasional. Politik hukum sebagai suatu ilmu, dan politik hukum nasional

¹⁴¹ Otong Rosadi, dan Andi Deswan, *Studi Politik Hukum*, Suarta Optik Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai suatu fakta, adalah penghubung yang menentukan eksistensi dan efektivitas politik hukum Islam di Tanah Air.¹⁴²

Politik hukum merupakan kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum mana yang perlu diganti, diubah, dipertahankan, atau hukum yang mana perlu diatur, agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan terwujud. Politik hukum mengandung arti *beleid* atau kebijakan (*policy*). Jadi, yang dimaksud dengan politik hukum adalah kebijakan hukum.¹⁴³ Politik hukum dapat juga diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu.¹⁴⁴

Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menetapkan kebijakan dengan menggunakan tiga sistem hukum di atas sebagai bahan bakunya. Ditinjau dari aspek politik hukum di Indonesia, hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan dari dasar primordialisme.¹⁴⁵ Dengan demikian, konfigurasi hukum Islam dalam hukum nasional adalah bentuk atau wujud hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia yang berlaku

¹⁴² Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 2

¹⁴³ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 21

¹⁴⁴ Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Nasional", Makalah yang disampaikan di Yayasan LBHI Surabaya, 1985

¹⁴⁵ *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, (Jakarta: Cipta Adi Pusaka, 1990) vol. 6, hlm. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi semua warga negara Indonesia, sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat universal atau *rahmatan li al-alam*.

Sistem hukum nasional diharapkan dapat menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran yang dijabarkan dalam kerangka peraturan dan kelembagaan yang dapat berasal dari konvensi internasional.¹⁴⁶ Suatu sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang baik dalam arti hukum itu harus mencerminkan rasa keadilan baik semua pihak dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Selain itu, memahami politik hukum nasional juga penting untuk meletakkan dasar dan strategi politik hukum Islam di Indonesia, sehingga politik hukum Islam dapat diakomodasi oleh politik hukum nasional. Sebab bila tidak, berdasarkan pengalaman yang cukup panjang dalam kasus beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), seperti RUU Perkawinan, RUU Peradilan Agama, RUU Pornografi, serta peraturan-peraturan yang dianggap bernuansa syariah, proses legislasi ide-ide hukum yang dicita-citakan akan banyak mendapat hambatan, baik secara yuridis maupun secara politis.

Tentu saja hukum harus menjadi dasar politik hukum nasional dalam mencapai rencana dan tujuan bernegara. Oleh karena itu, politik hukum nasional harus selaras dengan tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan

¹⁴⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemaran Organik yang Persisten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikut serta memelihara ketertiban dunia.¹⁴⁷ Politik hukum nasional memberi arah pembangunan hukum yang lebih berakar pada budaya bangsa dan keyakinan yang hidup dalam praktik masyarakat baik secara pragmatis maupun secara filosofis.

Kebijakan dasar penyelenggaraan Negara Republik Indonesia dalam bidang hukum mesti bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Pada dasarnya, hukum suatu negara harus lebih banyak berciri nasional daripada internasional. Atas dasar ini, maka perlu ada hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara. Karena itu, pada setiap negara harus mempunyai hukumnya sendiri dan apa yang dipandang sebagai melanggar hukum dalam suatu negara belum tentu demikian di negara lain. Pada konstataasi ini, politik hukum nasional merupakan alat (*tool*) yang digunakan oleh penguasa untuk membentuk suatu sistem hukum nasional yang tidak boleh terlepas dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum adat, agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih besar. Oleh sebab itu, politik hukum bertugas meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat.

Kehidupan masyarakat terus berkembang secara dinamis. Seiring dengan hal tersebut muncul ragam tuntutan untuk melakukan pelbagai perubahan ke arah pencapaian tujuan nasional. Perubahan tersebut tentu

¹⁴⁷ Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, (Padang: Akademia Permata, 2013), hlm. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja tidak boleh terpisah dari kerangka hukum nasional yang dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah pembangunan hukum sejatinya memperhatikan kemajemukan masyarakat tanpa membatasi hak-hak tiap warga negara, namun tetap memberi penghargaan kepada tiap warga negara untuk menjalankan hukum yang hidup dengan tanpa mengenyampingkan kepentingan hukum lainnya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan dinamika perkembangan suatu masyarakat, baik dari sisi sosiokultural maupun politik.¹⁴⁸

Tentu saja kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa menjadi dasar pijakan, tapi bukan berarti menelantarkan hukum yang menjadi praktik atau amalan masyarakat secara umum. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum dan diharapkan partisipasinya agar hukum yang berlaku benar-benar merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi, hal ini merupakan salah satu prasyarat penegakan hukum yang efektif.

Pokok-pokok pikiran hukum nasional, sebagaimana termaktub dalam Penjelasan dan Pembukaan UUD 1945 adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

¹⁴⁸ N.J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), hlm. 1

berdasarkan atas prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, serta persatuan Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

D. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Sejauh pengamatan penulis, kajian penelitian tentang masalah Bank ASI, Praktek jual beli ASI, donor ASI secara umum sudah cukup banyak dibahas orang. Namun bila dicermati, masih sangat sedikit yang mengkaji terkait politik hukum atau kebijakan pemerintah terkait pemberian ASI dan dampaknya bagi kehidupan keluarga. Meskipun demikian, penulis belum menemukan Disertasi yang membahas seputar permasalahan ASI, hanya saja dalam bentuk Tesis karya Winda Alisriani dengan judul “Telaah terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardawi Tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Konsekuensinya terhadap Larangan Perkawinan karena Sepersusuan”.¹⁴⁹

Dalam Tesis yang ditulis oleh Winda Alisriani hanya membahas masalah fatwa Yusuf Al-Qardhawi yang menyatakan bahwa dia tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya “Bank Air Susu Ibu” asalkan bertujuan untuk mewujudkan *mashlahat syar’iyyah* yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Dan tidak mengakibatkan haramnya melakukan perkawinan, adapun sifat susuan yang mengharamkan adalah apabila bayi menyusu langsung dengan ibu yang menyusuihnya.¹⁵⁰

Penelitian lain yang penulis temukan dalam bentuk jurnal ilmiah, diantaranya :

¹⁴⁹ Winda Alisriani, “Telaah Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qadhawi Tentang Bank Air Susu Ibu Dan Konsekuensinya Terhadap Larangan Perkawinan Karena Sepersusuan, Tesis tidak diterbitkan, (pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim, 2015). Hlm. 120

¹⁵⁰ Ibid, hlm. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jurnal yang ditulis oleh Helda dengan judul “Kebijakan Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif”.¹⁵¹

Helda menyimpulkan bahwa Saat ini banyak sekali berbagai merek produk susu formula yang sangat gencar dalam mempromosikan produknya, baik melalui media massa, elektronik, media sosial, pasar dengan memberikan hadiah yang menarik, sehingga para ibu banyak yang memilih produk susu formula dibandingkan dengan memberikan susu eksklusif kepada bayinya.

Selain itu, sikap petugas kesehatan yang juga kurang mendukung, lemahnya perencanaan terpadu PP-ASI, dan sering terjadinya pergantian personil yang berdampak terhadap program PP-ASI. Lagipula, lemahnya sanksi pelaksanaan Rumah Sakit Sayang Bayi (RSSB) berdampak hanya 25 % yang masih RSSB, kurangnya integrasi dalam kurikulum tenaga kesehatan lintas sektor menyebabkan kendala dalam program PP-ASI.¹⁵²

Hal ini memperlihatkan kegagalan pemerintah menjamin kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang termaktub dalam pasal 28 UUD 1945 khususnya pasal 28 B ayat 2 yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Di samping itu, UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan tentang hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik.

¹⁵¹ Helda, *Kebijakan Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif*, (Jurnal Kesmas Vol 3, Nomor 5, Fakultas Kesehatan Masyarakat-UI, 2009), hlm. 195

¹⁵² Departemen Kesehatan RI, *Strategi nasional PP-ASI* (edisi 2007). Diunduh dari : <http://www.Gizi.net/kebijakan-gizi/download/star-nas%ofinal.com>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jurnal yang ditulis oleh Agus Nurcholis Saleh dengan judul “Status Hukum Ibu Tidak Menyusui Bayi dan Solusi Pencegahannya”.¹⁵³

Agus Nurcholis Saleh menyimpulkan bahwa ASI adalah hak bayi yang harus ditunaikan oleh orangtuanya. Apakah langsung dari ibu kandungnya atau dari ibu susuan yang bersedia memenuhi hak-hak itu. Ahli kesehatan dunia telah meneliti dan menyepakati bahwa air susu ibu (ASI) tidak tergantikan. Bayi yang tidak mendapatkan asupan ASI memiliki resiko yang cukup besar terkait kelangsungan hidupnya. Bayi yang terabaikan hak ASI- nya akan rentan dari virus dan penyakit. Itulah mengapa Allah SWT memerintahkan para ibu untuk menunaikan hak ASI bayi, untuk kesempurnaan selama dua tahun.

Status hukum ibu-ibu yang tidak menunaikan tugas ASI- nya ada tiga. *Pertama*, mereka khianat terhadap amanah Allah SWT. *Kedua*, mereka merusak dirinya sendiri, juga menghambat perkembangan bayinya secara sempurna. *Ketiga*, mereka berhutang kepada Allah SWT dalam bentuk pengabdian (ibadah), berhutang juga kepada bayinya dalam bentuk kolostrum dan ASI. Hutang itu tidak akan bisa dibayarkan sampai meninggal dunia.

Sebagai solusi, harus diintensifkan pendidikan berkeluarga, dan dimulai oleh suami, sebagai pemimpin keluarga, kepada dirinya sendiri. Suami harus menjadi imam yang baik supaya ditaati makmumnya. Suami harus menjadi *leader* (pemimpin) yang mumpuni, supaya gerbongnya

¹⁵³ Agus Nurcholis Saleh, *Status Hukum Ibu Tidak Menyusui Bayi dan Solusi Pencegahannya*, (Jurnal Juris Vol 17, No. 2- IAIN Batusangkar, 2018), hlm. 229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergerak sesuai dengan syariat. Suami harus menjadi teladan yang baik, karena *qawwam* adalah persyaratan dari Allah SWT. Untuk suami dalam membentuk dan memimpin keluarga.

Suami harus membantu isteri menggali pengetahuan dan panduan syariat tentang pentingnya ASI. Untuk lebih merasionalkan syariat tersebut, perlu membuka kajian pakar kesehatan tentang ASI. Insya Allah akan diperoleh solusi. Suami harus membuka diri, melakukan identifikasi, termasuk membimbing isterinya supaya mempersiapkan diri. Setelah ada bayi, suami harus mendukung ibu si bayi secara moril dan materil.¹⁵⁴

3. Jurnal yang ditulis oleh Thoat Setiawan dengan judul jurnal “Persusuan (*Ar-Radhaa*’) Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan (Kajian Tafsir Maudu’I Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 23)”.¹⁵⁵

Hasil kesimpulan pada jurnal yang ditulis oleh Thoat Setiawan terdiri dari tiga hal : *Pertama*, hukum Islam mengharamkan menikah karena sebab hubungan persusuan, yang mencakup keharaman menikahi wanita yang menyusui, anak kandung, cucu, ibu, ayah, dan nenek dari wanita yang menyusui, juga harap pula terhadap menikahi saudara sepersusuan dan adik-adik saudara sepersusuan. *Kedua*, seberapa kadar susu yang diminum oleh anak hingga menjadi hubungan susuan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sebarangpun banyaknya jika minumnya di bawah umur dua tahun maka terjadi hubungan susuan,

¹⁵⁴ Ibid, hlm. 229

¹⁵⁵ Thoat Setiawan, “Persusuan (*Ar-Radhaa*’) Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan (Kajian Tafsir Maudu’I Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 23), (Jurnal Juris Vol 16, No. 2- UIN Batusangkar, 2017). Hlm. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Jumhur ulama lebih dari lima kali susuan. *Ketiga*, usia anak yang menyusui menurut Jumhur Ulama adalah dibawah umur dua tahun, begitu pula pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan menurut Ulama Zhahiry anak yang menyusui di atas dua tahun bahkan sudah dewasa pun juga mengakibatkan hubungan persusuan.¹⁵⁶

4. Jurnal yang ditulis oleh Ahwan Fanani dengan judul, “*Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam*”.¹⁵⁷

Hasil kesimpulan pada jurnal yang ditulis oleh Ahwan Fanani dalam Jurnal Ishraqi, Vol. 10, No. 1, Juni 2012 yaitu Bank ASI pertama muncul di Wina Austria pada tahun 1909 dan kemudian merambah ke Jerman dan Boston Amerika sepuluh tahun kemudian, kini telah berkembang di ke berbagai negara. Pada tahun 2009, tercatat bahwa bank ASI berkembang di 38 negara, dengan lebih dari 300 bank ASI. Tercatat Negara berikut telah memiliki Bank ASI: Amerika Serikat, Australia, Brazil, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Finland, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, India, Inggris, Jepang, Norway, Swedia, Switzerland.

Awal tahun 1980, jumlah donor Bank ASI menurun drastis akibat isu penyakit AIDS dan berbagai infeksi lainnya. Seperti halnya darah, air susu yang dapat disusupi virus. Setelah itu, penggunaan susu formula melonjak drastis. Ditambah lagi, susu formula ini dikembangkan agar bisa sesuai untuk bayi prematur. Namun demikian harus diakui, nutrisi komplit dalam ASI tidak akan pernah tergantikan. Kini, dengan screening yang

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm. 29

¹⁵⁷ Ahwan Fanani, *Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Jurnal Ishraqi, Vol. 10, No. 1, Juni 2012). Hlm. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketat, Bank ASI kembali bangkit dan menjadi pilihan nutrisi yang dipilih oleh ahli kesehatan dan dokter anak. Bahkan pendonor cukup menelpon agar ASI-nya dijemput dengan tas khusus yang steril. ASI donor hanya bisa diperoleh melalui Bank ASI yang resmi ditunjuk setelah melewati persyaratan ketat yang harus dipenuhi.¹⁵⁸

5. Jurnal yang ditulis oleh Giri Inayah Abdullah dengan judul, “*Determinan Perilaku Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pada Ibu Pekerja*”.¹⁵⁹

Hasil kesimpulan pada jurnal yang ditulis oleh Giri Inayah Abdullah dalam Jurnal Kesmas Vol 7, Nomor 7, Fakultas Kesehatan Masyarakat-UI, Tahun 2013 yaitu bahwa proporsi menyusui eksklusif pada ibu pekerja di Kementerian Kesehatan tahun 2012 sebesar 62,5 %. Cakupan ini jauh di atas cakupan nasional ASI eksklusif berdasarkan data Riskesdas tahun 2010 sebesar 15,3%. Variabel yang berhubungan dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada ibu pekerja adalah sikap ibu, ketersediaan fasilitas, dan dukungan pengasuh. Sikap ibu merupakan variabel yang paling dominan dalam pemberian ASI eksklusif pada ibu pekerja. Ibu yang mempunyai sikap mendukung berpeluang lima kali memberikan ASI eksklusif dibandingkan dengan ibu yang mempunyai sikap kurang mendukung. Sikap yang menghambat ibu memberikan ASI eksklusif adalah persepsi ibu yang merasa sulit memberi ASI saat kembali bekerja.¹⁶⁰

¹⁵⁸ *Ibid*, Hlm. 83

¹⁵⁹ Giri Inayah Abdullah, “*Determinan Perilaku Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pada Ibu Pekerja*”, (Jurnal Kesmas Vol 7, Nomor 7, Fakultas Kesehatan Masyarakat-UI, 2013), hlm. 298

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 302

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Jurnal yang ditulis oleh Intan Zainafree, A. Widati S, dan Endang Wahyati Y dengan judul, “*Kebijakan ASI Eksklusif dan Kesejahteraan Anak Dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak*”.¹⁶¹

Hasil kesimpulan pada jurnal yang ditulis oleh Intan Zainafree, A. Widati S, dan Endang Wahyati Y, dengan judul “*Kebijakan ASI Eksklusif dan Kesejahteraan Anak Dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak*” dalam jurnal SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol 2, Nomor 1, tahun 2016, yaitu bahwa banyak tindakan yang relatif murah dan mudah diterapkan untuk meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup anak, terutama pada bayi yang baru lahir. Salah satunya adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) segera setelah lahir atau biasa disebut inisiasi menyusui dini (IMD) serta pemberian ASI eksklusif sampai umur enam bulan. Hal ini didukung oleh pernyataan *United Nations Children Funds* (UNICEF), bahwa sebanyak 30.000 kematian bayi di Indonesia dan 10 juta kematian anak balita di dunia pada tiap tahunnya, bisa dicegah melalui pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif selama enam bulan sejak tanggal kelahirannya, tanpa harus memberikan makanan serta minuman tambahan kepada bayinya.

Gerakan untuk pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif dinilai masih kurang menggema dan minim dukungan dari banyak pihak. Padahal, pemerintah telah membuat peraturan yang bisa menjamin hak anak untuk mendapatkan ASI seperti yang tertuang dalam Undang-

¹⁶¹ Intan Zainafree, A. Widati S, dan Endang Wahyati Y, “*Kebijakan ASI Eksklusif dan Kesejahteraan Anak Dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak*” (SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol 2, Nomor 1, tahun 2016), hlm. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait Pasal-Pasal pemberian ASI eksklusif, dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI eksklusif.¹⁶²

7. Jurnal yang ditulis oleh Sri Sugiarti, dan Tri Suryanti dengan judul, “Kebijakan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Sebagai Faktor Penentu Pola Menyusui Ibu dengan ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Mondokan Sragen”.¹⁶³

Hasil kesimpulan pada jurnal yang ditulis oleh Sri Sugiarti, dan Tri Suryanti dengan judul, “Kebijakan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Sebagai Faktor Penentu Pola Menyusui Ibu dengan ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Mondokan Sragen” dalam jurnal GASTER, Vol. 17, Nomor 1, tahun 2019, yaitu menyebutkan bahwa Kebijakan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif belum semua diterapkan oleh semua pihak yang terkait. Dalam penelitian ini kebijakan yang paling efisien terhadap perubahan perilaku ibu menyusui secara eksklusif adalah kebijakan terkait kewajiban bagi para staff layanan kesehatan untuk mempromosikan ASI eksklusif dengan rujukan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui (LMKP).¹⁶⁴

Selain penelitian dari Tesis dan Jurnal di atas ada juga penelitian-penelitian dalam bentuk Skripsi yang relevan bagi penelitian ini dan berkaitan dengan masalah ASI, Bank ASI, Jual Beli ASI, Donor ASI, Kebijakan Pemerintah, dan dampaknya bagi kehidupan keluarga, diantaranya :

¹⁶² Ibid, hlm. 87

¹⁶³ Sri Sugiarti, dan Tri Suryanti, “Kebijakan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Sebagai Faktor Penentu Pola Menyusui Ibu dengan ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Mondokan Sragen, (GASTER, Vol. 17, Nomor 1, tahun 2019), hlm. 7

¹⁶⁴ Ibid, hlm. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi dengan judul *“Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Indonesia Dalam Perspektif Madzhab Syafi’i”* oleh Wifaqatus Syamilah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun penulisan 2015. Dalam skripsi tersebut membahas praktik jual beli ASI di Indonesia baik yang dilakukan dengan perantara seperti adanya Lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) maupun yang dilakukan oleh orang per orang, proses transaksinya dilakukan secara kekeluargaan, penjualannya juga tidak dipasarkan secara bebas dan identitas dari penjual dan pembeli pun juga jelas. Dalam pandangan Mazhab Syafi’i praktik jual beli ASI yang terjadi di Indonesia itu boleh karena suci dan dapat bermanfaat bagi bayi.¹⁶⁵
2. Skripsi dengan judul *“Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman”* yang ditulis oleh Isti’anah, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun penulisan 2010. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa praktek donor ASI yang terjadi di Indonesia maupun Negara lainnya tidak dapat membawa konsekuensi hukum mahram (hubungan kemahraman) antara perempuan pemilik (pendonor) ASI dengan anak pengguna (pengonsumsi) ASI.¹⁶⁶
 Penelitian ini membahas mengenai donor ASI dan implikasinya terhadap hubungan kemahraman.

¹⁶⁵ Wifaqatus Syamilah, *“Praktek Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Indonesia Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i”*, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2015), dalam <http://digilib.uin-suska.ac.id/17332/>, diakses 20 Juli 2019 pukul 16.10

¹⁶⁶ Isti’anah, *“Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman”*, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2010), dalam <http://digilib.Uin-suska.ac.id/17887/>, diakses 21 Juli 2019 pukul 20.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi dengan judul “*Bank ASI dan Implikasinya Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)*” yang ditulis oleh Khotimatus Sa’adah dari UIN Sunan Kalijaga tahun penulisan 2004. Dalam skripsi ini Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa bank ASI memiliki tujuan yang mulia yaitu menolong bayi-bayi premature yang membutuhkan ASI untuk mempertahankan hidupnya dan untuk menambah daya tahan tubuh. Oleh karena itu anak-anak yang minum dari bank ASI tidak menimbulkan hubungan kemahraman.¹⁶⁷

Penelitian ini membahas mengenai status Bank ASI dan implikasinya terhadap hukum perkawinan Islam (studi pemikiran Yusuf Qardhawi).

4. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)*”, oleh Lisa Ma’rifah dari UIN Sunan Ampel Surabaya tahun penulisan 2008. Pada pembahasan Skripsi ini menitik beratkan pada aspek jual beli ASI yang dilakukan dengan cara memeras air susu ibu dan bukan dengan cara langsung menyusui lewat puting. Dalam Islam hal tersebut bukan termasuk dalam suatu proses penyusuan, karena tidak ada kontak secara langsung antara bayi dengan ibunya. Oleh karena itu praktik ini dianggap sah karena seluruh unsur dari jual

¹⁶⁷ Khotimatus Sa’adah, “*Bank ASI dan Implikasinya Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)*”, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2004), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/6028/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 21.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli yang meliputi subjek akad, *sighat*, objek akad, dan nilai tukar pengganti.¹⁶⁸

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli Air Susu Ibu (ASI).



¹⁶⁸ Lisa Marifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)”, (Subaya: Skripsi tidak diterbitkan, 2008) dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/>, diakses 21 Juli 2019 pukul 22.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks, seperti buku-buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen lainnya.¹⁶⁹ Jenis penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku dan sejenisnya yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitiannya.

Kalau kita lihat dari penelitian kepustakaan maka ada empat ciri utama penelitian kepustakaan, yaitu *Pertama*, si peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data berupa angka, bukan pengetahuan dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. *Kedua*, data pustaka bersifat siap pakai. *Ketiga*, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. *Keempat*, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.¹⁷⁰

Dalam penelitian ini, mengkaji kebijakan pemerintah di Indonesia yang berkaitan dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan dampaknya pada kualitas kehidupan keluarga, maka penelitian ini juga bercorak penelitian hukum normatif yang mengutamakan pengkajian

¹⁶⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm.3. lihat juga : Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet ke-9, hlm.173

¹⁷⁰ Mestika Zed, *Metode*, hlm.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap ketentuan-ketentuan hukum maupun asas-asas hukum pada umumnya seperti Perundang-Undangan yang ada di Indonesia dan Peraturan Pemerintah. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan kepada bahan hukum, baik primer maupun sekunder.

¹⁷¹ Kajian hukum normatif melihat hukum dalam karakternya yang normatif yang berisi tentang kaidah atau penorma. Dalam hal ini kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah bersifat *deskriptif* yaitu merupakan penelitian yang dimaksud untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi atau kejadian-kejadian apa adanya. ¹⁷² Pendekatan *deskriptif* lebih pada menggambarkan keadaan yang saat ini terjadi. Maksudnya bahwa melalui pendekatan *deskriptif* peneliti bisa menggambarkan terkait dengan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan analisis dampaknya pada kualitas kehidupan keluarga yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini.

B. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelaahan kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. Awal penelitian

¹⁷¹ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Pengantar Penelitian Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1985), hlm. 29

¹⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), Hlm. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum segalanya dipersiapkan baik perangkat maupun instrument yang diperlukan dalam menunjang penelitian, perlu dilakukan kegiatan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui lebih detail dan memberikan kerangka berpikir, khususnya referensi relevan yang berasal dari teori-teori tanpa memperdulikan apakah penelitian yang dilakukannya menggunakan data primer atau data sekunder.¹⁷³

Sejalan dengan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah di atas, maka memerlukan data yang harus dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua data yaitu :

1. Data Primer

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah semua buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan pada Disertasi ini seperti buku-buku politik hukum di Indonesia karya Mahfud MD, buku politik hukum karya Winardi dan Sirajuddin, buku politik hukum karya Amran Suadi, buku analisis kebijakan publik (edisi kedua) karangan William N. Dunn, dan buku politik hukum karya Hendra Karianga. Dalam buku-buku tersebut membahas tentang politik hukum dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah dalam melahirkan prodak hukum.

Selain itu juga buku-buku yang membahas tentang Air Susu Ibu (ASI) seperti buku ASI dan Kehamilan yang diterbitkan oleh BKKBN

¹⁷³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta ; Rineka Cipta, 2005), hlm. 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Jambi, Buku ASI Eksklusif, Buku Ilmu Gizi, dan Buku Mencetak Generasi Berkualitas.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa literatur-literatur yang mempunyai sifatnya untuk melengkapi dan menguatkan dari sumber pokok yang ada yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah masalah pemberian ASI eksklusif dan dampaknya pada kualitas kehidupan keluarga.

Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini adalah semua karya tulis baik berupa buku, jurnal ilmiah, jurnal kesehatan, skripsi, tesis, UUD 1945, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 33 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pemberian ASI eksklusif, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2013 tentang seputar masalah donor ASI. Selanjutnya, bahan tertier atau bahan penunjang yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah berupa kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedi dan lain-lainnya. Selain itu juga peneliti mencari sumber dari beberapa media sosial seperti melalui penelusuran di internet berupa google, website, blog, facebook, whatsapp, twitter, dan juga di instagram kemudian dianalisa untuk ditulis dalam bentuk analisa dan tentunya berdasarkan pada buku pedoman penulisan tesis dan disertasi kampus UIN Sulthan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan politik hukum atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan dampaknya dalam kehidupan keluarga. Sedangkan data sekundernya adalah seluruh buku-buku yang memiliki kaitan dalam penelitian ini, yang penulis rujuk dari banyak buku. Kemudian seluruh data-data tersebut ditelaah, dikutip dan diklasifikasikan serta disusun secara utuh guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

C. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh maka diolah berdasarkan metode berfikir induktif, deduktif, dan komparatif. Metode berfikir induktif adalah menganalisa masalah yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dari fakta yang bersifat umum.¹⁷⁴

Sedangkan metode berfikir komparatif adalah pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki dan membandingkan dengan suatu faktor yang lainnya.¹⁷⁵ Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

¹⁷⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), Cet Ke-2, Hlm.

¹⁷⁵ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1985), Hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Analisa Data

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan atau dibuat oleh pemerintah berkenaan dengan permasalahan pemberian ASI eksklusif di Negara Indonesia, dalam hal ini berdasarkan hasil dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 memperlihatkan bahwa hanya 58,2 % proporsi ibu yang memberikan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), sementara ibu yang tidak memberikan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sebesar 41,8 %.¹⁷⁶ hal ini menunjukkan bahwa masih banyak ibu-ibu di Indonesia yang masih belum memberikan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya IMD masih sangat kurang. Di Indonesia, rata-rata ibu memberikan ASI eksklusif hanya 2 bulan. Pada saat yang bersamaan, pemberian susu formula meningkat 3 kali lipat. Inilah yang menjadi pemikiran awal peneliti ingin mencari dan menggali lebih dalam terkait bagaimana dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal membuat kebijakan-kebijakan masalah pemberian ASI eksklusif kepada bayi dan bagaimana dampaknya pada kualitas kehidupan keluarga. Karena menurut peneliti bahwa dalam hal ini belum optimal pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan.

¹⁷⁶ Tri Windiarto, Al Huda Yusuf,dkk, *Profil Anak Indonesia 2019*, (Jakarta : Diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2019), hal. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

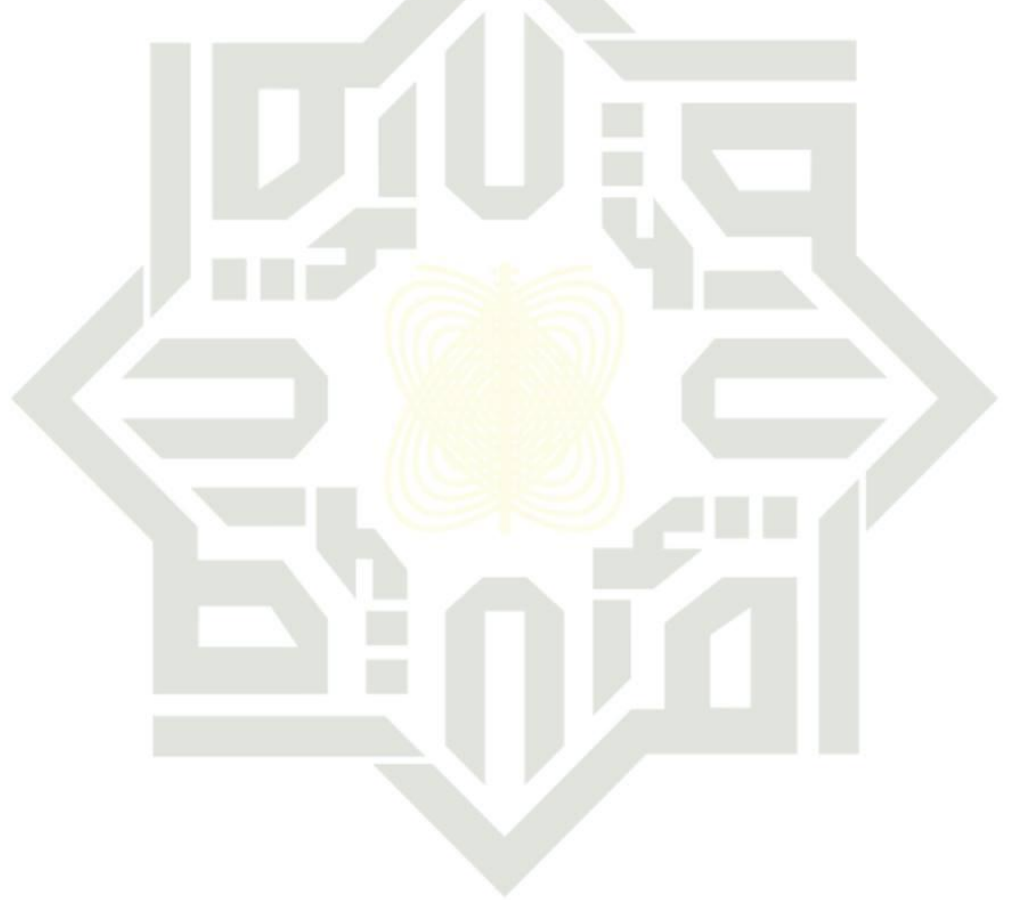
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera digarap oleh peneliti. Dalam hal ini dikenal dengan istilah analisis data. Dalam penelitian ini data yang sudah dikumpulkan dideskripsikan dan diolah untuk diklasifikasikan sesuai dengan jenis datanya. Apakah data-data tersebut termasuk sumber primer atau sumber sekunder.

Peneliti dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan metode analisa isi (*content analysis*), yaitu melakukan analisa terhadap kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan ASI dan dampaknya pada kualitas kehidupan keluarga. Kebijakan pemerintah dalam hal ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Seperti adanya peraturan kebijakan ASI eksklusif Indonesia mengalami proses yang cukup panjang, tercatat sampai saat ini terdapat beberapa peraturan terkait dengan pemberian ASI eksklusif di Indonesia yaitu Permenkes RI No. 240/MENKES/PER/V/1985 Tentang Pengganti ASI, Kepmenkes RI No. 237/MENKES/SK/IV/1997 tentang Pemasaran Pengganti ASI, dan KEPMENKES RI No. 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang pemberian ASI secara eksklusif pada bayi di Indonesia. Dan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Selanjutnya ditelaah kembali apakah kebijakan pemerintah tersebut sudah optimal dilakukan oleh pemerintah atau belum. Setelah dianalisa maka akan ada rekomendasi atau saran kepada pemerintah terkait kebijakan dalam hal pemberian ASI dan dampaknya pada kualitas kehidupan keluarga. Dalam menganalisis data tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis, dan efektif serta

sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan kontruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis, dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu terkait kebijakan dalam hal pemberian ASI dan dampaknya pada kualitas kehidupan keluarga.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Terkait Air Susu Ibu (ASI) bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak merupakan tanggung jawab negara kepada warganya. Tentu saja hal ini juga berlaku bagi anak, sehingga anak berhak pula mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan program pemberian ASI eksklusif yang ditegaskan dalam Pasal 128 ayat (2), berarti negara wajib dan bertanggung jawab menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang akan mendukung pelaksanaan program ASI eksklusif. Penyediaan fasilitasnya bisa berupa fasilitas-fasilitas umum untuk menyusui, yaitu ruang menyusui (*nursery room*). Banyak tindakan yang relatif murah dan mudah diterapkan untuk meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup anak, terutama bayi baru lahir. Salah satunya adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) segera setelah lahir atau biasa disebut Inisiasi Menyusu Dini (IMD) serta pemberian ASI eksklusif sampai usia enam bulan. Hal ini didukung oleh pernyataan *United Nations Children Funds* (UNICEF), bahwa sebanyak 30.000 kematian bayi di Indonesia dan 10 juta kematian anak balita di dunia tiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahunnya, bisa dicegah melalui pemberian ASI secara eksklusif selama enam bulan sejak tanggal kelahirannya, tanpa harus memberikan makanan serta minuman tambahan kepada bayi.

Gerakan untuk memberikan ASI secara eksklusif dinilai masih kurang menggema dan minim dukungan dari banyak pihak. Padahal, pemerintah telah membuat peraturan yang menjamin hak anak untuk mendapatkan ASI seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait Pasal-Pasal pemberian ASI eksklusif, dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI eksklusif.

2. Dampak Air Susu Ibu (ASI) pada kehidupan keluarga ada 5 hal yaitu *pertama*, Air Susu Ibu (ASI) dapat menurunkan angka kematian bayi. Hal ini sejalan dengan Pemberian ASI (Air Susu Ibu) eksklusif adalah pemberian air susu ibu kepada bayi umur 0-6 bulan tanpa diberikan makanan atau minuman tambahan. ASI mempunyai manfaat yang besar bagi bayi karena memiliki efek positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Bayi yang mendapatkan ASI akan lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit infeksi. Hal inilah yang dapat menurunkan angka kematian bayi. Dari aspek hukum, pemberian ASI eksklusif berarti memenuhi hak anak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang menjamin hak anak untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI), seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif. Dengan adanya peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah maka, dalam hal ini sebenarnya pemerintah sudah menjamin setiap bayi yang lahir mempunyai hak hidup. Dalam hal ini sebenarnya juga sejalan dengan hukum islam yang mengajurkan agar menyusui bayinya selama kurang lebih 2 tahun. *Kedua*, Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dalam hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan pada anak-anak. Dalam hal ini anak yang diberikan ASI oleh ibunya maka anak akan menjadi cerdas karena otak akan mengalami evolusi, begitu pula dalam perkembangan emosional anak, dimana otak akan menyerap segala informasi dengan baik, sehingga bayi yang mendapatkan ASI eksklusif akan tumbuh menjadi anak yang lebih pintar dalam membaca, menulis dan matematika, hal ini dikarenakan asam lemak rantai panjang (*long chain fatty acids*) yang terkandung dalam ASI menyebabkan otak bayi berkembang. *Ketiga*, dapat meningkatkan status kesehatan pada ibu dan bayi. Dalam hal ini jelas bahwa dengan memberikan ASI eksklusif merupakan pilihan yang tepat. Dimana ASI adalah nutrisi terbaik bagi pertumbuhan bayi. Ibu yang memberikan ASI eksklusifnya kepada bayi akan menjadi sehat baik secara jasmani dan rohani. Bahkan para dokter dan ahli sangat menganjurkan agar caira pertama yang berwarna kekuning-kuningan yang keluar dari puting payudara ibu yang baru melahirkan langsung diberika kepada anaknya. Dimana cairan berwarna kekuning-kuningan itulah yang berisi zat antibodi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat diperlukan bayi untuk menjaga kekebalan tubuhnya. Bayi-bayi yang memperoleh zat antibodi ini akan tumbuh dengan sehat dan berkembang secara tepat. *Kempat*, dapat menghemat pengeluaran rumah tangga. ASI dirasakan banyak sekali manfaatnya, baik bagi ibu dan keluarga. Dimana dengan memberikan ASI eksklusif kepada bayinya maka orangtua tidak perlu lagi memberikan susu formula, ibu bisa menghemat banyak biaya karena tidak perlu membeli botol susu, dot, dan susu formula yang harganya bisa sangat mahal. Sehingga hal ini tentunya akan menekan pengeluaran keluarga. *Kelima*, dapat menumbuhkan teladan cinta kasih dan kemanusiaan pada orangtua dan anaknya. Dengan menyusui pada ibu kandung, anak akan merasa lebih tenteram, sebab menurut penelitian ilmiah, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita ibu kandung dengan wanita yang lain. dengan demikian benih-benih cinta kasih sayang akan terjalin sangat mesra antara ibu dengan seorang anaknya.

3. Tinjauan hukum Islam mengenai hak menyusui bagi seorang ibu. Dimana para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena nanti hal itu akan ditanyakan di hadapan Allah SWT, baik wanita tersebut masih menjadi istri ayah dari bayi maupun sudah diceraikan dan sudah selesai iddah-nya. Dalam hal ini bisa dipahami bahwa para ulama sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu dalam tiga hal berikut yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama, Si anak tidak menerima susuan orang lain selain ibu kandungnya. Dalam hal ini si ibu wajib menyusui si anak demi keselamatannya. Demikian juga bagi wanita yang menyusui dengan imbalan, jika memang si anak tidak menerima susuan selain darinya. *Kedua*, Tidak menemukan wanita lain yang menyusui anaknya selain dirinya sendiri. Dalam hal ini juga wajib baginya untuk menyusui anaknya demi keselamatan si anak. *Ketiga*, Jika suami atau si bayi tidak mempunyai harta untuk biaya sewa manita yang mau menyusui maka seorang ibu wajib menyusui anaknya agar tidak meninggal dunia. Sementara itu Ulama Syafi'iyah mewajibkan bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya pada awal kelahiran anak karena umumnya seorang bayi tidak mampu hidup tanpa susu tersebut, dan susu tersebut tidak bisa digantikan dengan yang lainnya.

B. Rekomendasi

Menurut peneliti ada beberapa terobosan dan langkah penting yang bisa dilakukan dalam hal terkait kebijakan ASI di Negara kita adalah :

1. Membuat kebijakan bahwa semua bidan wajib menandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa mereka tidak akan bekerjasama dengan produsen susu formula pada saat pembaharuan izin.
2. Membuat dan mengajukan Perda ASI yang akan disahkan oleh DPRD. Perda merupakan kunci kesinambungan program ASI. Dengan diberlakukannya Perda, terdapat mekanisme penegakan hukum dan alokasi dana rutin untuk mempertahankan program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Setiap puskesmas wajib mengalokasikan dana untuk program ASI. Advokasi juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada Camat dan Kepala Desa, sehingga berbagai dana pembangunan di kecamatan dan desa digunakan untuk mendukung program ASI. Bisa menggunakan anggaran dana desa yang diberikan oleh pusat.
4. Pemberian sanksi (sosial maupun kepegawaian) kepada petugas kesehatan yang melakukan pelanggaran Perda ASI tersebut. Tujuannya agar ada efek jera pada petugas yang telah melakukan pelanggaran.
5. Melalui kebijakan yang dibuat seluruh kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan, organisasi profesi kesehatan dan rumah sakit di Kabupaten bebas sponsor dari perusahaan susu formula. Sehingga tidak ada satupun sponsor promosi produk susu formula pada masyarakat.
6. Memotivasi dokter, dokter gigi, perawat, petugas KB, bidan dan petugas kesehatan lain untuk mengikuti pelatihan konselor atas kesadaran sendiri, dan tanpa melalui perintah. Kalau bisa juga ada dianggarkan oleh pemerintah pusat terkait biaya pelatihannya.

C. Saran-Saran

- a. Bagi Pemerintah :
 - 1) Pemerintah hendaknya lebih gencar melakukan kampanye tentang pentingnya memberikan ASI eksklusif.
 - 2) Pemerintah dan pengusaha yang memiliki karyawan ibu menyusui hendaknya mentaati peraturan untuk menyediakan fasilitas menyusui. Perusahaan juga harus memberikan kesempatan pada ibu menyusui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memberikan ASI pada bayinya (baik secara langsung ataupun melalui ASI yang diperah lalu disimpan).

- 3) Pengaturan tentang ASI eksklusif yang telah dikeluarkan hendaknya ditaati bersama dan apabila ada pelanggaran, seharusnya sanksi yang ada dapat ditegakkan.

b. Bagi Pusat Layanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan :

- 1) Rumah sakit dan seluruh pusat layanan kesehatan sebaiknya tidak memberikan peluang kepada produsen susu formula untuk menawarkan produknya kepada ibu setelah melahirkan. Baik melalui promosi secara langsung maupun melalui promosi yang terselubung.
- 2) Pemasaran makanan pengganti air susu ibu sebaiknya lebih diperhatikan, agar ibu tidak tergiur untuk memberikannya kepada bayinya. Peran serta tenaga kesehatan juga diperlukan agar tenaga kesehatan mendukung ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif dengan cara tidak menawarkan pengganti ASI pada ibu setelah melahirkan bayinya.

c. Bagi Ibu, Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga Terkait :

- 1) Pengetahuan ibu tentang pemberian ASI eksklusif perlu ditingkatkan. Hal ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tugas ibu, keluarga, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait.
- 2) Diperlukan kesadaran dan kerjasama yang erat antar berbagai pihak, baik antara ibu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk mewujudkan suksesnya kebijakan program ASI eksklusif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Lubaabut Tafsir min Ibn Katsiir*, jilid 7, Penerjemah M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004).
- Abdullah, Abdul Hakim, *Keutamaan Air Susu Ibu*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993).
- Aini, Rafiah, “*Studi Kritis Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) Dan Implikasinya Terhadap Hurmatur Raḍa’ah*”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010)
- Agustinus H, *Keluarga Sebagai Tempat Pembinaan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Visindo Media Persada, 2007).
- al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, dkk., *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, penerjemah Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2016).
- al-Albaniy, Muhammad Nasiruddin, *Shahih wa Dla’if Sunan*, Juz III, (Iskandariyah: Nurul Islam, t.t.).
- al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr, *Sunan al-Baihaqi al-Kubro*, Juz VII, (Mekah: Maktabah Dar al-Baaz, 1414H).
- Alisriani, Winda, “*Telaah terhadap Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Bank Air Susu Ibu dan Konsekuensinya terhadap Larangan Perkawinan karena Sepersusuan*”, tesis tidak diterbitkan, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015)
- Almad dan Muslim, *Nailul Authaar*, Vol. 6, (Damaskus: Daar al-Fikr, t.t.).
- Alkaamul Qur’an li Ibni Arabi*, Vol. 1
- Alkaamul Qur’an lil Jashshaash*, V. 1
- ad-Durrul Mukhtar wa Haasyiyah Ibnu Abidin*, Vol. 2
- Al-Ju’fi, Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulullah saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz VII, (Kairo: Daar Thuuq al-Najaat, 1422H).
- Al-Kalam Digital versi 1.0., (Bandung: Dipenogoro, 2009).
- al-Naisabury, Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim, *al-Mustadrak ‘ala al-Shohihain*, Juz II, (Mesir: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990).
- al-Naisabury, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila Rasulullah saw.*, Juz II, (Beirut: Daar Ihya al-Turots al-‘Arabiyy, t.t.).
- Al-Qardhawi, *al-Fatawa al-Mu’ahirah*, juz 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Salus, 'Ali Ahmad, *Mawsu'ah al-Qadlaya al-Fiqhiyyah al-Mu'ashiroh*, (Mesir: Maktabah Daar al-Qur'an, 2002).
- Sijistany, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.).
- Suyuthi, 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr, al-Asybah wa al-Nadlair al-Syafi'i, Juz I, (Mesir: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983).
- Syafi'i, Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abu al-Fadl al-'Asqalaniy, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Juz IX, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1379H).
- Syathiby, Abu Ishak Ibrahim, *al-Muwafaqat*, Juz II, (Daar ibn 'Affan, 1997).
- Tirmidzy, Muhammad bin Isa bin, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, (Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1395H).
- Zabidiy, Muhammad bin Muhammad 'Abd al-Razzaq al-Husainiy, *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, Juz 21, (Kuwait: Daar al-Hidayat, 2008).
- Zuhailly, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Damaskus: Daar al-Fikr, t.t.).
- Al-Zuhailly Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid X, (Jakarta : Darulfikir Gema Insani, 2011). Hlm. 45
- Anas, Malik bin, *al-Muwatha*, Juz IV, (Kairo: Zayid bin Sulthon Ali Nahyan, 1425H).
- Ariani, *Ibu Susui Aku. Bayi Sehat dan Cerdas dengan ASI*, (Bandung: Khasanah Intelektual, 2009).
- Arisman, *Buku Ajar Ilmu Gizi : Gizi dalam Daur Kehidupan*, (EGC. Jakarta, 2004)
- Badan Pusat Statistik, BKKBN, Departemen Kesehatan, *Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2006-2007*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2007)
- Biancuzzo, Marie, *Breastfeeding the Newborn: Clinical Strategies for Nurses*, (Michigan: Mosby, 1999).
- Departemen Kesehatan RI, *Buku Panduan Manajemen Laktasi*, (Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat, 1991).
- Fahani, Ahwan, Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam, *Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012.
- Gupta, Dipa K., *Neonatology: Principles and Practice*, (New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2005).
- Hockenberry, Marilyn J. and David Wilson, *Wong's Nursing Care of Infants and Children*, (St. Louis Missouri, Elsevier Mosby, 2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hooker, M.B., *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, penerjemah: Iding Rasyidin Hasan, (Jakarta: Teraju, 2003).

<http://m.bisnis.com/lifestyle/read/20161023/236/594995/cakupan-asi-eksklusif-di-indonesia-baru-42> diunduh pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 3:05 pm.

<http://m.inilah.com/news/detail/2174673/tentang-donor-asi-dan-bank-air-susu-ibu>

http://perpustakaan.litbang.depkes.go.id/pusat2/index.php?p=show_detail&id=5271

http://www.unicef.org/indonesia/id/media_21914.htm

<http://www.who.int/mediacentre/events/2016/world-breastfeeding-week/en/> setiap tanggal 1 – 7 Agustus.

Ibnu Hibban, *Shahih-nya (Nashbur Raayah)*, Vol. 3, (Damaskus: Daar al-Fikr, t.t.).

Ibnu Hazm, Ali ibn Ahmad ibn Sa'id, *al-Muhalla*, Jilid X, (Mesir: Mathba'ah al-Nahdlah, 1347H).

Ibnu Rusyd, Abu al-Walid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz II, (Mesir: Musthafa al-Babi, 1975).

Ibnu Qudamah, *al-Mughnii*, Vol. 7, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011)

Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadiir*, Vol. 3, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011)

Isti' anah, "*Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman*", (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2010), dalam <http://digilib.Uin-suka.ac.id/17887/>,

Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Pada Sidang Dewan Hisbah Lengkap di Gedung Haji Qanul Manazil, Ciganitri Bandung, 26 Rabi'ul Awwal 1433 H/19 Februari 2012 M Tentang "Hukum Bank ASI "

Khotimatus Sa'adah, "*Bank ASI dan Implikasinya Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)*", (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2004), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/6028/>,

Linden, Dana Wechsler, Emma Trenti Paroli, Mia Wechsler Doron, Preemies - Second Edition: *The Essential Guide for Parents of Premature Babies*, (New York: Gallery Books, 2010).

Lia Marifah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)*", (Surabaya: Skripsi tidak diterbitkan, 2008) dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/>,

Manjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Cet. V, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003).

, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Juz II, ditahqiq oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baaqiy, (Beirut: Daar Ihya al-Turots al-'Arabiyy, t.t.).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- “Munadloma al-Islamiyah li al-‘Ulum al-Thobibah”, *Majma’ al-Fiqh al-Islamiy*, Edisi II, Vol. I, 1986.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Mataram, I. Komang Agusjaya, “Aspek Imunologi Air Susu Ibu”, *Jurnal Ilmu Gizi*, Vol. 2 No. 1, Februari 2011.
- Muhammad abubakar, *Terjemahan Subulus Salaam*, Vol. 3, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1996)
- Muhammad Fu’ad ‘Abdul baqi, *Terjemah al-lu’lu’ Wal Marjan*, jilid II, (Semarang : Al-Ridha, 1993)
- Nurmiati dan Besral, *Pengaruh Durasi Pemberian ASI Terhadap Ketahanan Hidup Bayi di Indonesia*, Makara, Kesehatan, Vol. 12, No. 2, Desember 2008
- Prawira, Muhammad Yudi, Purwanto, M. Azis Muslim, Pengendalian Suhu Pada Pasteurisasi Asi (Air Susu Ibu) Dengan Metode Flash Heating Berbasis Mikrokontroler Atmega
- Qasim, Hamzah Muhammad, *Manar al-Qori Syarah Mukhtashar Shahih Bukhori*, Juz V, (Damaskus: Daar al-Bayan, 1410H).
- Ramli, Noraida, Nor Roshidah Ibrahim, Van Rostenberghe Hans. “Human Milk Banks: The Benefits and Issues in an Islamic Setting” *Eastern Journal of Medicine* 15 (2010)
- Rusyd Ibnu, *Bidayaatul Mujtahid*, jilid 3, Vol. 2, (Jakarta : Pustaka Amani, 1995).
- Roesli, U., *Mengenal ASI Eksklusif*, (Jakarta: Trubus Agriwidya, 2005).
- Sears, William, dkk., *The Baby Book: Segala Hal yang Perlu Anda Ketahui tentang Bayi Anda Sejak Lahir Hingga Usia Dua Tahun*, (Jakarta: Serambi, 2007).
- Shhab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta ; Lentera Hati, 2002)
- Siswanto, Mendra, “Pola Penalaran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer”, *Tesis tidak diterbitkan*, (Pekanbaru: UIN Suska, 2011).
- Sitompul, Ewa Molika, *Dahsyatnya Gerakan Shalat untuk Ibu dan Janin*, (Jakarta: Publishing Langit, 2014).
- Soetjiningsih, *ASI Petunjuk untuk Tenaga Kesehatan*, (Jakarta: EGC, 1997).
- Tafsirul Qur’an li Ibni Katsiir, Vol. 1
- Taty Elmira, *Bravo Ayah dan Ibu ASI: Para Pahlawan di jalan Sunyi*, (Jakarta ; Eduvation : 2012).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahjudi, *Mencetak Generasi Cerdas Dan Berkualitas*, (Yogyakarta : Cempaka Putih , 2007).

WHO, *Infant and Young Child Feeding Model Chapter for Texbooks for Medical Studentand allied Health Proessionals*, Geneva: WHO, 2009.

Widy Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012, *Pemantapan Ketahanan Pangan dan Perbaikan Gizi Berbasis Kemandirian dan Kearifan Lokal*, 6 September 2012

Wifaqatus Syamilah, “*Praktek Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Indonesia Dalam Perspektif Mazhab Syafi’I*”, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2015), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/17332/>,

Yudianto dkk., (ed.), *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015), hlm. 114.

Yuliarti, Nurheti, *Keajaiban ASI - Makanan Terbaik Untuk Kesehatan, Kecerdasan dan Kelincahan si Kecil*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010).

Zainuddin bin abdul aziz al-malibari al-fannani, *Terjemah Fat-hul Mu’in*, Jilid II, (Bandung Sinar Baru Algensindo, 1994)

Zakiudin Munasir dan Nia Kurniati, “*Air Susu Ibu dan Kekebalan Tubuh*” Lihat <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/air-susu-ibu-dan-kekebalan-tubuh>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 237/Menkes/SK/IV/1997 Tentang pemasaran Pengganti ASI

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 459/Menkes/SK/IV/2004 Tentang Pemberian AIS secara Eksklusif pada bayi di Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 240/Menkes/PER/V/1985 Tentang Pengganti ASI

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS

Hak C
1. Dili



Tempat/Tgl. Lahir
Pekerjaan
Alamat Rumah

No. Tlp/HP
Alamat **email**
Face book

Nama Orang Tua

Nama Anak
Nama Istri
Anak

RIWAYAT Pendidikan

SMP
SMA

S.1
S.2
S.3

RIWAYAT PEKERJAAN :

1. Dosen IAI YASNI BUNGO PROVINSI JAMBI
2. Ketua YAYASAN ANAK KITA BUNGO

PENGALAMAN ORGANISASI :

1. Ta'hir Masjid At-Taqwa Dusun Purwasari Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo
2. Forum Ukhuwah Peduli Bungo (FUPB) Kabupaten Bungo

: Muklisin, S.H.I, M.H
: Sarko, 24 April 1983
: Dosen IAI YASNI BUNGO PROVINSI JAMBI
: Jl. Asahan Rt 37/Rw 01, Ds. Purwasari, Kec. Pelepat Ilir,
Kab. Bungo Prov. Jambi. Kode pos 37252

: 081374308120
: muklisinmukidi@gmail.com

: Muklisin

:

: H. Mukidi, S.Pd.i

: Sulimah

: Iffah Pohan. M.Psi Psikolog

: 1. Muhammad Ghafarul Affan (klas 5 Sdit Addhuha)

2. Muhammad Imam ASy Syahid (klas 4 Sdit addhuha)

:

: SDN 258/Rejosari Kab. Merangin

Lulus Tahun 1996

: SMPN 8 Merangin

Lulus Tahun 1999

: MAN Muara Bungo

Lulus Tahun 2001

: IAIN Imam Bonjol Padang

Lulus Tahun 2005

: Pascasarjana Unand Padang

Lulus Tahun 2007

: UIN Suska Riau

Lulus Tahun 2020

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kabupaten Bungo
4. Ketua Korwil Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) wilayah Jambi (2019-sekarang)
5. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bungo (2018-sekarang)
6. Ketua Yayasan Anak Kita Bungo (2012-sekarang)

KARYA ILMIAH :

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik Menurut Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977 di Kecamatan Muara Bungo”. Tahun 2001
2. Tesis dengan judul “Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kepada Pemilih Dan Daerah Pemilihannya” tahun 2007
3. Jurnal ilmiah dengan judul jurnal : “*Optimalisasi manajemen peningkatan mutu pada pendidikan anak usia dini berbasis masyarakat*”, di muat di Jurnal Nur el-islam vol 1 tahun 2013, STAI YASNI Bungo.
4. Jurnal Ilmiah dengan Judul : “*Profesionalitas kepala sekolah dalam keberhasilan kurikulum 2013*” di Jurnal Nur el-islam vol.3 tahun 2015, IAI YASNI Bungo.
5. Jurnal ilmiah dengan Judul : “*Strategi pengelolaan zakat dalam upaya mengembangkan usaha produktif (studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Bungo)*” di Jurnal Juris IAIN Batusangkar Vol.17 tahun 2018.
6. Jurnal Ilmiah dengan judul : “*Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an pada Suku Anak Dalam (Studi Kasus di Dusun Dwi Karya Bhakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo)*” di Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya Sumatera Barat (BPNB) Tahun 2019.
7. Jurnal Ilmiah dengan judul : “*Penyaluran Zakat Dalam Upaya Mengembangkan Modal Usaha (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)*” di Jurnal ISTIKHLAF Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAI Yasni Bungo Tahun 2020.
8. Buku dengan judul “Ikatan Muslim Kuamang Kuning dalam bingkai sejarah” tahun terbit 2019 dicetak Pustaka Media Guru.
9. Buku dengan judul “Mentari bersinar di Ad-dhuha” tahun terbit 2019 dicetak Pustaka Media Guru.
10. Buku dengan judul “Embun pagi Ad-dhuha” tahun terbit 2019 dicetak Pustaka Media Guru.
11. Buku dengan judul “Pertanggungjawaban anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kepada konstituennya” tahun 2020 dicetak Pustaka Media Guru.
12. Buku dengan judul “Aspek Hukum Dalam Ekonomi” tahun terbit 2020 dicetak Eduvation Jawa Timur.
13. Buku antologi dengan judul “Ramadhan bersama anak” tahun 2019. Penerbit Pustaka Media Guru.
14. Buku antologi dengan judul “Indonesia is We” tahun 2019 penerbit Pustaka Media Guru.
15. Buku antologi dengan judul “dari film pendek hingga pandai sikek (Best Practice)” tahun 2019 penerbit Pustaka Media Guru.
16. Buku antologi dengan judul “filosofi akar : menggali 1001 tradisi lebaran di nusantara” tahun 2020

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



17. Buku antologi dengan judul “Doa terbaik untuk ibu” tahun terbit 2020 penerbit Pustaka Media Guru
18. Buku antologi dengan judul “PPDB Zonasi : Dilema Pendidikan Indonesia” tahun terbit 2020 penerbit Pustaka Media Guru
19. Buku Antologi dengan judul “Bangga menjadi guru literat “ tahun terbit 2020 penerbit Pustaka Media Guru
20. Buku antologi dengan judul “yuk meong rame-rame” tahun terbit 2020 penerbit Pustaka Media Guru.
21. Buku antologi dengan judul “Permainan tradisional pembentuk karakter generasi emas Indonesia” tahun 2020
22. Buku antologi dengan judul “99 kuliner nusantara penggoda selera” tahun 2020 penerbit Beta Aksara.
23. Buku antologi dengan judul “E-Learning Menyenangkan tanpa takut corona” tahun 2020 penerbit Beta Aksara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.